

REVISI

PERENCANAAN STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBRANA
2011 – 2016



Jalan Mayor Sugianyar No. 1 Kompleks Civics Centre

Telp. (0365) 41210 Fax (0365) 421010

Negara Bali

2015



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBRANA**
Jalan Mayor Sugianyar No. 3 Komplek Civics Centre Telp. (0365) 41210
NEGARA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR : 131 / DIKPORAPARBUD/ 2016

TENTANG
REVISI PERENCANAAN STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
OLAHRAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2011-2016

KEPALA DINAS DIKPORAPARBUD KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggung jawab dipandang perlu adanya penyusunan Perencanaan Strategis Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2011-2016 untuk menjabarkan Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Pariwisata dan Kebudayaan berdasarkan pada Perda nomor 15 Tahun 2011;
 - b. bahwa untuk merencanakan program dan kegiatan tahun 2011-2016 dipandang perlu menetapkan Perencanaan Strategis Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember;
 - c. bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a dan b diatas, Penetapan Perencanaan Strategis Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jemberana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jemberana

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 46 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 143) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Nomor 615);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Revisi Perencanaan Strategis Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016.
- KEDUA** : Revisi Perencanaan Strategis Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana 2011-2016 dimaksud dalam diktum **PERTAMA** disusun berdasarkan pada Visi, Misi, tujuan dan Sasaran Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Bupati Jembrana sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan .

- KETIGA : Naskah Perencanaan Strategis Dinas Pendidikan Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2011-2016 dimaksud dalam diktum PERTAMA, sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Negara, 20 Pebruari 2016
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga
Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Jembrana



NENG AH ALIT, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19541215 198803 1 007

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Jembrana sebagai laporan,
2. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana sebagai laporan,
3. Wakil Bupati Jembrana sebagai laporan,
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana sebagai laporan,
5. Kepala Badan/Dinas/Kantor/instansi dan Bagian di Lingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana sebagai laporan,
6. Para Camat se-Kabupaten Jembrana,
7. Arsip.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas bimbinganNya, Penyusunan Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jemberana ini dapat kami selesaikan. Adapun tujuan Penyusunan Perencanaan Strategis (RENSTRA) ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat isu strategis bagi Pembangunan Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Jemberana.

Dalam Bab III Pasal 7 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan dilakukannya penyusunan Perencanaan Strategis (RENSTRA). Dengan ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jemberana 2011 – 2016, maka sesuai dengan ketentuan Bab V Pasal 15 ayat 3 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Perencanaan Strategis (RENSTRA) SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi Perencanaan Strategis (RENSTRA) ini, sehingga segala usul dan saran yang bermanfaat untuk menyempurnakannya sangat kami harapkan dari segala kalangan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Perencanaan Strategis (RENSTRA) ini.

Negara, 20 Pebruari 2016
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga
Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Jemberana

Nengah Alia M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19641215 198803 1 007



RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jemberana adalah merupakan dokumen perencanaan yang memuat kegiatan strategis dalam pembangunan Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Jemberana. Untuk mewujudkan hal tersebut telah ditetapkan Visi yaitu **“TERWUJUDNYA KWALITAS LAYANAN PRIMA PENDIDIKAN DAN KEPARIWISATAAN YANG BERBUDAYA, MENUJU MASYARAKAT JEMBERANA YANG CERDAS, TRAMPIL, MANDIRI BERMUTU DAN BERWAWASAN SERTA RELEVAN DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT JEMBERANA”**.

Untuk mewujudkan Visi Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jemberana, maka ditetapkan 10 (sepuluh) Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan sistem dan iklim pendidikan yang demokratis dan berkualitas
2. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang kreatif, produktif, mandiri, berdaya saing dan berwawasan global
3. Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan bagi seluruh masyarakat Jemberana
4. Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan
5. Meningkatkan Kualitas/Mutu Layanan Pendidikan
6. Mewujudkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan
7. Menjamin Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan
8. Pengembangan Kebudayaan Daerah dan Nasional
9. Mewujudkan Sarana prasarana Pariwisata yang memadai serta melestarikan obyek dan daya tarik wisata



10. Menjamin kerjasama lintas sektoral untuk pengembangan kepariwisataan daerah.

Dalam upaya mewujudkan Misi yang diinginkan maka telah ditetapkan 8 (delapan) tujuan strategis dinas 2011 – 2016 adalah sebagai berikut :

1. Tersedia dan terjangkau layanan PAUD bermutu dan berkeselarasan di Kabupaten Jemberana
2. Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di Kabupaten Jemberana
3. Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan menengah bermutu, relevan dan berkesetaraan di Kabupaten Jemberana
4. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.
5. Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk-produk Daerah
6. Melaksanakan pembinaan aktivitas generasi muda/pelajar.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka telah ditetapkan sasaran yang ingin dicapai, yaitu :

1. Meningkatnya APK Kabupaten minimal 100%
2. Seluruh kepala sekolah SMA dan SMK mengikuti pelatihan Profesional berkelanjutan.
3. Sekurang-kurangnya 98% guru SMA/SMK berkualifikasi S-1/D-4, dan sekurang-kurangnya 90% bersertifikat.
4. 70% Lulusan SMK bekerja pada tahun kelulusan
5. Seluruh SMK menyediakan layanan pembinaan pengembangan kewirausahaan.
7. Meningkatnya tingkat efisiensi internal yang ditandai dengan meningkatnya angka melanjutkan minimal 95% dan menurunnya angka putus sekolah maksimal 1% untuk jenjang pendidikan menengah.
8. Seluruh satuan pendidikan SMA menerapkan pembelajaran yang membangun karakter.
9. Terbinanya Lembaga Adat Daerah di Kabupaten Jemberana minimal 80%
10. Dilestarikannya lembaga Adat Daerah dan pengembangan nilai budaya minimal 90%
11. Terselamatkannya kekayaan daerah yang dikelola 100%
12. Meningkatnya kualitas peran serta kepemudaan minimal 80%
13. Meningkatnya tingkat partisipasi pemuda yang dibina minimal 70%
14. Meningkatnya atlet pelajar yang berprestasi dan lolos ke tingkat propinsi dan nasional minimal 85%
15. Meningkatnya kesadaran Generasi muda/masyarakat akan pentingnya olahraga minimal



75%

16 Meningkatnya pengembangan dan pemasaran pariwisata minimal 25%

17 Meningkatnya Prosentase kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Jemberana minimal 10% dari tahun sebelumnya.

Disamping itu Kebijakan yang ditempuh mengacu pada ketentuan perundang – undangan serta peraturan lainnya seperti :

1. Undang – Undang No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang – Undang No. 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Daerah.
3. Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana No. 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jemberana Tahun 2006 – 2025.
5. Peraturan Bupati Jemberana No. 19 tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jemberana Tahun 2011.

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan tersebut dilakukan melalui berbagai Program, antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
5. Program Wajib Belajar 9 Tahun.
6. Program Pendidikan Menengah
7. Program Pendidikan Non Formal
8. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
9. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
10. Program Pengembangan Nilai Budaya
11. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
12. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
13. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
14. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan.



15. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
16. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
17. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
18. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
19. Program Pengembangan Kemitraan



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
SURAT KEPUTUSAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KAB. JEMBRANA	
2.1. Tugas Fungsi dan struktur Organisasi	13
2.2. Sumber Daya SKPD	49
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.....	50
2.4. Peluang, Tantangan, Kekuatan dan Kelemahan	56
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	58
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	59
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	60
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	62
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI dan KEBIJAKAN	
4.1 Visi dan Misi SKPD	81
4.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2011-2016	82
4.3 Strategi dan Kebijakan Umum	84
4.4 Target Penetapan Kinerja	85
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	
5.1 Rencana Prioritas Program	89
5.2 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan.....	93
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD	
6.1 Indikator Kinerja	95
BAB VII PENUTUP	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan disusun berdasarkan pemahaman lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. RENSTRA merupakan dokumen perencanaan taktis-strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD setempat, dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Disamping itu rencana strategis memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijakan dan prioritas sasaran sampai dengan berakhirnya masa perencanaan.

Rencana Strategis SKPD dapat dikategorikan sebagai dokumen manajerial wilayah yang bersifat komprehensif karena mampu memberikan program-program strategis sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang dalam lingkup SKPD. Keberhasilan usaha pemerintah daerah untuk mempertemukan antara keinginan masyarakat dengan fakta kondisi daerah diukur melalui indikator perencanaan strategis dari program dan kegiatan yang tercantum di dalam RENSTRA yang dievaluasi melalui evaluasi kinerja Kepala Daerah sesuai dengan PP No. 108 tahun 2000, dengan memperhatikan indikator evaluasi kinerja yang disosialisasikan secara nasional melalui modul pelatihan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sejalan dengan adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari dilayani menjadi melayani, mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Dalam rangka tahap perencanaan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Startegis SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut disusun berjangka, meliputi :

- a. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun.

Berdasarkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2011 – 2016, maka Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember menyusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember tahun 2011 – 2016. Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember tahun 2011 – 2016 adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya yang merupakan penjabaran lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember tahun 2011 – 2016 pada Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, SKPD berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan RENSTRA SKPD ini adalah :

1. Sebagai acuan bagi Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahunan sehingga perencanaannya lebih terarah.
2. Sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance).
3. Agar terjaminnya sinergisitas, sinkronisasi dan integritas Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jembrana tahun 2011 – 2016.

Disamping itu RENSTRA SKPD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Jembrana khususnya di bidang Pendidikan, Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan.

Dokumen RENSTRA ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang dan mengacu kepada visi dan misi Bupati Jembrana sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan pada Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Bupati sebagai Kepala Daerah terpilih.

Usaha mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen RENSTRA ini perlu didukung dengan strategi umum, yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan yang kemudian diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.

Fungsi Renstra Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana dalam pembangunan daerah khususnya pembangunan pada urusan Perencanaan Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan; sebagai instrumen untuk memberikan arah dan acuan pembangunan Pendidikan guna meningkatkan kinerja Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan.

Sebagaimana diungkapkan di atas, Renstra Dikporaparbud Kabupaten Jembrana merupakan perencanaan pembangunan pada urusan perencanaan Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan dalam kurun lima tahunan. Sebagai perencanaan strategis, maka proses penyusunan Renstra Dikporaparbud Kabupaten

Jembrana melalui beberapa tahapan. **Pertama**, proses penjabaran visi dan misi organisasi. Penjabaran visi dan misi Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana dilakukan dengan fokus group diskusi, dengan tujuan agar seluruh komponen organisasi tahu kearah mana organisasi di bawa agar tetap eksis. Untuk menjabarkan visi organisasi, maka diperlukan misi. Penyusunan visi dan misi organisasi didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana, visi dan misi Kabupaten Jembrana serta memperhatikan visi dan misi kementerian terkait.; **Kedua** menetapkan tujuan. Untuk mewujudkan visi dan misi organisasi ditetapkan tujuan organisasi. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang ingin oleh organisasi selama lima tahun. Tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran. Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun.; **Ketiga** menyusun strategi yaitu cara mencapai tujuan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui ; kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan adalah otoritasnya kepala Dinas Dikporaparbud, sedangkan program dan kegiatan telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Permendagri Nomor 59 tahun 2007.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dokumen Renstra Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana sangat terkait dengan berbagai dokumen perencanaan di tingkat nasional; Provinsi dan Kabupaten seperti : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 (Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali 2008-2013 (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 tahun 2009), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2007 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jembrana 2011-2016.

Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis SKPD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana strategis SKPD harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya. Renstra Dinas Dikporaparbud diharapkan :

- Dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang SMART yang konsisten dengan visi, misi program Bupati serta memperhatikan program prioritas kementerian terkait.

- Dapat memberikan Arah perkembangan daerah sehingga dapat lebih dipahami oleh masyarakat dengan demikian mengembangkan '*sense of ownership*' dari rencana strategis
- Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu dan permasalahan prioritas dalam perencanaan pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
- Menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan
- Dapat dirumuskan fokus dan langkah-langkah yang lebih jelas untuk mencapai tujuan pengembangan pendidikan
- Dapat dihasilkan pengembangan pendidikan yang lebih produktif, efisien dan efektif.

1.2 Landasan Hukum.

RENSTRA Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana tahun 2011 – 2016 ini merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun sesuai kebutuhan dengan mengacu pada :

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 30);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan RENSTRA yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan dapat dipergunakan untuk memecahkan permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa Renstra Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2016 merupakan Rencana Pembangunan Pendidikan Kabupaten Jembrana dalam urusan Perencanaan Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan dalam kurun waktu 5 tahun sebagai penjabaran periode kedua RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2016, maka Renstra Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pembangunan Perencanaan Pendidikan Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Jembrana sebagaimana Visi dan Misi Bupati sehingga setiap *stakeholders* dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan pembangunan Kabupaten Jembrana yang berdaya guna dan berhasil guna.

Sedangkan tujuan penyusunan RENSTRA ini antara lain adalah untuk:

1. Tersusunnya instrumen Rencana Strategis yang merupakan dokumen untuk meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.
2. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja pembangunan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Jembrana.

3. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan
4. Tersusunnya program-program pembangunan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan daerah.
5. Tersusunnya rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis sesuai bidang kewenangan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.
6. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.
7. Sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan pembangunan Perencanaan Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan selama lima tahun.
8. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dengan demikian RENSTRA ini dapat dijadikan acuan dan pegangan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana serta seluruh penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Sistematika Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2016 terdiri atas :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang yang menguraikan secara ringkas : Pengertian Renstra, Fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Proses penyusunan Renstra, Keterkaitan Renstra Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan.

Landasan Hukum : memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan

lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra berisi tentang: penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD.

Sitematika Renstra memuat tentang; pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II PROFIL LAYANAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBRANA

Pada bab ini menguraikan tentang; informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

Bab ini juga memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD menguraikan secara singkat; Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

Sumberdaya memuat; penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional

Kinerja SKPD memuat; tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD; Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD

Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat:

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD; Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ; Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis memuat; apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Penentuan Isu-isu Strategis ; Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari: gambaran pelayanan SKPD, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L ,sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD Kabupaten/Kota, dan implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD , implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD

Strategi Kebijakan memuat; rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, SERTA CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan pernyataan visi dimana visi ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan. Visi pada

hakikatnya merupakan pernyataan kehendak tentang apa yang ingin dan mungkin dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Visi disusun mengacu pada visi RPJMD Kabupaten Jembrana 2011-2016. Misi disusun untuk menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Misi dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran, yang terdiri atas kebijakan, program dan kegiatan.

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI DENGAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Bab ini menguraikan pengertian program yaitu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB VI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

Penetapan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran, pada bagian dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang penutup yang meliputi kaidah pelaksanaan dan penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBRANA

2.1 TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.

Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana merupakan SKPD gabungan berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2008, tanggal 24 Desember 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana. Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang membawahi 1 (satu) Sekretariat, dan 6 (enam) Bidang.

A. Tugas Pokok.

Tugas pokok Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana adalah melakukan urusan pemerintah kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang urusan Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan .

Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana mempunyai fungsi :

- a. Perumus kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya dibidang Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dibidang Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan.

B. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 46 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas Pokok Kabupaten Jember, ditetapkan Tugas Pokok Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember adalah melakukan urusan pemerintah kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang urusan Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, secara struktur organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh beberapa bidang dengan tugas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Mempunyai Tujuan :

1. Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Pendidikan

Dengan indikator tujuan :

- 1.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)
- 1.2. Angka Partisipasi Kasar (APK)
- 1.3. Angka Partisipasi Murni (APM)
- 1.4. Angka Putus Sekolah (DO)
- 1.5. Angka Melanjutkan
- 1.6. Angka Melek Huruf

2. Meningkatnya Mutu Pendidikan

Dengan Indikator :

- 2.1. Angka Kelulusan
- 2.2. Rata-rata Nilai UN

3. Lestarinya Budaya Daerah

Dengan Indikator :

- 3.1. Cakupan Gelar Seni dan Budaya (Pelestarian, Pementasan, Festival, Lomba-lomba)
- 3.2. Persentase Lembaga Adat yang Ajeg
- 3.3. Persentase Warisan Budaya Daerah yang mendapat pengakuan

4. Meningkatnya Partisipasi dan Prestasi Pemuda Olahraga

Dengan Indikator :

- 4.1. Persentase tingkat partisipasi pemuda olahraga
- 4.2. Persentase tingkat prestasi olahraga

5. Meningkatnya Kunjungan Wisata

Dengan Indikator :

- 5.1. Persentase Tingkat Kunjungan Wisata

Kepala Dinas Mempunyai Tygas :

- a. Merumuskan rencana kegiatan berdasarkan kebijakan urusan pendidikan, pemuda olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
- b. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
- c. Mengevaluasi data/bahan untuk perencanaan urusan pendidikan pemuda olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
- d. merencanakan, memanfaatkan, mengendalikan dan mensosialisasikan urusan pendidikan, pemuda olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
- e. Mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan urusan pendidikan, pemuda olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
- f. Mengkoordinasikan pengendalian dan evaluasi kegiatan urusan pendidikan, pemuda olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, KUA dan PPAS; Mengkoordinasikan penyusunan capaian kinerja Dinas;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan dan serah terima kegiatan di bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah, pemuda olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
- j. Mengawasi pelaksanaan ketatausahaan, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah, pemuda olahraga, pariwisata dan kebudayaan

- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan pendidikan, pemuda olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
- l. Mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- m. Memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- n. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;
- p. Melaporkan hasil, pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

2. Sekretaris mempunyai tugas :

- a. Merencanakan operasionalisasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
- b. Memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan Administrasi Umum dan kepegawaian , perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan;
- c. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan dan naskah dinas dibidang tugasnya;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang dalam melaksanakan tugas;
- e. Melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, Inventarisasi dan perlengkapan Perencanaan dan pelaporan serta rumah tangga Dinas;
- f. Menyelenggarakan perawatan/pemeliharaan perlengkapan peralatan dinas;
- g. Merencanakan pelaksanaan pelayanan terhadap kebutuhan peralatan / perlengkapan dinas;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan Penetapan Kinerja Dinas;
- i. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- k. Mengevaluasi tugas yang diberikan kepada kepala sub bagian;
- l. Menyusun Laporan hasil kegiatan;

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1 Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. Membuat rencana operasional program kerja Sub Bagian Umum;
- b. Mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan dinas, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan.
- c. melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga
- d. melaksanakan tugas humas dan keprotokolan dinas, mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian dinas.
- e. mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, penyiapan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian
- f. mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai dinas
- g. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dinas
- h. melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perlengkapan dinas.
- i. melaksanakan pemantauan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor , perlengkapan dan kendaraan dinas.
- j. menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, kenaikan pangkat, gaji berkala dan administrasi pensiun.
- k. membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kependidikan (DUK) dan bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai
- l. mengevaluasi hasil program kerja Sub Bagian;
- m. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

2.2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional kegiatan kerja sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- b. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf;
- c. mengendalikan rencana tahunan;

- d. menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan
- e. mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan dinas;
- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian dan statistik serta informasi Dinas.
- g. melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dinas
- i. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA dan DPA Dinas;
- j. melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan Penetapan Kinerja Dinas;
- k. melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan
- l. membuat laporan hasil kegiatan sub Bagian;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. membuat rencana operasionalisasi program kerja sub bagian keuangan
- b. membuat daftar usulan kegiatan;
- c. membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
- d. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e. menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum
- f. melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas.
- g. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
- h. mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran dengan keputusan bupati;
- i. memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
- j. mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran;
- k. melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan memaraf surat pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan
- l. membuat laporan hasil kegiatan sub Bagian;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar

Mempunyai sasaran : Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar

Indikator :

1. APK SD/MI
2. APM SD/MI
3. APK SMP/MTs
4. APM SMP/MTs
5. Angka Putus Sekolah (DO)
6. Angka Melanjutkan ke SMP
7. Angka Melanjutkan ke SMA/SMK
8. Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs
9. Rata-rata Nilai UN jenjang SD/MI, SMP/MTs
10. Persentase perolehan medali olimpiade mata pelajaran SD/MI, SMP/MTs
11. Persentase guru yang berkualifikasi S1/D4 jenjang SD/MI, SMP/MTs
12. Persentase peningkatan kompetensi tenaga pendidik jenjang SD/MI, SMP/MTs

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Mempunyai Tugas :

- a. Merencanakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai kebijakan Dinas Dikporaparbud;
- b. Menyusun rencana dan program kerja bidang Pendidikan Dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyelenggarakan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- d. Mengkoordinasikan konsep rencana Bidang Pendidikan Dasar dengan Kecamatan agar pelaksanaan tugas dapat terjalin harmonis;

- e. Menyelia pelaksanaan tugas kepala seksi agar hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- f. Menilai prestasi kerja kepala seksi dilingkungan bidang Pendidikan Dasar sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- g. Menyusun proyeksi perkembangan pembinaan pendidikan dasar sebagai bahan penyusunan kebijakan ;
- h. Memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan pendidikan dasar termasuk pengawas;
- i. Memeberikan layanan teknis dibidang perencanaan dan memonitor pelaksanaan pada jenjang SD/MI, SMP/MTs dan mendayagunakan program teknologi, komunikasi untuk pengelolaan data dan informasi pendidikan;
- j. Melaksanakan kegiatan administrasi umum perkantoran dan membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahannya
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3.1. Kepala Seksi Kurikulum dan Pembelajaran

Dengan Indikator Sasaran :

1. Jumlah Siswa SD dan SMP yang lulus Ujian
2. Rata-rata Nilai Ujian Siswa SD dan SMP
3. Jumlah Guru yang berkualifikasi S1/D4
4. Jumlah Guru yang lulus diklat calon Kepala Sekolah dan diklat calon Pengawas
5. Jumlah Guru yang memiliki sertifikat pendidik profesional

Kepala Seksi Kurikulum dan Pembelajaran mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja seksi kurikulum pendidikan dasar sesuai dengan kebijakan dinas
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;

- c. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- d. memantau dan mengevaluasi satuan pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sederajat;
- e. menyiapkan bahan dalam penyusunan kurikulum, petunjuk pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan dasar
- f. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kurikulum, petunjuk teknis dan pengelolaan pendidikan dasar.
- g. memantau, mengendalikan dan menilai pelaksanaan PMB dan manajemen sekolah;
- h. melaksanakan persiapan sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan ditingkat Kabupaten, pengkoordinasian dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar;
- i. melaksanakan motivasi pendidikan dasar dan pengembangan potensi murid pendidikan dasar, dan melakukan pembinaan wajib belajar pendidikan dasar.
- j. mengusul bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dasar, dan pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan dasar.
- k. melakukan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.2. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasaran :

Dengan Indikator sasaran :

- 1. Jumlah gedung sekolah SD yang direhab
- 2. Jumlah gedung sekolah SMP yang direhab
- 3. Jumlah Sekolah SD yang mendapatkan bantuan Meubelair
- 4. Jumlah Sekolah SMP yang mendapatkan bantuan Meubelair

Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana prasarana mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja seksi sarana prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
- c. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;

- d. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional; sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. melakukan pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan dasar
- f. melakukan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan serta melakukan peantauan perkembangan kebutuhan sarana dan prasarana.
- g. mengecek penggunaan buku pelajaran pendidikan dasar;
- h. mengusulkan dan mengkoordinasikan pengadaan sarana dan prasarana bidang pendidikan dasar serta melakukan koordinasi dengan unit satuan organisasi dalam meningkatkan sarana dan prasarana di bidang pendidikan;
- i. menyusun laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- j. melakukan monitoring dan evaluasi serta pengendalian hasil program kerja.
- k. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3.3. Kepala Seksi Kesiswaan :

Dengan Indikator sasaran :

1. Jumlah Siswa SD yang mendapatkan beasiswa miskin
2. Jumlah SD yang mendapatkan bantuan operasional sekolah
3. Jumlah Siswa SMP yang mendapatkan beasiswa miskin
4. Jumlah SMP yang mendapatkan bantuan operasional sekolah
5. Jumlah Siswa SD dan SMP yang putus sekolah
6. Jumlah Siswa SD yang melanjutkan ke SMP
7. Jumlah Siswa SMP yang melanjutkan ke SMA/SMK
8. Jumlah Siswa yang mendapat medali olimpiade mata pelajaran jenjang SD dan SMP

Kepala Seksi Kesiswaan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja seksi sarana prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
- c. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;

- d. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional; sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. melakukan pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan dasar
- f. melakukan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan serta melakukan peantauan perkembangan kebutuhan sarana dan prasarana.
- g. mengecek penggunaan buku pelajaran pendidikan dasar;
- h. mengusulkan dan mengkoordinasikan pengadaan sarana dan prasarana bidang pendidikan dasar serta melakukan koordinasi dengan unit satuan organisasi dalam meningkatkan sarana dan prasarana di bidang pendidikan;
- i. menyusun laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- j. melakukan monitoring dan evaluasi serta pengendalian hasil program kerja.
- k. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Kepala Bidang Pendidikan Menengah :

Mempunyai Sasaran :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan Menengah

Dengan Indikator Sasaran :

1. APK SMA/SMK/MA
2. APM SMA/SMK/MA
3. Angka Putus Sekolah (DO)
4. Angka Kelulusan SMA/SMK/MA
5. Rata-rata Nilai UN SMA/SMK/MA
6. Persentase Perolehan medali olimpiade mata pelajaran jenjang SMA/SMK/MA
7. Persentase guru yang berkualifikasi S1/D4 jenjang SMA/SMK
8. Persentase peningkatan kompetensi tenaga pendidik jenjang SMA/SMK

Kepala Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas :

- a. Merencanakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- b. Menyusun rencana dan program kerja bidang Pendidikan Menengah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyelenggarakan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;

- d. Mengkoordinasikan konsep rencana pada kepala seksi dalam melaksanakan tugas;
- e. Menilai prestasi kerja kepala seksi di lingkungan bidang Pendidikan Menengah (SMP/MTs, SMA/MA dan SMK) sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- f. Menyusun proyeksi perkembangan pembinaan pendidikan menengah (SMP/MTs, SMA/MA dan SMK) sebagai bahan penyusunan kebijakan;
- g. Memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan pendidikan menengah kejuruan termasuk pengawas;
- h. Memberikan layanan teknis di bidang perencanaan dan memonitoring pelaksanaan pada SMU dan SMK, serta mendayagunakan program teknologi, komunikasi untuk pengelolaan data dan informasi Pendidikan Menengah (SMP/MTs, SMA/MA dan SMK);
- i. Mengusulkan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan menengah serta biaya penjaminan mutu satuan pendidikan menengah;
- j. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan;

4.1.Kepala Seksi Kurikulum dan Pembelajaran :

Dengan indikator sasaran :

1. Jumlah Siswa SMA/SMK yang lulus Ujian
2. Rata-rata Nilai Ujian Siswa SMA/SMK
3. Jumlah Guru yang Berkualifikasi S1/DIV
4. Jumlah Guru yang lulus diklat calon kepala sekolah dan diklat calon pengawas
5. Jumlah Guru yang memiliki sertifikasi pendidik Profesional

Kepala Seksi Kurikulum dan Pembelajaran mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja seksi kurikulum pendidikan Menengah sesuai dengan kebijakan dinas
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;

- c. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- d. melaksanakan sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kabupaten;
- e. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi serta supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan menengah dan kejuruan, kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan menengah dan kejuruan, implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan menengah (SMP/MTs, SMA/MA dan SMK), implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan menengah (SMP/MTs, SMA/MA dan SMK);
- f. mengusulkan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan menengah dan kejuruan, dan pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan menengah (SMP/MTs, SMA/MA dan SMK).
- g. memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan dan menilai pelaksanaan PMB dan manajemen dan kejuruan;
- h. menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan pendidikan menengah dan kejuruan;
- i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pendidikan menengah (SMP/MTs, SMA/MA dan SMK).
- j. menyusun laporan, seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- k. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.2. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja seksi sarana prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
- c. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;

- d. melakukan pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan menengah (SMP/MTs, SMA/MA dan SMK).
- e. melakukan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan menengah dan kejuruan
- f. mengusulkan dan merekomendasikan pengadaan sarana dan prasarana bidang pendidikan menengah (SMP/MTs, SMA/MA dan SMK)
- g. menyusun laporan seksi sarana dan prasarana sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- h. melakukan pengawasan terhadap penentuan standar nasional sarana prasarana pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan
- k. memantau perkembangan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4.2. Kepala Seksi Kesiswaan :

Dengan Indikator Sasaran :

- 1. Jumlah Siswa SMA/SMK yang mendapatkan beasiswa miskin
- 2. Jumlah SMA/SMK yang mendapatkan bantuan operasional sekolah
- 3. Jumlah SMA/SMK yang putus sekolah
- 4. Jumlah Siswa yang mendapat medali olimpiade mata pelajaran jenjang SMA/SMK

Kepala Seksi Kesiswaan mempunyai Tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja seksi sarana prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
- c. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- d. melakukan pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan menengah (SMP/MTs, SMA/MA dan SMK).
- e. melakukan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan menengah dan kejuruan

- f. mengusulkan dan merekomendasikan pengadaan sarana dan prasarana bidang pendidikan menengah (SMP/MTs, SMA/MA dan SMK)
- g. menyusun laporan seksi sarana dan prasarana sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- h. melakukan pengawasan terhadap penentuan standar nasional sarana prasarana pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan
- k. memantau perkembangan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Kepala Bidang Non Formal dan Informal :

Dengan Sasaran :

- 1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal

Indikator Sasaran :

- 1. APK PAUD
- 2. Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan yang terdaftar
- 3. Angka Melek huruf
- 4. Persentase PAUD yang berprestasi
- 5. Persentase guru yang berkualifikasi S1/DIV jenjang PAUD
- 6. Persentase Peningkatan kompetensi tenaga pendidik PAUD

Kepala Bidang Non Formal dan Informal mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja di bidang Pendidikan Non Formal dan Informal sesuai dengan kebijakan Dinas;
- b. Merencanakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- c. Melaksanakan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;

- d. Menyusun rencana dan program kerja di bidang Pendidikan Non Formal dan Informal termasuk merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan kegiatan kepenilikan pendidikan Non Formal dan Informal ;
- e. Mengkoordinasikan konsep rencana pada kepala seksi dalam melaksanakan tugas;
- f. Memberikan petunjuk, bimbingan dan kepada kepala seksi agar hasil pelaksanaan tugas tercapai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- g. Menilai prestasi kerja kepala seksi di lingkungan bidang Pendidikan Non Formal dan Informal sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir ;
- h. Menelaah peraturan perundang-undangan Pendidikan Non Formal dan Informal ;
- i. Memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan Pendidikan Non Formal dan Informal ;
- j. Memberi layanan teknis di bidang perencanaan pada pendidikan Non Formal dan Informal ;
- k. Mendayagunakan program teknologi, komunikasi untuk pengelolaan data dan informasi pendidikan Non Formal dan Informal ;
- l. Melaksanakan kegiatan administrasi bidang pendidikan Non Formal dan Informal ;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahannya;
- n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

5.1. Kepala Seksi Dikmas :

Dengan Indikator sasaran :

- 1. Jumlah Peserta yang terlibat jambore PTK PNF
- 2. Jumlah Peserta Hari Aksara Internasional

Kepala Seksi Dikmas mempunyai Tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja seksi Pendidikan Masyarakat sesuai dengan kebijakan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;

- c. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- d. menyusun rencana program kesetaraan paket A, paket B, dan paket C dan keaksaraan fungsional (KF) dan Life skill;
- e. melaksanakan pengawasan, pembinaan serta pengendalian lembaga-lembaga kursus atau lembaga yang disamakan;
- f. melaksanakan petunjuk teknis organisasi dan kegiatan Pendidikan Masyarakat mengkoordinasikan dengan instansi terkait organisasi masyarakat dalam rangka Pendidikan Masyarakat
- g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan karir tenaga teknis pendidikan masyarakat;
- h. menyusun laporan seksi pendidikan masyarakat sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan masyarakat dan kelembagaan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5.1. Kepala Seksi PAUD :

Dengan Indikator sasaran :

- 1. Jumlah Lembaga PAUD yang Menerima BOP
- 2. Jumlah Gedung PAUD yang dibangun
- 3. Jumlah Sekolah yang mendapat bantuan sarana-prasarana pendidikan
- 4. Jumlah gedung TK yang direhab
- 5. Jumlah Lembaga PAUD yang berprestasi di tingkat propinsi atau nasional
- 6. Jumlah guru PAUD yang berkualifikasi S1/DIV
- 7. Jumlah Guru TK yang bersertifikat profesional

Kepala Seksi PAUD mempunyai Tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja seksi PAUD sesuai dengan kebijakan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas

- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
- c. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- d. menyusun rencana program PAUD
- e. melaksanakan pengawasan, pembinaan serta pengendalian PAUD;
- f. melaksanakan petunjuk teknis organisasi dan kegiatan PAUD mengkoordinasikan dengan instansi terkait organisasi masyarakat dalam rangka Pendidikan Masyarakat
- g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan karir tenaga teknis pendidikan masyarakat;
- h. menyusun laporan seksi pendidikan masyarakat sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan masyarakat dan kelembagaan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5.1. Kepala Seksi Bina Kursus :

Dengan Indikator sasaran :

- 1. Jumlah Lembaga Kursus yang terdaftar
- 2. Jumlah Kursus dan Pelatihan yang dilaksanakan

Kepala Seksi Dikmas mempunyai Tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja seksi Bina Kursus sesuai dengan kebijakan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
- c. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- d. menyusun rencana program Bina Kursus
- e. melaksanakan pengawasan, pembinaan serta pengendalian lembaga-lembaga kursus atau lembaga yang disamakan;

- f. melaksanakan petunjuk teknis organisasi dan kegiatan Bina Kursus mengkoordinasikan dengan instansi terkait organisasi masyarakat dalam rangka Pendidikan Masyarakat
- g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan karir tenaga teknis pendidikan masyarakat;
- h. menyusun laporan seksi Bina Kursus sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan masyarakat dan kelembagaan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5.2.UPT SKB :

Indikator sasaran :

- 1. Jumlah SKB yang dikelola
- 2. Jumlah Peserta yang lulus diklat
 - a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) berdasarkan program di bidang Pendidikan Non Formal dan InFormal
 - b. melaksanakan program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan pendidikan Non Formal (PTK-PNS) PAUD;
 - c. menyelenggarakan program penguatan kelembagaan sanggar kegiatan belajar (SKB);
 - d. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka koordinasi tugas-tugas yang berkaitan dengan sanggar kegiatan belajar (SKB), serta mencari alternatif pemecahannya;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada seksi sanggar kegiatan belajar (SKB) serta mencari alternatif pemecahannya;
 - f. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

- h. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karir;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan
- k. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

6. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga :

Dengan sasaran :

- 1. Persentase Kelompok Pemuda yang Aktif
- 2. Persentase Keterlibatan Pelajar dalam kegiatan keolahragaan
- 3. Tingkat Pemuda yang berprestasi
- 4. Persentase Perolehan medali di Tingkat Provinsi
- 5. Persentase Perolehan medali di Tingkat Nasional
- 6. Persentase Peningkatan sarana prasarana olahraga

Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Bidang Pemuda dan Olahraga berdasarkan kebijakan Dinas;
- b. Menyusun proyeksi perkembangan pembinaan pendidikan, pemuda olahraga sebagai bahan penyusunan kebijakan dibidang kepemudaan dan olahraga;
- c. menumbuh kembangkan pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan pendidikan dibidang Pemuda dan Olahraga;
- d. Memberikan layanan teknis dibidang keolahragaan pada tingkat SD,SDLB,SLB,SLTP,SMU dan SMK, serta pendidikan luar sekolah;
- e. Mendayagunakan program teknologi, komunikasi untuk pengelolaan data dan informasi bidang Pemuda dan Olahraga serta melakukan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan dan olahraga;

- f. Melaksanakan, mengkoordinasikan dan/atau melakukan pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif;
- g. Melakukan pembinaan, pengawasan monitoring dan evaluasi pelaksanaan aktivitas kepemudaan dan olahraga serta menginventarisir dan memberikan dukungan terhadap aktifitas kepemudaan;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Pemuda dan Olahraga, serta mencari alternatif pemecahannya;
- i. Mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
- j. Memeberi petunjuk kepada Kepala Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- k. Menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

6.1. Kepala Seksi Pemberdayaan pemuda:

Indikator Sasaran :

1. Jumlah Pelaksanaan seleksi Paskibraka
2. Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Kepemudaan
3. Jumlah Fasilitasi pertukaran pemuda antar provinsi
4. Jumlah Fasilitasi Jambore pemuda daerah
5. Jumlah Pelaksanaan Napak Tilas Jejak Pahlawan
6. Jumlah Pelajar yang mengikuti Porjar

Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai Tugas :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi kepemudaan berdasarkan kebijakan di bidang Pemuda dan Olahraga;

- b. menyusun juklak dan melaksanakan pemberdayaan pemuda;
- c. menyiapkan bahan pembinaan terhadap Pertukaran pemuda Antar Propinsi (PPAP) maupun antar Negara;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan pelatihan Kepemimpinan Pemuda dan Pengurus OSIS SLTP/SLTA;
- e. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan seleksi dan pembinaan terhadap Pemuda Pelopor/produktif;
- f. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan seleksi kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA);
- g. menyiapkan bahan pembinaan terhadap sekolah yang mengikuti kegiatan lomba Wawasan Wiyata Mandala;
- h. melaksanakan pengawasan dan pembinaan organisasi dan kegiatan kepemudaan serta melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier tenaga teknis kepemudaan;
- i. mengkoordinasikan dengan instansi terkait, organisasi masyarakat dalam rangka pembinaan kegiatan kepemudaan;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Kepemudaan serta mencari alternatif pemecahannya;
- k. membagi tugas pada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku ;
- m. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- n. memberikan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan ;
- o. melaporkan nhasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

6.2. Kepala Seksi Pemberdayaan Olahraga:

Dengan Indikator Sasaran :

1. Jumlah Pelatih Olahraga yang memiliki kompetensi dibidangnya
2. Jumlah Tenaga Teknis Olahraga yang mengikuti pelatihan di bidang olahraga
3. Jumlah Kegiatan Lomba Olahraga yang dilaksanakan
4. Jumlah perolehan medali di tingkat provinsi
5. Jumlah perolehan medali di tingkat nasional

Kepala Seksi Pemberdayaan Olahraga mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Olahraga berdasarkan kebijakan di bidang Pemuda dan Olahraga;
- b. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan seleksi dan melaksanakan kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL)
- c. menyiapkan bahan pembinaan terhadap Pemuda Penggerak Organisasi Olahraga di Pedesaan;
- d. menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan olahraga di sekolah dan diluar sekolah;
- e. menyiapkan fasilitas pembinaan, sarana dan prasarana olahraga disekolah dan luar sekolah;
- f. melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dan organisasi masyarakat dalam mengembangkan kegiatan olahraga;
- g. mengusulkan dan merekomendasikan pengadaan beasiswa dalam bidang olahraga bagi yang berprestasi dan pedoman-pedoman lainnya yang berkaitan dengan bidang olahraga;
- h. menyiapkan fasilitas dan mengembangkan pelaksanaan kegiatan kesegaran jasmani, rekreasi dan olahraga tradisional, menyelenggarakan pekan dan kejuaraan olahraga serta fasilitasi pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
- i. melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan keolahragaan;
- j. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka kegiatan lomba-lomba olahraga pelajar dan masyarakat;

- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di seksi Olahraga, serta mencari alternatif pemecahannya;
- l. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- n. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

6.3. Kepala Seksi Sarana dan Tenaga Teknis:

Dengan Indikator Sasaran :

- 1. Jumlah Gelanggang Olahraga
- 2. Jumlah Cabang Olahraga yang memiliki fasilitas layak dan memadai

Kepala Seksi Sarana dan Tenaga Teknis mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Olahraga berdasarkan kebijakan di bidang Pemuda dan Olahraga;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana olahraga untuk pelaksanaan kegiatan keolahragaan
- c. menyiapkan Tenaga teknis di bidang keolahragaan dalam rangka mengikuti lomba-lomba olahraga di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional
- d. menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan olahraga di sekolah dan diluar sekolah;
- e. menyiapkan fasilitas pembinaan, sarana dan prasarana olahraga disekolah dan luar sekolah;
- f. melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dan organisasi masyarakat dalam mengembangkan kegiatan olahraga;

- g. mengusulkan dan merekomendasikan pengadaan beasiswa dalam bidang olahraga bagi yang berprestasi dan pedoman-pedoman lainnya yang berkaitan dengan bidang olahraga;
- h. menyiapkan fasilitas dan mengembangkan pelaksanaan kegiatan kesegaran jasmani, rekreasi dan olahraga tradisional, menyelenggarakan pekan dan kejuaraan olahraga serta fasilitasi pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
- i. melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan keolahragaan;
- j. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka kegiatan lomba-lomba olahraga pelajar dan masyarakat;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di seksi Olahraga, serta mencari alternatif pemecahannya;
- l. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- n. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

7. Kepala Bidang Pariwisata :

Dengan sasaran adalah : Meningkatnya Kunjungan Wisata

Indikator sasaran :

1. Jumlah pelaksanaan kegiatan promosi pariwisata
2. Persentase tingkat kunjungan wisata
3. Persentase daerah tujuan wisata yang terpelihara

4. Persentase daerah tujuan wisata baru yang dikembangkan

Kepala Bidang Pariwisata mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Bidang Pariwisata berdasarkan kebijakan Dinas;
- b. Menyusun kebijakan operasional bidang Pariwisata sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah yang perlu diambil dalam tugas Pariwisata;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di bidang Pariwisata, serta mencari alternatif pemecahannya;
- e. Mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
- f. Memberi petunjuk kepada Kepala seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- g. Menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

7.1. Kepala Seksi Pengembangan Pariwisata

Dengan Indikator Sasaran :

1. Jumlah Sarana Prasarana Pariwisata
2. Jumlah daerah tujuan wisata yang tertata
3. Jumlah daerah tujuan wisata baru yang dikembangkan

Kepala Seksi Pengembangan Pariwisata mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Pariwisata berdasarkan kebijakan di bidang Pariwisata ;

- b. menyusun rencana Pengembangan bidang Pariwisata baik jangka panjang, menengah maupun jangka pendek ;
- c. menyusun program kerja bidang Pariwisata sesuai dengan calendar of event baik yang berskala lokal, Propinsi maupun Nasional ;
- d. menyusun rencana dalam rangka pelaksanaan pengembangan sarana dan tenaga kerja pariwisata ;
- e. menyiapkan bahan-bahan dan melaksanakan pendataan dan penagihan pajak hotel, pajak restoran sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan kegiatan, penataan dan pengembangan obyek-obyek wisata/daya tarik wisata;
- g. melaksanakan kegiatan penataan dan pengembangan atraksi wisata;
- h. menyiapkan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan akomodasi hotel, rumah makan beserta tenaga kerjanya;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di seksi Pengembangan Pariwisata, serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- l. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

7.2. Kepala Seksi Kerjasama dan Promosi Pariwisata

Dengan Indikator Sasaran :

1. Jumlah Kunjungan Wisata

2. Jumlah Kegiatan Promosi Pariwisata yang dilaksanakan

Kepala Seksi Kerjasama dan Promosi Pariwisata mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kerjasama dan Promosi Pariwisata berdasarkan kebijakan dibidang pariwisata;
- b. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka kegiatan promosi produk wisata baik yang berskala lokal, nasional maupun internasional;
- c. melaksanakan hubungan kerjasama antar media dan atau lembaga informasi baik elektronik maupun media cetak dalam promosi pariwisata;
- d. melaksanakan hubungan kerjasama dengan mitra kerja pariwisata;
- e. mengadakan kerjasama dengan komponen pariwisata khususnya dibidang pemasaran;
- f. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Kerjasama dan Promosi Pariwisata, serta mencari alternatif pemecahannya;
- g. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- i. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- j. melaksanakan tugas kedinas yang diberikan oleh atasan;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan.

7.3. Kepala Seksi Pengendalian Obyek dan Usaha Pariwisata

Dengan Indikator Sasaran :

1. Jumlah Usaha Akomodasi Pariwisata yang terdaftar

Kepala Seksi Pengendalian Obyek dan Usaha Pariwisata mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kerjasama dan Promosi Pariwisata berdasarkan kebijakan dibidang pariwisata;

- b. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka kegiatan pengendalian obyek dan usaha pariwisata baik yang berskala lokal, nasional maupun internasional;
- c. melaksanakan hubungan kerjasama antar media dan atau lembaga informasi baik elektronik maupun media cetak dalam promosi pariwisata;
- d. melaksanakan hubungan kerjasama dengan mitra kerja pariwisata;
- e. mengadakan kerjasama dengan komponen pariwisata khususnya dibidang pemasaran;
- f. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Kerjasama dan Promosi Pariwisata, serta mencari alternatif pemecahannya;
- g. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- i. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- j. melaksanakan tugas kedinas yang diberikan oleh atasan;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan.

8. Kepala Bidang Kebudayaan

Dengan Sasaran : Meningkatkan Pengembangan Budaya Daerah

Indikator Sasaran :

1. Persentase sekaa kesenian yang aktif
2. Persentase lembaga adat yang mendapat pembinaan
3. Persentase siswa yang mengikuti kemah budaya
4. Jumlah Museum yang dipelihara dan dilestarikan

Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Bidang Kebudayaan berdasarkan kebijakan Dinas;

- b. Menggali, melestarikan membina dan mengembangkan seni budaya, bahasa, aksara dan sastra Bali;
- c. Melestarikan, membina, dan memberdayakan lembaga-lembaga adat dan nilai-nilai tradisional;
- d. Melaksanakan pemeliharaan dan perlindungan benda-benda budaya, benda-benda sejarah dan kepurbakalaan;
- e. Menyusun bahan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan pemeliharaan, pengembangan dan pengelolaan museum, pengembangan nilai-nilai budaya termasuk budaya spiritual, antara lain penelitian, pengkajian sejarah dan nilai tradisional, penulisan, pemahaman dan perluasan informasi;
- f. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana dan program pemeliharaan, pembinaan, pelestarian suaka peninggalan sejarah dan kepurbakalaan;
- g. Menyusun bahan bimbingan dan pembinaan pelestarian budaya daerah dan cagar benda budaya;
- h. Menyusun bahan perencanaan dan program penggalian dan pelestarian kesenian tradisional dan rencana dan program penyelamatan, pengamatan, pemeliharaan, pemugaran, penggalian dan penelitian benda cagar budaya;
- i. Menyusun bahan bimbingan dan pembinaan kreatifitas karya-karya seni modern/kontemporer;
- j. Menyusun bahan perencanaan dan program sarana dan pertunjukan kesenian;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di bidang kebudayaan, serta mencari alternatif pemecahannya;
- l. Mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
- m. Memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- n. Menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karir;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;

8.1. Kepala Seksi Pelestarian Warisan Purbakala

Dengan Indikator Sasaran :

1. Jumlah Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dipelihara

Kepala Seksi Pelestarian Warisan Purbakala mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelestarian Seni Budaya berdasarkan kebijakan di Bidang Kebudayaan;
- b. mendata, menggali, mendokumentasikan dan mengadakan penulisan Benda-benda Cagar Budaya (BCB), tempat-tempat ibadah dan kesenian-kesenian sakral;
- c. menyiapkan bahan pembinaan, evaluasi dan pemberdayaan lembaga-lembaga adat seperti subak, subak abian, desa pekraman, sekehe teruna dan sekehe-sekehe pesantian ;
- d. menyiapkan bahan pembinaan, pemberdayaan musium, sejarah dan kepurbakalaan serta pelaksanaan kemah budaya;
- e. melestarikan dan mengembangkan Bahasa dan Sastra Indonesia atau Sastra Daerah dan Aksara Bali serta Utsawa Dharma Gita;
- f. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Pelestarian Seni Budaya serta mencari alternatif pemecahannya;
- g. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- i. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;

8.2. Kepala Seksi Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya

Dengan Indikator Sasaran :

1. Jumlah Penyelenggaraan Festival seni dan budaya
2. Jumlah sekaa kesenian yang terlibat dalam festival seni dan budaya
3. Jumlah sekaa yang meraih juara lomba bidang seni di tingkat provinsi

Kepala Seksi Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Seni Budaya berdasarkan kebijakan di Bidang Kebudayaan;
- b. mendata, menggali seluruh cabang kesenian baik kesenian khas Jembrana, kesenian langka , kesenian sakral (wali dan bebali) dan kesenian provan (balih-balihan);
- c. menyiapkan sarana dan prasarana parade dan lomba seni budaya tingkat Kabupaten, Propinsi, Nasional dan Internasional;
- d. menyiapkan bahan-bahan pembinaan untuk kegiatan Lomba Seni Musik dan Seni Modern;
- e. menyusun rencana kegiatan dalam rangka pelestarian dan pengembangan seni tradisional dan tata busana tradisional Bali;
- f. menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan pengembangan budi pekerti bagi para remaja;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Pengembangan Seni Budaya, serta mencari alternatif pemecahannya;
- h. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. mmeberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- j. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

8.3. Kepala Seksi Adat Istiadat Subak dan Tradisi

Dengan Indikator Sasaran :

- 1. Jumlah Lembaga Adat yang dibina
- 2. Jumlah Peserta Utsawa Dharma Gita
- 3. Jumlah Siswa yang mengikuti Kemah Budaya

Kepala Seksi Adat Istiadat Subak dan Tradisi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Seni Budaya berdasarkan kebijakan di Bidang Kebudayaan;
- b. mendata, menggali seluruh cabang kesenian baik kesenian khas Jembrana, kesenian langka , kesenian sakral (wali dan bebali) dan kesenian provan (balih-balihan);
- c. menyiapkan sarana dan prasarana parade dan lomba seni budaya tingkat Kabupaten, Propinsi, Nasional dan Internasional;
- d. menyiapkan bahan-bahan pembinaan untuk kegiatan Lomba Seni Musik dan Seni Modern;
- e. menyusun rencana kegiatan dalam rangka pelestarian dan pengembangan seni tradisional dan tata busana tradisional Bali;
- f. menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan pengembangan budi pekerti bagi para remaja;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Pengembangan Seni Budaya, serta mencari alternatif pemecahannya;
- h. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. mmeberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

- j. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2.1.7. Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yang meliputi :

- a. identifikasi permasalahan;
- b. perumusan alternatif kebijakan perencanaan bidang Pendidikan;
- c. pengkajian alternatif;
- d. penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan;
- e. analisis pengendalian pelaksanaan Pendidikan;
- f. penilaian hasil pelaksanaan;
- g. membuat karya tulis / karya ilmiah di bidang perencanaan bidang Pendidikan;
- h. melakukan kegiatan pengembangan dalam bidang Perencanaan Pendidikan
- i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada Kepala Dinas.

2.2. Sumber Daya SKPD

a. Keadaan Pegawai

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana (tidak termasuk guru, pengawas, penilik dan pamong belajar) sampai dengan Bulan Desember 2015 sebanyak : 73 orang. Jumlah tersebut meliputi tenaga administrasi yang tersebar pada: Sekretariat yang meliputi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagaian Keuangan dan Sub Bagian Program, Bidang PNFI, Bidang Dikdas, Bidang Dikmen Bidang Pemuda dan Olahraga, Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Tabel 1.1
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Jumlah
1.	Golongan I	-
2.	Golongan II	16
3.	Golongan III	48
4.	Golongan IV	9
Jumlah		73

Sumber: Dinas Dikporaparbud KabupatenJembrana

Sedangkan jumlah tenaga pendidik yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana sebanyak 3.759 orang. Dilihat dari status kepegawaiannya sebanyak 38,99% dari jumlah tersebut merupakan tenaga pendidik (guru) non PNS. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Tenaga Pendidik Pada Setiap Satuan Pendidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenjang	Kualifikasi Pendidikan							Total
		SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
1	TK	-	-	-	-	366	9	-	375
2	SD	14	-	59	-	1.463	81	-	1.617
3	SLB	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SMP	9	-	29	-	773	74	-	885
5	SMA	1	-	11	-	444	64	-	520
6	SMK	7	-	10	-	322	23	-	362
Total		31	-	109	-	3.368	251	-	3.759

Sumber: Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana

Tabel:1.3
Jumlah Guru Menurut Jenjang dan Status Kepegawaian

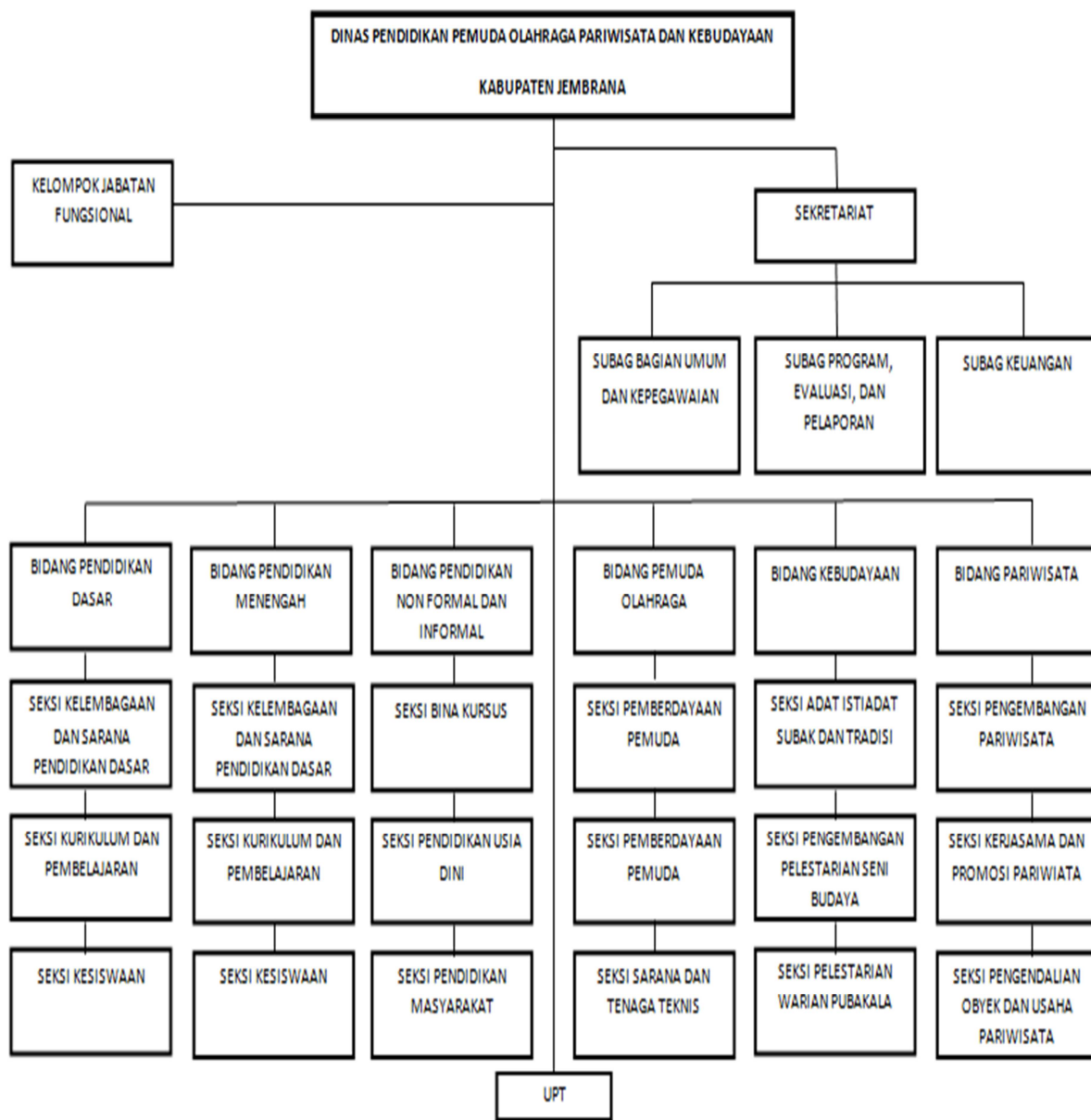
No	Jenjang	Status PNS dan NON PNS		Total
		PNS	NON PNS	
1	TK	117	258	375
2	SD	1.181	436	1.617
3	SLB	-	-	-
4	SMP	551	334	885
5	SMA	266	254	520
6	SMK	178	184	362
	Total	2.293	1.466	3.759

Sumber: Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Dikporaparbud, Berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 46 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 143) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Nomor 615); maka disusun struktur organisasi dan mekanisme kerja sebagaimana bagan dibawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS DIKPORAPARBUD BERDASARKAN PERDA NO. 15 TAHUN 2011

Tabel 1.4



2.3 Kinerja Pelayanan

a. Urusan Pendidikan

a.1 Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini (PAUD) mempunyai peranan yang sangat penting untuk mendorong tumbuh kembang anak Indonesia secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan SD/MI secara lebih baik. Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah dan masyarakat untuk memperluas dan meningkatkan mutu penyelenggaraan PAUD. Upaya penyediaan layanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah menunjukkan peningkatan. Angka partisipasi kasar (APK) pada kelompok usia ini telah meningkat dari 45,55 pada tahun 2011 menjadi 52,34 pada tahun 2014.

Tabel 2.2
Capaian Pendidikan Anak Usia Dini 2012 - 2014

No	Indikator kinerja	2012	2013	2014	2015
1	APK (%)	35,71	43,20	45,78	60,52

a.2 Pendidikan Dasar

Dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pendidikan dasar, pemerintah Kabupaten Jember telah melakukan berbagai upaya terus meningkatkan partisipasi pendidikan sekaligus menurunkan kesenjangan taraf pendidikan antar kelompok masyarakat. APK jenjang SD/MI terus mengalami peningkatan dan penurunan dari 113,94% pada tahun 2011 menjadi 107,65% pada tahun 2015. Pada periode yang sama angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 98,43% pada tahun 2011 dan 97,78%. Selanjutnya pada jenjang SMP/MTs sederajat, APK juga mengalami peningkatan dari 116,98% pada tahun 2011 menjadi 133,26% pada tahun 2015. Seperti terlihat pada tabel 2.3.

Tabel. 1.3
Capaian Pendidikan Dasar Tahun 2011 – 2015

No.	Indikator Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015
1	APK SD/MI	113,94	113,95	108,75	106,46	107,65
2	Angka Partisipasi Murni SD/MI	98,43	98,71	96,28	93,09	97,78
3	Rasio Guru SD/MI terhadap siswa	1:18	1:18	1:18	1:18	1:17
4	Guru SD/MI S1/D4	1.423	1.385	1.391	1.483	1.617
5	APK SMP/MTs	116,98	117,01	119,85	128,83	133,26
6	APM SMP/MTs	93,85	93,97	99,12	98,74	100
7	Rasio Guru SMP/MTs terhadap Siswa	1:15	1:15	1:15	1:15	1:16
8	Guru SMP/MTs S1/D4	818	811	884	688	885
9	Proporsi Lulusan SD/MI	100	100	100	100	100
10	Proporsi Lulusan SMP/MTs	100	100	99,98	100	100

Bila dilihat capaian APK SD/MI dan SMP/MTs dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Bali Kabupaten Jembrana masih relatif lebih tinggi, bahkan melebihi dari target Nasional. Sementara itu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak terlepas dari peran strategis guru. Untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, maka ketersediaan pendidik yang berkualitas dan dalam jumlah mencukupi, serta distribusi yang merata merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi. Pada jenjang SD secara nasional rasio guru terhadap siswa di Kabupaten Jembrana telah sangat baik yaitu : 18 siswa per guru, sedangkan pada jenjang SMP/MTs adalah secara nasional sudah mendekati baik yaitu mencapai 16 siswa per guru. Sementara itu proporsi guru SD/MI dan SMP/MTs yang telah memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 dan sertifikasi juga menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun.

a.3 Pendidikan Menengah

APK SMA/SMK/MA mengalami peningkatan dari 98,07 pada tahun 2011 menjadi 114,75 pada tahun 2014 (lihat Tabel 1.4). Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja di bidang pendidikan menengah cukup baik bahkan melewati standar nasional.

Tabel 2.4
Capaian Pendidikan Menengah Tahun 2011 - 2015

No	Indikator Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015
1	APK (%)	98,07	98,21	98,71	114,75	115,00
2	APM (%)	74,96	86,03	89,10	82,87	80,19
3	Rasio Guru SMA/MA terhadap siswa	1:21	1:13	1:13	1:13	1:13
4	Rasio Guru SMK/MAK terhadap siswa	1:13	1:13	1:13	1:13	1:13
5	Guru SMA/MA Berkualifikasi S1/D4	706	726	720	565	766
6	Proporsi Lulusan SMA/SMK	100	100	100	99,96	100

Melihat tabel tersebut diatas, maka tingkat capaian kinerja bidang pendidikan menengah setiap tahun (2011 – 2014) terus menunjukkan peningkatan yang cukup baik.

a.4 Pendidikan Non Formal

Angka Melek Huruf merupakan bagian dari fokus pembangunan untuk peningkatan human capital, hal ini mengingat peran sentral pendidikan baik sebagai bagian dari pemenuhan hak warga negara maupun karena daya ungkit pendidikan terhadap tujuan pembangunan yang lain seperti pembangunan dan pemerataan ekonomi dan sosial

Pendidikan Non Formal dan Informal juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, angka melek huruf 15 tahun keatas menurun dari 62,31 % pada tahun 2011 menjadi 90,39 % pada tahun 2015. Seperti dapat dilihat dalam tabel 1.5

Tabel 1.5
Capaian Pendidikan pada jalur pendidikan Nonformal Tahun 2011 – 2014

No	Indikator Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Melek Huruf	62,31	88,45	94,39	98,88	90,39

b. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Capaian Kinerja layanan umum pada urusan Kepemudaan dan Olahraga diukur dengan indikator; Jumlah Organisasi pemuda, jumlah organisasi olahraga, jumlah kegiatan kepemudaan, jumlah kegiatan olahraga, gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) dan Lapangan Olahraga

Tabel 1.6
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2011 – 2014

NO	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Klub Olahraga	5	5	5	5	5
2	Jumlah Gedung olahraga	7	7	7	7	7
3	Jumlah Organisasi Pemuda	25	22	22	22	22
4	Jumlah Organisasi Olahraga	13	26	26	26	26
5	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	8	8	8	8	8
6	Jumlah Kegiatan Olahraga	1	2	2	2	2

Dalam capaian kinerja dibidang Pemuda dan Olahraga tahun 2011 – 2015 beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung program bidang Kepemudaan dan Olahraga adalah Kegiatan Pembinaan Pemuda Pelopor, direncanakan dengan aktivitas, terbinannya pemuda melalui kegiatan kepemudaan dengan Indikator Kinerja Utama adalah jumlah pemuda putus sekolah yang dibina untuk meningkatkan peran serta kepemudaan, Meningkatkan kualitas penghayatan Napak Tilas Jejak Pahlawan, dengan meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai perjuangan khususnya napak tilas jejak perjuangan pahlawan nasional, dan Pembinaan Olahraga dilaksanakan dengan beberapa kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional dengan melibatkan atlit-atlit kabupaten jembrana
2. Kegiatan pengadaan sarana prasarana olah raga, dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana cabang olahraga di Kabupaten Jembrana dengan sasaran meningkatnya prestasi atlit pelajar di Kabupaten Jembrana.

c. Urusan Pariwisata

Capaian Kinerja layanan umum pada urusan Pariwisata diukur dengan indikator : Kunjungan wisatawan, dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.

Tabel 1.7
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2011 – 2015

NO	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kunjungan Wisata	89,474	98,859	134,093	132,170	156.247
2	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	0,012	0,012	0,012	0,012	-

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pariwisata tahun 2011 – 2015 telah dilaksanakan beberapa program dan kegiatan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Peningkatan Jaringan Kerjasama Promosi Wisata, direncanakan penyediaan Booklet berkaitan dengan penyampaian informasi pariwisata yang ada di Kabupaten Jembrana, dengan sasaran Kegiatan dalam program ini adalah meningkatnya jaringan kerjasama promosi pariwisata.
2. Kegiatan Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan, direncanakan berupa pelaksanaan lomba mekepong dengan target sebanyak 2 (dua) kali setiap tahunnya.
3. Mewujudkan Pendataan Obyek wisata Kabupaten Jembrana dengan harapan kunjungan wisata ke Kabupaten Jembrana dapat meningkat. Dalam mendukung sasaran kegiatan penataan obyek wisata maka Program yang dilaksanakan adalah Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan kegiatan yang telah dilaksanakan dan capaian kinerja adalah :

Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata sasaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata sebanyak di Kabupaten Jembrana.

d. Urusan Kebudayaan

Capaian Kinerja layanan umum pada urusan Kebudayaan diukur dengan indikator : Penyelenggaraan festival seni budaya, jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya , dan jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.

Tabel 1.8
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2011 – 2015

NO	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Penyelenggaraan festival seni budaya	8	8	22	24	24
2.	Jml sarana penyelenggaraan seni dan budaya	6	6	6	6	6
3.	Jumlah Benda, situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	47%	47%	50%	60%	60%

Untuk mendukung capaian kinerja di bidang Kebudayaan telah dilaksanakan beberapa Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Program Pengembangan Nilai Budaya, dilaksanakan melalui kegiatan :

Kegiatan Pelestarian dan aktualitas adat budaya daerah, dengan target terlaksananya kegiatan Utsawa Dharma Gita, sasaran kegiatan adalah meningkatnya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah dengan indikator kinerja utama adalah jumlah peserta yang mengikuti pemahaman etika dan moral anak-anak, remaja dan dewasa melalui utsawa dharma gita.

b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya meliputi kegiatan :

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Adat di Kabupaten Jembrana dengan Fasilitasi penyelenggaraan lomba desa pekraman, subak-subak dan sekaha teruna, sasaran kegiatan adalah meningkatnya pemberdayaan lomba-lomba adat daerah dengan indikator kinerja utama adalah jumlah organisasi adat yang mengikuti lomba-lomba adat untuk meningkatkan kualitas dan berdayanya lembaga adat.

c. Program pengelolaan keragaman Budaya

1. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah, dalam rangka pelaksanaan peringatan HUT Kota Negara di Kabupaten Jembrana Sasaran kegiatan adalah meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah dengan indikator kinerja adalah jumlah keikutsertaan sekaa kesenian dalam pelaksanaan festival budaya daerah.
2. Kegiatan Pesta Kesenian Bali (PKB) direncanakan untuk meningkatkan prestasi dalam keikutsertaan pada Pesta Kesenian Bali, sasaran kegiatan adalah meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah dengan indikator

kinerja adalah jumlah keikutsertaan sekaa kesenian dalam pelaksanaan festival budaya daerah.

2.4. Peluang, Tantangan, Kekuatan dan Kelemahan

Peluang (Opportunity)

- a. Adanya komitmen dari Pimpinan Daerah untuk meningkatkan pelayanan dibidang Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
- b. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan mengakibatkan tumbuh kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya.
- c. Adanya kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat merupakan peluang yang sangat baik dalam rangka pembangunan bidang pendidikan, pemuda olahraga pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Jembrana
- d. Perkembangan teknologi Informasi membuka peluang bagi terbentuknya akses terhadap kemungkinan memperoleh informasi guna penyempurnaan manajemen organisasi maupun pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.
- e. Adanya ketersediaan dana yang cukup oleh pemerintah daerah untuk mendukung program-program dan kegiatan bidang pendidikan, pemuda olahraga, pariwisata dan kebudayaan.

Tantangan (Threat)

- a. Adanya kepentingan politik dalam penentuan kebijakan Pendidikan.
- b. Terbatasnya Tenaga pendidik yang profesional dan kompeten dengan distribusi yang merata
- c. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan belum dikelola dengan maksimal

Kekuatan (Strengthness) :

- a. Tenaga trampil dibidang pendidikan, pemuda olahraga pariwisata dan kebudayaan telah tersedia;
- b. Sarana dan prasarana pelayanan dibidang pendidikan pemuda olahraga, pariwisata dan kebudayaan yang tersedia sudah memadai.

- c. Adanya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana.
- d. Adanya Peraturan Kepegawaian yang memberi peluang kepada pegawai untuk mengembangkan potensinya.

Kelemahan (Weakness) :

- a. belum optimalnya pemanfaatan tenaga trampil sehingga pelayanan dibidang pendidikan, pemuda olahraga, pariwisata dan kebudayaan masih dirasakan belum memadai.
- b. Sarana / prasarana yang ada belum ditunjang dengan jumlah tenaga yang memadai.
- c. Masih terbatasnya anggaran kegiatan yang dialokasikan dalam APBD.
- d. Profesionalime SDM Aparatur belum optimal.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.

Pembangunan pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011 – 2016, berdasarkan RPJMD tersebut Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana telah menyusun Renstra (Rencana Strategis) Dinas, dimana dalam perencanaan lima tahun kedepan tentunya akan diidentifikasi permasalahan yang akan dihadapi baik terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana, berdasarkan perkembangan pembangunan pendidikan kurun waktu 5 (lima) tahun, maka permasalahan yang sering terjadi terutama di bidang pendidikan dari pendidikan Anak Usia Dini sampai Pendidikan Menengah adalah Belum Optimalnya pelaksanaan PAUD nonformal dan informal terutama dalam memberikan layanan pengembangan anak usia 0 – 6 tahun serta kurangnya pendidikan orang tua dalam hal mengasuh anak (parenting education), dan masih rendahnya peran orang tua serta masyarakat dalam pengembangan program taman penitipan anak, kelompok bermain, dan satuan PAUD Sejenis. Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah masih belum memadai. Peningkatan kualitas pendidikan menengah masih terkendala oleh penyediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai, Dimana baru 85% sekolah yang baru memiliki perpustakaan, dan sementara hanya 60% sekolah yang memiliki computer. Dari sisi tenaga kependidikan, kualifikasi guru belum seluruhnya S1/D4 serta masih ada tenaga pendidik yang belum memiliki sertifikasi pendidik. Kalau dilihat dari permasalahan tersebut maka identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD adalah :

1. Ketersediaan pelayanan PAUD yang berkualitas masih terbatas
2. Kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu belum sepenuhnya dapat diwujudkan

3. Ketersediaan keterjangkauan, kualitas dan relevansi pendidikan jenjang menengah masih belum memadai
4. Pengembangan pemberdayaan masyarakat terhadap pendidikan masih belum merata dan belum sesuai dengan yang diharapkan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Dalam melaksanakan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah mengacu kepada tema pembangunan daerah, dimana telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Jembrana adalah “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Jembrana melalui Peningkatan Perekonomian dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang dilandasi semangat Kebersamaan, Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat”, dari Visi tersebut ditetapkan 5 Misi yaitu :

1. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan.
2. Meningkatkan Perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi dasar daerah dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, **pendidikan** dan sosial dasar lainnya.
4. Meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Dari Misi Kabupaten yang telah ditetapkan maka prioritas pembangunan pada Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan melaksanakan 3 (tiga) urusan Wajib dan 1 (satu) urusan pilihan. Urusan wajib dan prioritas sesuai Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2011 – 2016 urusan pendidikan adalah Misi ketiga, maka sesuai amanah tersebut maka pelaksanaan baik program dan kegiatan di bidang pendidikan harus sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan urusannya memperhatikan faktor-faktor yang menghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih antara lain :

a. Faktor-faktor penghambat :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana.
2. Kemampuan SDM, baik kuantitas dan kualitas belum memadai
3. Terbatasnya anggaran yang tersedia.

b. Faktor-faktor pendorong :

1. Adanya tupoksi dan struktur organisasi.
2. Komitmen SDM mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan skill dan ilmu pengetahuan.
3. Tersedianya Standar Operating Presedure (SOP), Juklak, Juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Kemajuan informasi dan teknologi.
5. Tersedianya sarana dan prasarana.
6. Dukungan dana.

3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga Renstra Propinsi

Renstra Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana disusun sejalan dengan Visi Kemendiknas dengan Tema “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk membentuk Insan Cerdas Komprehensif ” dan untuk mencapai visi maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan
2. Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan
3. Meningkatkan Kualitas /Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan
4. Mewujudkan Kesetaraan dalam memperoleh layanan Pendidikan
5. Menjamin Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan.

Sedangkan rencana prioritas Pembangunan Nasional Terselenggaranya Layanan Prima Pembangunan Nasional adalah : **“Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung Pemanjapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat Daerah”**. Untuk mewujudkan tema pembangunan nasional tersebut ditetapkan 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional dan tiga prioritas lainnya sebagai berikut :

- 1) Prioritas 1 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola,
- 2) Prioritas 2 : Pendidikan,
- 3) Prioritas 3 : Kesehatan,
- 4) Prioritas 4 : Penanggulangan Kemiskinan,
- 5) Prioritas 5 : Ketahanan Pangan
- 6) Prioritas 6 : Infrastruktur,
- 7) Prioritas 7 : Iklim Investasi dan Iklim Usaha,
- 8) Prioritas 8 : Energi,
- 9) Prioritas 9 : Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
- 10) Prioritas 10 : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pascakonflik
- 11) Prioritas 11 : Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi.

Prioritas lainnya meliputi :

- 1) Prioritas di Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,
- 2) Bidang Perekonomian,
- 3) Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Di samping mengacu pada rencana dan prioritas pembangunan Nasional juga mengacu pada prioritas pembangunan Daerah Propinsi Bali tahun 2011 yaitu :

- 1) Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran
- 2) Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan dan Kesehatan
- 3) Pemanjapan Ketahanan Pangan
- 4) Peningkatan Daya Saing Pertanian, Industri Kecil, Pariwisata, UMKM dan Koperasi
- 5) Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pelestarian Kebudayaan

- 6) Pemantapan Sistem Pengamanan Terpadu Berstandar Internasional dan Pengelolaan Bencana
- 7) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur
- 8) Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Urusan Pendidikan

A. Pemerataan dan Perluasan/Akses Pendidikan

Kemajuan pendidikan di kabupaten/kota Jembrana sangat menggembirakan. Pelaksanaan program pembangunan pendidikan di daerah ini telah menyebabkan semakin meratanya kesempatan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Pembangunan bidang pendidikan telah dilaksanakan secara merata hingga menjangkau seluruh pelosok pedesaan sehingga tidak ada lagi warga masyarakat Kabupaten Jembrana yang tidak mendapatkan layanan pendidikan.

Secara rinci, pembangunan di setiap jenjang pendidikan tidak sama, oleh karena itu, berturut-turut akan dijelaskan tentang keadaan tingkat SD yang terdiri dari SD dan MI dan SDLB, tingkat SMP yang terdiri dari SMP dan MTs, serta tingkat Sekolah Menengah (SM) yang terdiri dari SMA, SMK, dan MA.

1. Tingkat SD /SDLB/MI

Dalam upaya perluasan untuk memperoleh kesempatan pendidikan berbagai program rehabilitasi fisik telah dilaksanakan baik yang bersumber dari dana APBN, APBD I dan APBD II untuk merehabilitasi ruang kelas, ruang guru dan perpustakaan yang mengalami rusak berat maupun sedang. Dengan adanya rehabilitasi ini diharapkan akan tercipta suasana proses belajar mengajar yang aman nyaman dalam rangka peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SDLB/Mi di Kabupaten Jembrana.

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/Mi di Kabupaten Jembrana sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel. 3.1
Pencapaian APK/APM
SD/SDLB/MI Tahun 2012 – 2014

Tahun	APK	APM
2012	113,95	98,71
2013	108,75	96,28
2014	106,46	98,74
2015	107,65	94,78

Meskipun terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun, namun APK SD/SDLB/MI di Kabupaten Jembrana selama tiga tahun terakhir telah melampaui tingkat paripurna yakni berada di atas angka 95% yang ditetapkan secara nasional.

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2012, jumlah SD/SDLB dan MI sebanyak 195 buah, dengan rincian SD 184 buah, MI: 10 buah, SDLB: 1 buah. Jumlah siswa SD/SDLB/Mi seluruhnya adalah 30.671 dengan rincian siswa SD seluruhnya sebanyak 28.156 orang, siswa SDLB sebanyak: 55 orang dan siswa Mi sebanyak 2.460 orang. Sedangkan jumlah guru SD/SDLB/Mi pada tahun 2012 berjumlah 1.606 orang dengan rincian; PNS: 1.465 orang, Non PNS : 141 orang yang tersebar pada SD/SDLB/Mi yang ada di Kabupaten Jembrana, dengan rincian guru SD seluruhnya berjumlah 1.452 orang, guru Mi keseluruhan berjumlah 147 orang: dan SDLB berjumlah 7 orang.

Bila dilihat dari segi rasio murid : guru pada tahun 2012 mencapai rasio 19 : 1 hal ini berarti memenuhi rasio standar minimal yang ditetapkan dalam PP No. 74 tahun 2008 tentang guru. Dengan demikian rasio guru : murid untuk SD, MI telah memenuhi standar ideal yang telah ditetapkan.

Dalam upaya mendukung kelancaran proses belajar mengajar diperlukan ruang kelas yang memadai sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif. Jumlah ruang kelas yang tersedia di tahun 2014 keseluruhan berjumlah 1.219 ruang kelas dengan rincian, ruang kelas SD sebanyak 1.129 ruang, ruang kelas SDLB: 12 ruang kelas, dan sisanya ruang kelas MI sebanyak 78 ruang kelas.

Dari segi rasio murid : ruang kelas diperoleh rasio 25 : 1. Rasio ini masih di bawah rasio maksimal secara nasional yaitu 28 : 1. Bercermin dari rasio murid : ruang kelas di atas, maka tidak perlu lagi dilaksanakan penambahan ruang kelas di SD/MI. Rasio yang kecil ini tentunya harus mampu dimanfaatkan oleh guru secara optimal untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran, mengingat semakin kecil jumlah murid dalam satu kelas akan semakin memudahkan bagi guru dalam mengelola pembelajaran yang efektif dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Dari keseluruhan jumlah guru SD, MI, dan SDLB yang ada di Kabupaten Jembrana, sejak tahun 2011 hingga 2015, sebanyak 571 orang telah lulus sertifikasi, dan sisanya menunggu kuota sertifikasi tahun berikutnya. Dengan adanya sertifikasi guru ini diharapkan profesionalisme guru dalam menjalankan tugas profesinya dapat semakin meningkat sehingga *output* dan *outcome* pendidikan dapat semakin meningkat pula.

Angka rasio murid dan guru SD, MI, dan SDLB di Kabupaten Jembrana adalah 17 : 1. angka ini menunjukkan rata-rata guru SD/SDLB/MI mengajar 17 orang perkelas. Rasio ini masih di bawah standar minimal yang dipersyaratkan dalam PP No. 74 Tahun 2008 yakni minimal 20 : 1. Hal ini tidak terlepas dari suksesnya program Keluarga Berencana (KB) yang dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga masing-masing kepala keluarga berupaya menekan jumlah keturunan dalam upaya meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga.

Mengingat Proses Belajar Mengajar di SD, MI menggunakan guru kelas dan guru mata pelajaran untuk mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan dan mata pelajaran agama, maka jumlah guru yang diperlukan di SD dan MI adalah \sum rombel + 1 guru mapel pendidikan jasmani olahraga kesehatan dan 1 guru mata pelajaran agama.

Terkait dengan amanat Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Undang-Undang Guru dan Dosen serta PP No. 74 Tahun 2008 yang mewajibkan guru agar mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu, maka guru mapel agama dan penjaskesorkes yang mengajar di sekolah dengan jumlah rombel 6, dapat dioptimalkan dengan mengampu mata pelajaran sejenis di dua sekolah dalam rangka pemenuhan jam mengajar minimal 24 jam tatap muka.

Apabila penghitungan jumlah guru di SD, MI menggunakan rumus: Jumlah Guru Ideal = \sum rombel + 1 guru, maka jumlah guru SD./SDLB/MI di Kabupaten Jembrana mengalami sedikit kelebihan. Khusus untuk jumlah guru SD yang berstatus PNS periode Juni tahun 2012 ini berjumlah 1.465 orang dengan jumlah rombel sebanyak 1.266 rombel. Oleh karena itu perlu dipikirkan untuk merasionalisasi jumlah guru yang ada di SD/SDLB/ MI memenuhi katagori ideal.

Dari segi infrastruktur pendidikan untuk menampung seluruh peserta didik pada tahun 2012 ini tersedia ruang kelas SD Negeri sebanyak: 1.111 ruang, SD swasta sebanyak: 28 ruang, dan Mi sebanyak 78 ruang, dan SDLB sebanyak 12 ruang kelas. Dari segi kondisi fisik ruangan yang ada, keseluruhan ruang belajar di SD dalam keadaan baik, mengingat sudah direhabilitasi melalui kegiatan DAK tahun 2013 dan 2014 sedangkan untuk Mi sebanyak 51 dalam kondisi baik, 4 ruang dalam kondisi rusak ringan.

Buku pelajaran sangat menentukan dalam keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu pembangunan sarana fisik berupa gedung yang telah dilaksanakan selama ini harus diimbangi dengan kelengkapan sarana pendukung pembelajaran berupa buku pelajaran. Rasio murid : buku yang ada di SD, Mi di tahun 2012 mencapai rasio 0,7 di tahun 2013 mencapai rasio 0,9 sedangkan di tahun 2014 mencapai rasio 0,9. Rasio murid : buku ini diharapkan terus dapat ditingkatkan sehingga pada tahun 2015 diharapkan sudah mencapai rasio 1 : 1 buku.

Dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang efektif setiap siswa idealnya memiliki 1 buku pelajaran untuk setiap mata pelajaran. Dengan demikian perlu dipikirkan upaya-upaya untuk pengadaan buku pelajaran sehingga setiap siswa memiliki buku pelajaran. Dan dalam rangka untuk efisiensi penggunaan buku pelajaran untuk menghindari kesan tiap ganti tahun pelajaran ganti buku pelajaran, maka buku ini dipergunakan minimal selama 5 tahun. Dengan demikian pendidikan efektif dan efisien yang diprogram oleh pemerintah dapat segera terwujud.

2. Tingkat SMP (SMP dan MTs)

Perkembangan pembangunan pendidikan pada jenjang SMP/MTs di Kabupaten Jembrana telah mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Hal ini terbukti dari berbagai program unggulan yang dikembangkan di Kabupaten

Jembrana, baik yang menyangkut pembangunan fisik gedung sekolah dan bantuan beasiswa bidang pendidikan kepada siswa yang tergolong tidak mampu atau mengalami rawan putus sekolah, dan siswa yang berprestasi. Dari berbagai program inovatif yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana telah membuahkan hasil yang menggembirakan. Hal ini tercermin dari capaian angka APK dan APM bidang pendidikan yang telah mencapai katagori paripurna di atas 95%. Seperti yang terlihat dalam tabel data berikut.

Tabel. 3.2
Pencapaian APK/APM
SMP/MTs Tahun 2012 – 2014

Tahun	APK	APM
2012	117,01	93,97
2013	119,85	99,12
2014	128,83	98,74
2015	133,26	100,00

Berdasarkan hasil pendataan pada tahun 2012 jumlah siswa untuk SMP sebanyak 11.401 orang dan siswa MTs berjumlah 1.444 orang dengan jumlah guru SMP sebanyak 683 orang, dan guru MTs berjumlah 164 orang. dengan rincian 593 orang guru SMP berstatus sebagai PNS, dan 89 orang guru berstatus sebagai Non PNS, untuk MTs 80 orang guru berstatus sebagai PNS dan 84 orang guru berstatus sebagai Non PNS. Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas SMP sebanyak 395 ruang dan, ruang kelas MTs sebanyak 38 ruang yang kesemuanya dalam kondisi baik.

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2012 jumlah siswa untuk SMP sebanyak 10.471 orang dan siswa MTs berjumlah 1.381 orang dengan jumlah guru SMP sebanyak 644 orang, dan guru MTs berjumlah 171 orang dengan rincian 584 orang guru SMP berstatus sebagai PNS, dan 58 orang guru berstatus sebagai Non PNS, untuk MTs 86 orang guru berstatus sebagai PNS dan 87 orang guru berstatus sebagai Non PNS. Jumlah siswa SMP/MTs di tahun 2012 ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya di tahun 2011. Sedangkan jumlah guru SMP/Mts justru mengalami penurunan yang diakibatkan

karena ada beberapa guru yang memasuki usia pensiun. Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas SMP sebanyak 292 ruang dan, ruang kelas MTs sebanyak 48 ruang yang kesemuanya dalam kondisi baik.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2012 jumlah siswa SMP mengalami peningkatan menjadi 11.401 orang, begitupula dengan siswa MTs mengalami peningkatan menjadi 1.444 orang. Untuk guru SMP mengalami peningkatan menjadi 683 orang karena dari 2008 ada pengangkatan untuk guru SMP. Begitu juga dengan jumlah guru yang ada di MTs mengalami peningkatan menjadi 164 orang, dengan rincian 670 orang guru SMP/MTs berstatus sebagai PNS, dan 145 orang guru berstatus sebagai Non PNS.

Untuk menampung seluruh jumlah siswa, tersedia ruang kelas SMP/MTs sebanyak 340 ruang. Apabila kita kaitkan dengan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana, yang menyatakan bahwa kapasitas maksimum ruang kelas SMP/MTs adalah 32 peserta didik. Dengan demikian berarti untuk jenjang SMP masih diperlukan 16 RKB dalam upaya menuju standar yang ditetapkan dalam Permendiknas No. 24 Tahun 2007.

Bila dilihat dari segi rasio antara siswa dengan guru pada tahun 2012 adalah 659/10.000 Penduduk, rasio ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 687/10.000 Penduduk. Sedangkan rasio siswa terhadap ruang belajar/kelas tahun 2011 adalah 33. Jumlah ini pun sesungguhnya masih melebihi kapasitas maksimum yang ditetapkan dalam Permendiknas No.24 Tahun 27 tentang Standar Sarana dan Prasarana yang ditetapkan maksimal 32 siswa per kelas. Berdasarkan kondisi di atas, dalam upaya memperluas dan pemeratakan akses untuk mendapatkan pendidikan serta menuju kondisi isi ruang kelas yang ideal, maka perlu direncanakan untuk penambahan ruang kelas baru (RKB) SMP sebanyak 16 ruang kelas.

3.Tingkat SMA/SMK/MA

Mengingat capaian APK dan APM untuk Wajar Dikdas 9 Tahun telah mencapai target yang ditetapkan maka Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana terus melakukan inovasi dalam bidang

pembangunan pendidikan dengan mencanangkan Wajar 12 Tahun yang telah dituangkan dalam Perda No. 15 Tahun 2006.

Dengan dicanangkannya program Wajar 12 Tahun ini diharapkan dapat meningkatkan APK dan APM SMA/SMK serta berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Jembrana. Berdasarkan hasil pendataan di bidang pendidikan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA mengalami peningkatan seperti yang terlihat dalam tabel berikut.

Tabel. 3.3
Pencapaian APK/APM
SMA/SMK/MA Tahun 2012 – 2014

Tahun	APK	APM
2012	98,21	86,03
2013	98,71	89,10
2014	114,75	82,87
2015	115,00	80,19

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2014 jumlah siswa SMA, SMK dan MA adalah 10.193 orang dengan rincian siswa SMA: 5.738 orang, SMK: 3.893, dan MA: 862 orang. Jumlah guru SMA, SMK dan MA di tahun 2014 sebanyak 829 orang. Apabila dilihat dari segi rasio murid dengan guru pada tahun 2015 mencapai 13:1 Kondisi ini menunjukkan bahwa rasio murid dengan guru di Kabupaten Jembrana berada di atas rasio minimal yang dipersyaratkan dalam PP No. 74 tahun 2008 yaitu rasio minimal untuk SMA 20 :1, SMK, dan SMK, 15:1.

Untuk menampung sejumlah siswa tersebut tersedia ruang kelas sebanyak 296 ruang kelas. Apabila kita mengacu kepada PP No. 19 tentang Standar Nasional Pendidikan maka jumlah peserta didik untuk SMA/SMK idealnya 32 orang. Dengan demikian apabila isi ruang kelas standarisasinya mengacu PP No. 19 maka diperlukan penambahan ruang kelas baru (RKB) sebanyak 22 ruang.

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2014 jumlah siswa SMA, SMK dan MA adalah 10.193 orang dengan rincian siswa SMA: 5.738 orang, SMK: 3.893, dan MA: 862 orang. Jumlah guru SMA, SMK dan MA di tahun 2015 sebanyak

882 orang dengan rincian 520 orang guru SMA, 362 orang guru SMK, Bila dibandingkan dengan tahun 2015 Jumlah siswa maupun guru mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan jumlahnya. Untuk menampung sejumlah siswa tersebut tersedia ruang kelas sebanyak 296 ruang kelas.

Bila dilihat rasio antara siswa dengan guru SMA, MA dan SMK adalah 34 : 1 dan masih di atas standar nasional yang ditetapkan secara nasional yaitu 32 : 1. Apabila daya tampung kelas distandardisasikan mengacu pola ideal yang ditetapkan secara nasional maka diperlukan 318 ruang kelas. Bertolak dari jumlah ruang kelas yang ada maka diperlukan penambahan ruang kelas baru sebanyak 22 ruang kelas.

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2011 jumlah siswa SMA, SMK dengan rincian siswa SMA: 5.738 orang, SMK: 3.893 orang. Jumlah guru SMA, SMK dan MA di tahun 2011 sebanyak 802 orang. Dilihat dari segi jumlah siswa secara keseluruhan mengalami penurunan sebanyak 300 orang, dan jumlah guru secara keseluruhan mengalami penurunan sejumlah 27 orang karena pensiun.

Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SMA, SMK dan MA terdapat fasilitas perpustakaan sebanyak 21 buah, lapangan olahraga sebanyak 16 buah, ruang UKS sebanyak 24 buah, laboratorium sebanyak 39 buah, ruang keterampilan sebanyak 9 buah, ruang BK sebanyak 24 buah, ruang serba guna sebanyak 5 buah, Bengkel sebanyak 5 buah, dan ruang praktik sebanyak 13 buah.

Mengingat jumlah sekolah SMA/MA jauh lebih banyak (61%) dibandingkan dengan SMK, maka sesuai dengan prioritas pembangunan pendidikan SMK hendaknya mendapat perhatian untuk dapat dibangun dan dikembangkan sebagai jawaban dalam memenuhi lulusan yang siap kerja di dunia kerja dengan meningkatkan skill atau keterampilan yang relevan dan berkompetensi memadai, dengan mengacu kepada relevansi lulusan yang siap ditampung dalam kesempatan kerja atau minimal dapat membuka peluang untuk bisa membuka lapangan kerja sendiri.

Dari seluruh jumlah ruang kelas SMA, SMK, dan MA yang berada dalam kondisi baik adalah 262 buah, kondisi rusak ringan 25 ruang, sedangkan ruang kelas yang memiliki kondisi rusak berat berjumlah 9 buah. Ruang kelas yang

mengalami kondisi yang rusak berat ini, sudah mendapat prioritas untuk mendapat bantuan rehabilitasi sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah.

Selanjutnya, jika dilihat dari segi kelayakan mengajar, guru yang layak mengajar, ternyata paling banyak di SMA yaitu sebesar 417 orang, (50,30%) dan yang terkecil di MA yaitu sebesar 111 orang, (13,38%), sedangkan untuk jenjang SMK mencapai 301 orang (36,31 %).

Berdasarkan APK yang ada pada tahun 2015, ternyata APK tertinggi terdapat di tingkat SMP/MTs yaitu 133,26 persen, selanjutnya APK pada tingkat SMA/SMK/MA adalah 115,00 persen dan yang terendah di tingkat SD/MI yaitu 107,65 persen. Tingginya APK adalah akibat adanya penambahan jumlah penduduk usia sekolah.

APM yang tertinggi terdapat di tingkat SMP/MTS yaitu 100 persen dan yang terendah di tingkat SMA/SMK/MA 80,19 persen. Berdasarkan APM dapat diketahui bahwa pada tingkat Anak usia sekolah yang bersekolah lebih banyak dibandingkan dengan tingkat lainnya.

Indikator berikutnya membicarakan tentang rasio siswa per sekolah, siswa per kelas, siswa per guru, kelas per ruang kelas dan kelas per guru. Rasio siswa per sekolah terpadat tertinggi di tingkat SMP/MTS dengan angka 40 dan terjarang terdapat di tingkat SD sebesar 19. Hal itu menunjukkan bahwa sekolah di daerah ini sangat heterogen. Keheterogenan sekolah juga terlihat dari adanya tipe sekolah yaitu tipe A, B, C, dan kecil. Siswa per kelas yang pada saat pembangunan sekolah seharusnya diisi dengan 40 anak, ternyata pada kenyataannya juga sangat bervariasi. Rasio siswa per kelas tertinggi terdapat di tingkat SMP/MTS yaitu 40.

Rasio siswa per guru juga bervariasi dengan rasio terbesar terdapat pada tingkat SD yaitu 19 dan terendah terdapat pada SMA yaitu 13. Besarnya rasio siswa per guru ini menunjukkan kurangnya guru di tingkat tersebut.

Sebaliknya, rasio terkecil menunjukkan cukupnya guru di tingkat tersebut. Ruang kelas yang paling sering digunakan adalah pada tingkat SMP yaitu sebesar 273. Hal itu berarti, bahwa pada tingkat tersebut masih memerlukan ruang kelas tambahan jika diharapkan jumlah kelas sama dengan jumlah kelas sehingga tidak ada ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali. Sebaliknya, terdapat ruang kelas

yang tidak digunakan, ini terlihat pada rasio di bawah 1 yang terdapat di tingkat SD..

Sejalan dengan perbandingan antara sekolah di tingkat SMP dan SD yang cukup tinggi, maka angka melanjutkan ke tingkat SMP juga cukup tinggi. Diharapkan bila jumlah tingkat SMP ditingkatkan maka angka melanjutkan juga akan meningkat. Sebaliknya, angka melanjutkan ke tingkat SMA lebih kecil dengan melanjutkan ke tingkat SMP. Salah satu sebab rendahnya angka melanjutkan ini karena perbandingan sekolah tingkat SMA dan SMP juga rendah.

Berdasarkan indikator yang ada dan dengan melihat pencapaian setiap indikator untuk setiap jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa tingkat SMA Mempunyai kinerja yang lebih unggul dibandingkan dengan tingkat SD. dan tingkat SMP. Kinerja yang lebih unggul ini diambil dari banyaknya nilai yang lebih tinggi pada tingkat tersebut.

B. Mutu Dan Relevansi

Indikator mutu dapat dibedakan menjadi lima indikator mutu yaitu: (1) mutu masukan, (2) mutu proses, (3) mutu SDM, (4) mutu fasilitas, dan (5) biaya. Berdasarkan mutu masukan dapat diketahui bahwa sebagian besar siswa baru tingkat I untuk tingkat SD adalah berasal dari tamatan TK atau sejenis.

Berdasarkan indikator mutu proses yaitu angka mengulang, angka putus sekolah, dan angka lulusan, ternyata angka mengulang hanya terdapat pada tingkat SD. Selanjutnya angka putus sekolah terbesar terdapat pada tingkat SMA yaitu sebesar 0.24 persen dan terendah terdapat pada tingkat SD yaitu sebesar 0.01 persen. Bila dilihat angka lulusan ternyata angka kelulusan pada tingkat SD, SMP dan SMA/SMK sudah mencapai 100 persen.

Dengan melihat ketiga indikator mutu proses ini dapat dikatakan bahwa kinerja terbaik adalah pada tingkat SD Hal itu ditunjukkan dengan adanya angka mengulang dan putus sekolah paling rendah serta angka lulusan yang paling tinggi.

Bila dilihat dari mutu SDM (guru), maka persentase guru yang layak mengajar terbesar adalah pada tingkat SD yaitu 100 persen dan guru yang layak mengajar terendah adalah pada tingkat SMP. Mutu guru juga menunjukkan kinerja sekolah, hal itu terlihat pada kesesuaian ijazah guru dengan bidang studi yang

diajarkan.

Indikator berikutnya adalah tentang mutu prasarana dan sarana pendidikan. Ruang kelas dengan kondisi baik paling banyak terdapat pada tingkat SD sedangkan kondisi rusak yang paling banyak terdapat pada tingkat SMP.

Indikator mutu prasarana lainnya adalah ketersediaan fasilitas sekolah yang ada. Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan terbesar ada pada tingkat SMA yaitu sebesar 93.73 persen dan terendah ada pada tingkat SD sebesar 81.02 persen. Jumlah lapangan olahraga terbesar pada tingkat SM. Yaitu sebesar 56.25. persen dan terendah ada pada tingkat SD. Sebesar 0 persen. Fasilitas sekolah lainnya yaitu ruang UKS terbesar terdapat pada tingkat SMP yaitu sebesar 90.00 persen. Dengan demikian, bila setiap sekolah diharuskan memiliki ketiga fasilitas tersebut maka terdapat 10.00 persen yang belum memiliki fasilitas tersebut.

Berdasarkan indikator mutu dan dengan melihat pencapaian setiap indikator untuk setiap jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa tingkat SMP Mempunyai kinerja yang lebih unggul dibandingkan dengan tingkat SD dan tingkat SMA. Kinerja yang lebih unggul ini diambil dari banyaknya nilai yang lebih tinggi dalam hal mutu pada tingkat tersebut.

Indikator mutu prasarana lainnya adalah ketersediaan fasilitas sekolah yang ada. Jumlah SMK memiliki perpustakaan terbesar jika dibandingkan dengan jenis sekolah lainnya yang setingkat. Jumlah lapangan olahraga terbesar pada SMA , ruang UKS terbesar pada SMA. , ruang laboratorium terbesar pada SMA ruang keterampilan terbesar di SMK , ruang BP terbesar pada SMK, dan ruang Serba Guna terbesar pada SMK. Dengan demikian, bila setiap sekolah diharuskan memiliki ketujuh fasilitas tersebut, maka SMK. Memiliki angka terbesar. Dengan melihat indikator mutu sarana prasarana dapat dikatakan bahwa SMK mempunyai mutu prasarana terbaik.

Indikator mutu yang ditunjukkan dari biaya dilihat dari angka partisipasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan orang tua siswa. Dari ketiga angka partisipasi dalam hal biaya tersebut, angka partisipasi terbesar adalah pada orang tua dengan persentase terbesar pada SMA. jika dibandingkan dengan jenis sekolah lainnya. Partisipasi pemerintah pusat terbanyak terdapat di MA, demikian juga partisipasi orang tua siswa. Ternyata partisipasi pemerintah daerah paling tinggi jika

dibandingkan dengan partisipasi lainnya.

Berdasarkan indikator mutu yang ada dan dengan melihat pencapaian setiap indikator untuk SMA, SMK, dan MA, maka dapat dikatakan bahwa SMK mempunyai kinerja mutu yang lebih unggul dibandingkan dengan SMA. Kinerja yang lebih unggul ini diambil dari banyaknya nilai yang lebih tinggi dalam hal mutu pada tingkat tersebut. Dengan demikian, kinerja mutu yang lebih buruk ini yang harus ditangani lebih lanjut.

Tidak seperti dua indikator sebelumnya yang menggunakan jenis indikator yang sama, indikator untuk relevansi antara tingkat SD, SMA, dan SMK berbeda. Untuk SD merupakan relevansi antara muatan lokal dengan mata pelajaran yang dikembangkan oleh daerah, untuk SMA merupakan relevansi antara siswa menurut jurusan di SMA dengan kriteria dan prosedur penjurusan di SMA, sedangkan untuk SMK adalah relevansi antara lulusan dengan yang terserap di sektor mata pencaharian. Oleh karena itu, analisisnya juga dibedakan antara ketiga jenis sekolah tersebut.

1. Sekolah Dasar (SD)

Berdasarkan data yang ada dapat diketahui bahwa kabupaten Jembrana mempunyai relevansi pendidikan yang baik antara kurikulum muatan lokal yang ada dengan mata pelajaran yang dikembangkan di SD. Hanya kabupaten/kota atau kecamatan. Yang tidak ada relevansinya antara kurikulum muatan lokal dengan mata pelajaran yang dikembangkan di tingkat SD. Selanjutnya, bila dilihat dari sektor dominan yang ada pada setiap kabupaten/kota atau kecamatan tersebut, maka kurikulum muatan lokal dan mata pelajaran yang dikembangkan di tingkat SD pada beberapa kabupaten/kota atau kecamatan yaitu -. relevan dengan lingkungan yang ada, sedangkan beberapa kabupaten/kota atau kecamatan yaitu - sama sekali tidak relevan dengan lingkungan yang ada.

Dengan melihat kondisi seperti ini, maka kabupaten/kota atau kecamatan yang tidak ada relevansinya hendaknya dijadikan prioritas utama untuk ditangani lebih lanjut sehingga relevan, misalnya dengan mengganti mata pelajaran yang dikembangkan sesuai dengan sektor dominan atau lingkungan sekolah.

2. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Berdasarkan data dapat diketahui bahwa semua kecamatan. mempunyai relevansi pendidikan yang baik antara kriteria dan prosedur penjurusan dengan jumlah siswa yang ada di SMP. Kriteria dan prosedur penjurusan dilaksanakan dalam tiga kriteria yaitu berdasarkan TPA, Prestasi Akademik/non ademik, tes bakat/minat,. Semua Kecamatan di Kabupaten Jembrana sudah relevan karena menggunkan kreteria gabungan dan minat

3. Sekolah Menengah Umum (SMA)

Berdasarkan data dapat diketahui bahwa semua kecamatan -. mempunyai relevansi pendidikan yang baik antara kriteria dan prosedur penjurusan dengan jumlah siswa yang ada di SMA. Kriteria dan prosedur penjurusan dilaksanakan dalam empat kriteria yaitu berdasarkan prestasi, tes bakat/minat, gabungan, dan belum melaksanakan. Semua Kecamatan di Kabupaten Jembrana sudah relevan karena menggunkan kreteria gabungan dan minat

Dengan melihat kondisi seperti ini, maka kabupaten/kota atau kecamatan yang tidak ada relevansinya hendaknya dijadikan prioritas utama untuk ditangani lebih lanjut sehingga relevan, misalnya dengan mengharuskan setiap SMA menggunakan kriteria gabungan atau minimal menggunakan prestasi atau minat dalam melaksanakan penjurusan di tingkat III SMA.

4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Lulusan SMK kelompok teknologi dan industri seharusnya dapat terserap di lapangan kerja di tiga sektor yaitu pertambangan, penggalian dan industri pengolahan, serta bangunan; kelompok pertanian dan kehutanan terserap di sektor pertanian dan kehutanan; kelompok bisnis dan manajemen terserap di dua sektor yaitu perdagangan dan keuangan; kelompok pariwisata terserap di sektor angkuta dan jasa kemasyarakatan; kelompok kesejahteraan masyarakat terserap di dua sektor yaitu listrik, gas, dan air dengan jasa kemasyarakatan; sedangkan kelompok seni dan kerajinan terserap di dua sektor yaitu perdagangan dan angkutan.

Dari jumlah SMK yang ada, sudah 100 persen yang telah melaksanakan pendidikan sistem ganda (PSG), hal itu membuktikan bahwa sudah ada relevansi antara SMK dengan dunia industri atau dunia usaha.

Selain itu, berdasarkan data dapat diketahui bahwa secara keseluruhan belum terdapat relevansi antara lulusan SMK dengan lapangan kerja yang ada. Hal itu dibuktikan dengan masih sedikitnya lulusan yang dapat diserap oleh sektor mata pencaharian di masyarakat. Lulusan yang banyak dihasilkan adalah lulusan dari kelompok pertanian, sedangkan yang paling sedikit adalah dari kelompok Bisnis/manajemen. Di samping itu, jenis lapangan kerja yang banyak menyerap lulusan adalah dari sector Pertanian dan yang paling sedikit adalah dari sektor Bisnis / Manajemen.

Dengan menggabungkan dari 9 sektor menjadi 6 sektor sesuai dengan kelompok di SMK maka lulusan kelompok Bisnis dan Manajemen merupakan lulusan terbesar yang dapat diserap di lapangan kerja, sedangkan kelompok Pertanian Merupakan lulusan terkecil yang dapat diserap di lapangan kerja.

Dengan melihat kondisi seperti ini, maka untuk daerah ini SMK yang paling cocok adalah SMK kelompok Otomotif sedangkan SMK yang paling tidak sesuai adalah SMK kelompok Pertanian Oleh karena itu, agar lulusan SMK dapat dimanfaatkan oleh daerah setempat, sebaiknya diperbanyak SMK kelompok Otomotif, sedangkan SMK kelompok ini sebaiknya diganti dengan kelompok lain yang lebih sesuai.

Urusan Pemuda Olahraga

Kurangnya nasionalisme di antara pemufaktor yang sangat menentukan didalam berbangsa dan bernegara, sehingga perlu adanya pembinaan pemuda pelopor untuk meningkatkan rasa nasionalisme di antara pemuda, untuk mendukung hal tersebut pembinaan pemeningkatkan peran serta kepemudaan sangat diharapkan untuk meningkatkan kualiltas pemuda pelopor dengan penghayatan Napak Tilas Jejak Pahlawan, dan untuk meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai perjuangan khususnya napak tilas jejak perjuangan pahlawan nasional.

Tabel. 3.4
Capaian Program Bidang Kepemudaan (2011 – 2014)

No.	Kegiatan Pemuda	2011	2012	2013	2014	2015
1	Napak Tilas	220	220	220	220	220
2	Pelatihan Paskibraka	30	30	30	30	30
3	Pelatihan OSIS Kab. Jembrana di Provinsi	23	23	23	23	23
4	Pelatihan Kepemimpinan Pemuda Kab. Jembrana di Provinsi	15	15	15	15	17
5	Bakti Pemuda Antar Propinsi (BPAP) Kab. Jembrana di Provinsi dan Tk. Nasional.	3	3	3	3	2
6	Penyuluhan Narkoba Kab. Jembrana di Propinsi	15	15	15	15	10
7	Seleksi Pemuda Pelopor di Kabupaten, Tk. Provinsi dan Nasional	5	5	5	5	3

Sedangkan untuk olahraga berbagai program telah dilaksanakan untuk meningkatkan prestasi atlet pelajar baik dari penyediaan sarana prasarana dan pembentukan atlet-atlet di berbagai cabang olahraga. Sarana prasarana sangat mendukung sekali di dalam pencapaian prestasi olahraga disamping itu juga pelatih dan atlet perlu ditingkatkan kompetensinya masing-masing. sehingga baik dari sarana prasarana olahraga dan pelatih maupun atlet saling melekat. Data dibawah ini menunjukkan perkembangan Pemuda dan Olahraga Tahun 2011 s/d 2015. Dibawah ini disampaikan data perkembangan capaian program olahraga :

Tabel. 3.5
Data Perkembangan Pemuda dan Olahraga Tahun 2011 – 2015
Capaian Program Bidang Olahraga

No.	Prestasi Olahraga	2011	2012	2013	2014	2015
1	Atletik					
	- Emas	2	1	1	2	3
	- Perak	7	4	3	2	2
	- Perunggu	7	6	3	3	2
2	Pencak Silat	2	2	2	2	1
	- Emas	11	3	3	2	1
	- Perak	5	4	6	4	7
	- Perunggu					
3	Sepak Takraw	2	0	2	3	0
	- Emas	2	1	0	1	5

No.	Prestasi Olahraga	2011	2012	2013	2014	2015
	- Perak - Perunggu	3	2	3	2	3
4	Bulutangkis - Emas - Perak - Perunggu	0 0 1	0 0 3	0 0 1	0 0 1	0 0 1
5	Tenis Lapangan - Emas - Perak - Perunggu	0 0 2	0 0 2	0 0 1	0 0 2	0 0 3
6	Renang - Emas - Perak - Perunggu	0 0 1	0 0 0	0 1 5	0 3 6	1 6 7
7	Tenis Meja - Emas - Perak - Perunggu	1 0 5	0 2 0	0 1 2	0 0 0	0 0 2
8	Bola Voli - Emas - Perak - Perunggu	3 1 0	0 0 0	2 0 1	2 0 0	1 0 0
9	Bola Basket - Emas - Perak - Perunggu	1 0 0	0 0 0	0 0 1	0 0 2	0 0 0
10	Sepak Bola - Emas - Perak - Perunggu	0 1 0	0 0 1	1 1 0	0 1 1	0 0 0
11	Senam Lantai - Emas - Perak - Perunggu	0 0 0	0 0 1	0 1 3	0 1 0	0 1 1
12	Catur - Emas - Perak - Perunggu	0 0 0	0 0 2	0 0 2	1 0 0	1 0 0
13	Panjat Tebing - Emas - Perak - Perunggu	0 0 0	0 0 0	8 10 10	7 11 8	14 7 3
14	Voli Pasir - Emas - Perak - Perunggu	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
15	Judo - Emas - Perak - Perunggu	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
16	Karate - Emas	0	0	0	0	0

No.	Prestasi Olahraga	2011	2012	2013	2014	2015
	- Perak	0	0	0	0	0
	- Perunggu	0	0	0	0	0

Urusan Pariwisata.

Pembangunan pariwisata dilaksanakan melalui pengembangan pariwisata dengan promosi dan peningkatan sarana prasarana pariwisata sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap sektor pariwisata dan meningkatkan kunjungan wisata untuk berkunjung ke Kabupaten Jembrana. Kalau dilihat peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Jembrana pada tahun 2011 adalah sebanyak 89.474 wisatawan dan 156.247 wisatawan pada tahun 2015 maka dari tahun ke tahun kunjungan wisata ke Kabupaten Jembrana terus meningkat. Mengingat Jembrana bukan merupakan daerah tujuan wisata maka perlu pemikiran kita bersama dalam mendukung peningkatan kunjungan wisata ke Kabupaten Jembrana pada khususnya dan Bali pada umumnya. Untuk menyelenggarakan urusan pariwisata ini diperlukan koordinasi yang baik dan terus menerus dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Tabel. 3.6
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2006 – 2009

NO	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kunjungan Wisata	89.474	98.859	134.093	132.170	156.247
2	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012

Urusan Kebudayaan.

Pengembangan Kebudayaan di Kabupaten Jembrana dilaksanakan dengan pelestarian kesenian tradisional, lembaga adat, dan budaya yang ada di kabupaten jembrana sehingga kebudayaan yang telah dijaga dan terpelihara dengan baik terus dapat dilestarikan. Dilihat dari pengelolaan kekayaan daerah di Kabupaten Jembrana lembaga-lembaga adat yang telah dilestarikan sebanyak 25 lembaga adat, 5 kelompok sekaa dan 20 sekaa kesenian tradisional di tahun 2011. Untuk tahun kedepan diharapkan lembaga-

lembaga adat dan budaya serta kesenian tradisional dapat terpelihara dengan lebih baik, dan dilestarikan. Untuk menyelenggarakan urusan Kebudayaan ini diperlukan koordinasi yang baik dan terus menerus dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Tabel. 3.7
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2011 – 2015

NO	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Penyelenggaraan festival seni budaya	8	8	22	24	24
2.	Jml sarana penyelenggaraan seni dan budaya	6	6	6	6	6
3.	Jumlah Benda, situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	47%	47%	50%	60%	60%

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan urusannya terdapat isu-isu strategis sebagai berikut :

- a. Tersedianya peraturan dan perundang-perundangan sebagai arah dan dasar dalam menentukan arah dan kebijakan yang bersifat normatif dan komprehensif *namun* belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi Kabupaten Jember.
- b. Pelayanan yang diberikan diupayakan mengacu pada standard operation procedure (SOP) yang merupakan acuan kerja dalam menerapkan standar pelayanan minimal kepada masyarakat yang kadang-kadang *kurang* difahami secara benar.
- c. Jumlah personil aparatur yang ada saat ini tingkat efektivitas dalam berkoordinasi dan berkomunikasi antar personil cukup efektif, namun secara profesionalisme dirasakan *belum* optimal.
- d. SDM perlu terus ditingkatkan dengan dukungan dan partisipasi berbagai pihak yang terkait secara terpadu dan berkesinambungan.
- e. Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur ruang gerak SKPD khususnya bidang Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan dalam menerapkan program kerja melalui kegiatan-kegiatannya masih *terbatas*.
- g. Ketersediaan pelayanan PAUD yang berkualitas masih terbatas

- h. Kurangnya tenaga pendidik yang profesional dan kompeten dengan distribusi yang merata.
- i. Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan formal berkualitas tanpa membedakan status ekonomi, gender dan wilayah.
- j. Mewujudkan manajemen satuan pendidikan yang efisien, efektif, akuntabel, profesional, dan transparan.
- k. Meningkatkan Profesionalisme organisasi kepemudaan/generasi muda
- l. Belum maksimalnya Pengembangan Kebudayaan Daerah dan Nasional
- m. Meningkatkan dan melestarikan daya tarik obyek wisata untuk meningkatkan kunjungan wisata ke Kab. Jembrana

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, SERTA CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

4.1 VISI DAN MISI

Visi

Setiap lembaga perlu memiliki Visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Perumusan Visi Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana, mengacu pada tugas Pokok dan fungsi seperti tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 43 tahun 2008, yang menggambarkan : Apa yang ingin dicapai, berorientasi pada masa depan, mempunyai arah dan fokus strategi yang jelas.

Perumusan Visi Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat komponen Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan, memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Visi Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016 adalah sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA KWALITAS LAYANAN PRIMA PENDIDIKAN DAN KEPARIWISATAAN YANG BERBUDAYA, MENUJU MASYARAKAT JEMBRANA YANG CERDAS, TRAMPIL, MANDIRI BERMUTU DAN BERWAWASAN SERTA RELEVAN DENGAN KKEBUTUHAN MASYARAKAT JEMBRANA”

Misi

Dalam mewujudkan visi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana 2011-2016 ditetapkan 4 (empat) buah misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.
2. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang kreatif, melalui prestasi pemuda Olahraga
3. Mewujudkan Pengembangan Kebudayaan Daerah dan Nasional
4. Mewujudkan Sarana prasarana Pariwisata yang memadai serta melestarikan obyek dan daya tarik wisata

4.2 .Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2011 - 2016

Penetapan tujuan didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 seperti tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Jembrana

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN
1	2	3		4	5
I 1	PENDIDIKAN Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.	1. Meningkatnya Pemerataan Pelayanan Pendidikan	1. APS 2. APK 3. APM 4. DO 5. Angka Melanjutk an 6. Angka Melek	1. Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Formal dan Informal	1. APK PAUD 2. Persentase Lembaga Kursus dan pelatihan yang terdaftar. 3. Angka Melek Huruf

			Huruf		
				2. Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Dasar	2.1. APK SD/MI 2.2. APM SD/MI 2.3. APK SMP/MTs 2.4. AMP SMP/MTs 2.5. Angka Putus Sekolah 2.6. Angka Melanjutkan ke SMP 2.7. Angka Melanjutkan ke SMA/SMK
				3. Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Menengah	3.1. APK SMA/SMK/MA 3.2. APM SMA/SMK/MA 3.3. Angka Putus Sekolah
		2. Meningkatnya Mutu Pendidikan	1. Angka Kelulusan 2. Rata-Rata Nilai UN	4. Meningkatnya Prestasi Siswa	4.1. Angka Kelulusan semua jenjang pendidikan 4.2. Rata-rata Nilai UN semua jenjang pendidikan 4.3. Presentase Siswa Berprestasi
				5. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	5.1. Persentase guru yang berkualifikasi S1/D4 5.2. Persentase Peningkatan kompetensi tenaga pendidik
2	Mewujudkan Pengembangan Kebudayaan Daerah dan Nasional	3. Lestarinya Budaya Daerah	1. Cakupan gelar seni dan budaya 2. % Lmga adat yang ajeg 3. % warisan budaya yg mendapat pengakuan	6. Meningkatkan Pengembangan Budaya Daerah	6.1 Persentase sekaa kesenian yang aktif 6.2. Persentase lembaga adat yang mendapat pembinaan 6.3. Jumlah Museum yang dipelihara dilestarikan
4	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang kreatif, melalui prestasi pemuda Olahraga	4. Meningkatnya Partisipasi dan prestasi pemuda olahraga	1. % tingkat partisipasi pemuda olahraga 2. % tingkat prestasi olahraga	7. Meningkatkan Partisipasi Pemuda Olahraga	7.1. Persentase Kelompok Pemuda yang Aktif 7.2. Persentase keterlibatan pelajar dalam kegiatan keolahragaan
				8. Meningkatkan prestasi pemuda olahraga	8.1. Tingkat Pemuda yang berprestasi 8.2. Persentase

					perolehan medali di tingkat provinsi
					8.3. Persentase perolehan medali di tingkat nasional
				9. Meningkatkan sarana prasarana olahraga	9.1. Persentase peningkatan sarana prasarana olahraga
5	Mewujudkan Sarana prasarana Pariwisata yang memadai serta melestarikan obyek dan daya tarik wisata	5. Meningkatnya Kunjungan Wisata	1. % tingkat kunjungan wisata	10. Meningkatnya Kunjungan Wisata	10.1 Jumlah pelaksanaan kegiatan promosi pariwisata 10.2 Persentase Tingkat Kunjungan Wisata
				11. Meningkatnya daerah tujuan wisata yang dikembangkan	11.1. Persentase daerah tujuan wisata yang terpelihara 11.2 Persentase daerah tujuan wisata baru yang dikembangkan

4.3. Strategi dan Kebijakan Umum

Untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana, strategi yang akan ditempuh adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dan sistem pembiayaan *cost sharing* dengan Provinsi dan Pemerintah Pusat.
2. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan pengawasan program-program dan kegiatan pembangunan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
3. Mengembangkan instrumen regulasi yang relevan untuk mendukung kebijakan Pendidikan, Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan
4. Melaksanakan intensifikasi, ekstensifikasi serta inovasi program dan kegiatan di bidang Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Arah Kebijakan Umum Pendidikan Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 disusun berdasarkan rumusan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah, Forum SKPD yang melibatkan pihak-pihak terkait. Selanjutnya Arah Kebijakan Umum ini menjadi

kesepakatan antara pihak Legislatif dan Eksekutif, sehingga wajib menjadi pedoman bagi semua pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan Program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4.4 Target Penetapan Kinerja

Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016. Dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana terdapat program-program yang strategis dan program-program yang tidak strategis. Program-program yang bersifat strategis termuat dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang memuat informasi tentang :

- 1) Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan (Sasaran Strategis);
- 2) Indikator Kinerja Sasaran/Indikator Kinerja Utama; dan
- 3) Target Capaiannya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan dalam RENSTRA yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Sasaran bersifat spesifik dan terukur berdasarkan indikator kinerja utama sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaiannya.

Indikator Kinerja Utama ini memuat aspek prioritas pembangunan dan penjelasan tentang ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*) sebagaimana telah direncanakan sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016.

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki.

Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana ditetapkan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, berisi program utama, sasaran yang hendak dicapai dengan target indikator *output* dan atau *outcome*.

Pencapaian sasaran sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan. Pencapaian Indikator Sasaran yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Target Kinerja Tahun 2011-2016

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Non Formal dan Informal	1.1. APK PAUD 1.2. Persentase Lembaga Kursus dan pelatihan yang terdaftar. 1.3. Angka Melek Huruf	50,40% 100%	50,45% 100%	50,50% 100%	50,55% 100%	54,55% 100%	54,55% 100%
			90,05%	90,10%	90,20%	90,30%	90,35%	90,35%
2	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Dasar	2.1. APK SD/MI 2.2. APM SD/MI 2.3. APK SMP/MTs 2.4. APM SMP/MTs 2.5. Angka Putus Sekolah SD 2.6. Angka Putus Sekolah SMP 2.7. Angka Melanjutkan ke SMP 2.8. Angka Melanjutkan ke SMA/SMK	100% 93,00% 100% 90,00% 0,00% 0,00% 100% 100%	100% 93,02% 100% 90,25% 0,00% 0,00% 100% 100%	100% 93,07% 100% 90,50% 0,00% 0,00% 100% 100%	105% 94,30% 110% 95,00% 0,00% 0,00% 100% 100%	106% 93,09% 120% 98,74% 0,00% 0,00% 100% 100%	106% 93,09% 120% 98,74% 0,00% 0,00% 100% 100%
3	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Menengah	3.1. APK SMA/SMK/MA 3.2. APM SMA/SMK/MA 3.3. Angka Putus Sekolah SMA	90,00% 72,00% 0,10%	93,00% 74,00% 0,08%	95,20% 75,50% 0,05%	100% 78,20% 0,03%	110% 80,10% 0,00%	110% 80,10% 0,00%
4	Meningkatnya Prestasi Siswa	4.1. Angka Kelulusan semua jenjang pendidikan 4.2. Rata-rata Nilai UN semua jenjang	100% 6,50	100% 6,50	100% 6,50	100% 6,50	100% 6,50	100% 6,50

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4.3. pendidikan Presentase Siswa Berprestasi	0.15%	0.18%	0.20%	0.25%	0,30%	0,30
5	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	5.1. Persentase guru yang berkualifikasi S1/D4 5.2. Persentase Peningkatan kompetensi tenaga pendidik	80.00% 50.00%	81.00% 52.00%	81.65% 53.55%	88.50% 54.30%	97,50% 55,75	97,50% 55,75
6	Meningkatkan Pengembangan Budaya Daerah	6.1. Persentase sekaa kesenian yang aktif 6.2. Persentase lembaga adat yang mendapat pembinaan 6.3. Jumlah Museum yang dipelihara dilestarikan	100% 100% 1 unit	100% 100% 1 unit	100% 100% 1 unit	100% 100% 1 unit	100% 100% 1 unit	100% 100% 1 unit
7	Meningkatkan Partisipasi Pemuda Olahraga	7.1. Persentase Kelompok Pemuda yang Aktif 7.2. Persentase keterlibatan pelajar dalam kegiatan keolahragaan	20 40	22 45	25 50	30 50	50 54	50 54
8	Meningkatkan prestasi pemuda olahraga	8.1. Tingkat Pemuda yang berprestasi 8.2. Persentase perolehan medali di tingkat provinsi 8.3. Persentase perolehan medali di tingkat nasional	40% 20% 5%	45% 25% 5%	50% 30% 5%	50% 35% 10%	85% 38% 10%	85% 38% 10%
9	Meningkatkan sarana prasarana olahraga	9.1. Persentase peningkatan sarana prasarana olahraga	80.00	84.00	87.00	89.00	92,50	92,50
10	Meningkatnya Kunjungan Wisata	10.1. Jumlah pelaksanaan kegiatan promosi pariwisata 10.2. Persentase Tingkat Kunjungan Wisata	2 kali 10%	3 kali 10%	4 kali 10%	5 kali 10%	9 kali 10%	9 kali 10%
11	Meningkatnya daerah tujuan wisata yang	11.1. Persentase daerah tujuan wisata yang	10%	12%	15%	15%	24%	24%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dikembangkan	11.2 terpelihara Persentase daerah tujuan wisata baru yang dikembangkan	3%	3%	4%	4%	5%	5%

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Prioritas Program

Untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat, diperlukan sinkronisasi perencanaan program pembangunan, baik yang direncanakan oleh SKPD maupun Pemerintah Daerah.

Salah satu media untuk mewujudkan sinkronisasi perencanaan program pembangunan tersebut adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai dengan tingkat nasional. Musrenbang merupakan forum para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk merencanakan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan permasalahan yang dihadapi. Musrenbang yang diselenggarakan setiap tahun menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan lima tahunan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Berdasarkan uraian visi dan misi, Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana mengagendakan Program Pembangunan Pelayanan berupa rencana program/kegiatan indikatif untuk periode 2011– 2016 antara lain :

5.1. PROGRAM SKPD.

Pendidikan :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- a. Publikasi dan Sosialisasi PAUD.

2. Program Wajib Belajar 9 Tahun.

- a. Penambahan Ruang Kelas Sekolah.
- b. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- c. Rehabilitasi Sedang/Berat Kelas Sekolah

- d. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru
- e. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan Praktekum Sekolah
- f. Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
- g. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD/SDLB Negeri/Swasta, SMP Negeri/Swasta
- h. Penyelenggaraan Paket A setara SD
- i. Pembinaan Olimpiade Mata Pelajaran
- j. Lomba-lomba Pendidikan
- k. Penyelenggaraan Operasional TK.
- l. Rehabilitasi Bangunan Sekolah dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
- m. Peningkatan sarana dan prasarana dan kualitas Pendidikan SD
- n. Kegiatan Lomba-lomba Olimpiade mata pelajaran.
- o. Peningkatan sarana Prasarana dan kualitas pendidikan sekolah menengah Pertama

3. Program Pendidikan Menengah

- a. Pembangunan Gedung Sekolah.
- b. Penambahan ruang kelas sekolah
- c. Pengadaan Meubelair.
- d. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- e. Pemeliharaan rutin/berkala taman lapangan upacara dan fasilitas parker
- f. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
- g. Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
- h. Rehabilitasi sedang/berat ruang Laboratorium dan ruang praktikum
- i. Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parker
- j. Rehabilitasi sedang/berat ruang perpustakaan
- k. Pelatihan Penyusunan Kurikulum
- l. Pembinaan Olimpiade Mata Pelajaran
- m. Lomba-Lomba Pendidikan
- n. Bantuan Operasional Pendidikan
- o. Pemantapan dan Try Out Ujian Akhir SMP, SMA, SMK
- p. Pelaksanaan Ujian Akhir SMP, SMA dan SMK

- q. Lomba Usaha Kesehatan Sekolah
- r. Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Menengah
- s. Penyelenggaraan Paket C setara SMP

4. Program Pendidikan Non Formal

- a. Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal
- b. Monitoring dan Pelaporan
- c. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
- d. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)
- e. Penyediaan sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal
- f. Jambore PTK PNF
- g. Hari Anak Nasional (HAN)
- h. Hari Aksara Internasional (HAI)
- i. Gebyar PAUD

5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- a. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
- b. Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- c. Pembinaan Kelompok Kerja Guru
- d. Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
- e. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
- f. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SMP, SMA/SMK
- g. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD
- h. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah TK

6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

- a. Kegiatan ISO/SNI 9001-2008
- b. Kegiatan Pengembangan Kurikulum Pemenuhan SPM
- c. Kegiatan ISO SMP, SMA dan SMK
- d. Kegiatan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah
- e. Kegiatan Pembinaan Gugus
- f. Kegiatan Pakaian UKS Tim Kabupaten

7. Program Wajib Belajar 12 Tahun.

- a. Peningkatan Sarana prasarana dan kualitas Pendidikan
- b. Lomba-lomba Bidang Pendidikan
- c. Rehabilitasi Gedung Sekolah
- d. Pembangunan Gedung Sekolah
- e. Pengadaan Meubelair
- f. Pemantapan dan Try out ujian akhir SMP, SMA dan SMK
- g. Ujian Akhir SMP, SMA dan SMK

8. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

- a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum, peninggalan bawah air.
- b. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Adat.

9. Program Pengembangan Nilai Budaya

- a. Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat Budaya Daerah.
- b. Kegiatan Kemah Budaya

10. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

- a. Kegiatan Revitalisasi Kesenian Daerah.
- b. Kegiatan Kegiatan Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah
- c. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
- d. Kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman Budaya.
- e. Kegiatan Pekan Seni Pelajar
- f. Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Adat melalui lomba ke tingkat Propinsi (lembaga desa pekraman subak-subak)

11. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan.

- a. Kegiatan Napak Tilas Jejak Pahlawan Nasional
- b. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.

12. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga.
- b. Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar (PORJAR)

- c. Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
- d. Kegiatan Lomba-Lomba Pendidikan

13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

- a. Kegiatan Pengadaan Sarana Olahraga.

14. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

- a. Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata
- b. Kegiatan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan Luar Negeri

15. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

- a. Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata.
- b. Kegiatan Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan

5.2. PAGU INDIKATIF DAN INDIKASI SUMBER PENDANAAN.

Jumlah rencana pagu indikatif Program / Kegiatan Prioritas dan Kerangka Pendanaan dari tahun 2011 - 2016 yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Jembrana sebagai berikut :

Bidang Pendidikan :

- a. Tahun 2011 sebesar Rp. 58.579.987.760,00
- b. Tahun 2012 sebesar Rp. 56.285.259.660,00
- c. Tahun 2013 sebesar Rp. 59.092.121.638,00
- d. Tahun 2014 sebesar Rp. 62.021.772.724,00
- e. Tahun 2015 sebesar Rp. 64.845.496.110,00
- f. Tahun 2016 sebesar Rp. 68.087.811.416,00

Bidang Pemuda Olahraga

- a. Tahun 2011 sebesar Rp. 1.269.457.000,00
- b. Tahun 2012 sebesar Rp. 1.750.000.000,00
- c. Tahun 2013 sebesar Rp. 1.837.500.000,00
- d. Tahun 2014 sebesar Rp. 1.929.375.000,00
- e. Tahun 2015 sebesar Rp. 2.025.843.750,00
- f. Tahun 2016 sebesar Rp. 2.127.135.938,00

Bidang Pariwisata

- a. Tahun 2011 sebesar Rp. 565.000.000,00

- b. Tahun 2012 sebesar Rp. 550.000.000,00
- c. Tahun 2013 sebesar Rp. 577.500.000,00
- d. Tahun 2014 sebesar Rp. 606.375.000,00
- e. Tahun 2015 sebesar Rp. 636.693.750,00
- f. Tahun 2016 sebesar Rp. 668.528.437,00

Bidang Kebudayaan

- g. Tahun 2011 sebesar Rp. 1.821.649.000,00
- h. Tahun 2012 sebesar Rp. 2.289.000.000,00
- i. Tahun 2013 sebesar Rp. 2.403.450.000,00
- j. Tahun 2014 sebesar Rp. 2.523.622.500,00
- k. Tahun 2015 sebesar Rp. 2.644.553.625,00
- l. Tahun 2016 sebesar Rp. 2.776.781.305,00

Lebih lanjut Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif disajikan dalam bentuk tabel pada Lampiran 1

BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

9.1 Indikator Kinerja

9.1.1 Pengukuran dan Indikator Kinerja

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: Subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan : Pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja. (Meneg PAN, 2008: 2). Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan.

Dalam Sistem AKIP, seluruh program, sub program, kegiatan sub kegiatan dilakukan pengukuran capaian keuangan dan capaian fisik. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah

menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

9.1.2 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja. Perkembangan Indikator kinerja diawali sejak terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berbagai definisi indikator sering menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah. Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur

keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (apa).

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut *Key Performance Indicator*. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator kinerja utama.

IKU ditetapkan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. IKU digunakan dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan.

Pemilihan Indikator kinerja pada pemerintah kabupaten/kota menggunakan indikator kinerja pada tingkat *outcome* dan menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan instansi pemerintah merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada di lingkungan instansi pemerintah tersebut, dengan kata lain, pemilihan indikator kinerja pada pemerintah daerah bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS DIKPORAPARBUD KABUPATEN JEMBRANA**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET				
					2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1. Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Pendidikan	1. Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Non Formal dan Informal	1. APK PAUD	%	50,40%	50,45%	50,50%	50,55%	54,55
			2. Persentase Lembaga Kursus dan pelatihan yang terdaftar.	%	100%	100%	100%	100	
			3. Angka Melek Huruf	%	90,05%	90,10%	90,20%	90,35	
		2. Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Dasar	2.1. APK SD/MI	%	100%	100%	100%	105%	106
			2.2. APM SD/MI	%	93.00%	93.02%	93.07%	94.30%	93,09
			2.3. APK SMP/MTs	%	100%	100%	100%	110%	120
			2.4. AMP SMP/MTs	%	90.00%	90.25%	90.50%	95.00%	98,74
			2.5. Angka Putus Sekolah	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0,00
			2.6. Angka Melanjutkan ke SMP	%	100%	100%	100%	100%	100
			2.7. Angka Melanjutkan ke SMA/SMK	%	100%	100%	100%	100%	100
3. Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Menengah	3.1. APK MA/SMK/MA	%	90.00%	93.00%	95.20%	100%	110		
	3.2. APM SMA/SMK/MA	%	72.00%	74.00%	75.50%	78.20%	80,10		
	3.3. Angka Putus Sekolah	%	0.10%	0.08%	0.05%	0.03%	0,00		
2. Meningkatkan Mutu Pendidikan	4. Meningkatnya Prestasi Siswa	4.1. Angka Kelulusan semua jenjang pendidikan	%	100%	100%	100%	100%	100	
		4.2. Rata-rata Nilai UN semua jenjang pendidikan	%	6.50	6.50	6.50	6.50	6,50	
		4.3. Presentase Siswa Berprestasi	%	0.15%	0.18%	0.20%	0.25%	0,30	

		5. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	5.1. Persentase guru yang berkualifikasi S1/D4 5.2. Persentase Peningkatan kompetensi tenaga pendidik	% %	80.00% 50.00%	81.00% 52.00%	81.65% 53.55%	88.50% 54.30%	97,50 55,75
2	3. Lestarinya Budaya Daerah	6. Meningkatkan Pengembangan Budaya Daerah	6.1 Persentase sekaa kesenian yang aktif 6.2. Persentase lembaga adat yang mendapat pembinaan 6.3. Jumlah Museum yang dipelihara dilestarikan	% % unit	100% 100% 1 unit	100% 100% 1 unit	100% 100% 1 unit	100% 100% 1 unit	100 100 1
4	4.Meningkatnya Partisipasi dan prestasi pemuda olahraga	7. Meningkatkan Partisipasi Pemuda Olahraga	7.1. Persentase Kelompok Pemuda yang Aktif 7.2. Persentase keterlibatan pelajar dalam kegiatan keolahragaan	% %	20 40	22 45	25 50	30 50	50,00 54,00
		8. Meningkatkan prestasi pemuda olahraga	8.1. Tingkat Pemuda yang berprestasi 8.2. Persentase perolehan medali di tingkat provinsi 8.3. Persentase perolehan medali di tingkat nasional	% % %	40% 20% 5%	45% 25% 5%	50% 30% 5%	50% 35% 10%	90,00 38,00 10,00
		9. Meningkatkan sarana prasarana olahraga	9.1. Persentase peningkatan sarana prasarana olahraga	%	80.00	84.00	87.00	89.00	92,50
5	5.Meningkatnya Kunjungan Wisata	10. Meningkatkan Kunjungan Wisata	10.1 Jumlah pelaksanaan kegiatan promosi pariwisata 10.2 Persentase Tingkat Kunjungan Wisata	Event %	2 kali 10	3 kali 10	4 kali 10	5 kali 10	9 10,00
		11. Meningkatkan daerah tujuan wisata yang dikembangkan	11.1. Persentase daerah tujuan wisata yang terpelihara 11.2 Persentase daerah tujuan wisata baru yang	% %	10% 3%	12% 3%	15% 4%	15% 4%	24,00

			dikembangkan	%					5,00
--	--	--	--------------	---	--	--	--	--	------

BAB VII

P E N U T U P

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata Kabupaten Jembrana tahun 2011 - 2016 ini mengacu pada visi dan misi Bupati Jembrana. RENSTRA ini disusun dengan tujuan agar dapat menjawab dan memfokuskan upaya Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana menghadapi tantangan pembangunan Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Jembrana ini yang semakin kompleks.

RENSTRA ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana dalam 5 tahun ke depan. Semoga upaya Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana dalam 5 tahun dapat lebih terarah dan terukur.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RENSTRA ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi serta kerja keras demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah serta Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana dalam meningkatkan Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan di kabupaten tercinta ini.

Negara, 20 Februari 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga
Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Jembrana



Nengah Alit, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19641215 198803 1 007

LAMPIRAN :
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011 - 2016

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	RENCANA KERJA TAHUN 2011 - 2016												Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							Tahun -1 2011		Tahun -1 2012		Tahun -3 2013		Tahun -4 2014		Tahun -5 2015		Tahun -6 2016					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1 01 01 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	70%	75%	1,599,120,050	85%	1,888,032,225	90%	1,997,433,836.25	90%	2,097,305,528.06	90%	2,202,170,804.47	100%	3,453,366,843.94		13,237,429,287.72		
Meningkatnya Penyediaan Jasa surat menyurat	Terpenuhiya Jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa surat menyurat	1 01 01 1	01	Jumlah paket barang dan jasa surat menyurat	1.800 lbr	8,400,000	3.080 lbr	15,510,000	3.234 lbr	16,285,500,00	3.440 lbr	17,099,775,00	3.440 lbr	17,954,763,75	3.440 lbr	18,852,501.94		94,102,540.69		Sekretariat	Jbr
Meningkatnya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terwujudnya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 01 01 1	03	Jumlah unit ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	24 unit 64 perlengkapan	102,375,000	30 unit kdran dan 64 prlng	130,000,000	30 unit kdran dan 64 prlng	136,500,000,00	30 unit kdran dan 64 prlng	143,325,000,00	30 unit kdran dan 64 prlng	150,491,250,00	30 unit kdran dan 64 prlng	158,015,812.50		820,707,062.50		Sekretariat	Jbr
Meningkatnya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersusunnya Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan yang akurat	1 01 01 1	07	Jumlah jasa administrasi yang tersedia	12 bln	120,000,000	12 bulan	120,000,000	12 bulan	126,000,000,00	12 bulan	132,300,000,00	12 bulan	138,915,000,00	12 bulan	145,860,750.00		783,075,750.00		Sekretariat	Jbr
Meningkatnya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhiya Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 01 01 1	10	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	52 jenis	65,301,600	52 jenis	75,000,000	52 jenis	78,750,000,00	52 jenis	82,687,500,00	52 jenis	86,821,875.00	52 jenis	91,162,968.75		479,723,943.75		Sekretariat	Jbr
Meningkatnya Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhiya Barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 01 01 1	11	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang digandaan	22 jenis, 220.380 penggandaan	89,944,950	22 jenis, 220.380 penggandaan	132,522,225	22 jenis, 220.380 penggandaan	139,148,336.25	22 jenis, 220.380 penggandaan	146,105,753.06	22 jenis, 220.380 penggandaan	153,411,040.72	22 jenis, 220.380 penggandaan	161,081,592.76		822,213,897.78		Sekretariat	Jbr
Meningkatnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhiya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 01 01 1	13	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	17 macam	34,481,000	17 macam	40,000,000	17 macam	42,000,000,00	17 macam	44,100,000,00	17 macam	46,305,000,00	17 macam	48,620,250.00		255,506,250.00		Sekretariat	Jbr
Meningkatnya Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhiya makanan dan minuman rapat	Tersedianya makanan dan minuman rapat	1 01 01 1	17	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	7.096 kotak	72,547,500	7.096 kotak	75,000,000	7.096 kotak	78,750,000,00	7.096 kotak	82,687,500,00	7.096 kotak	86,821,875.00	7.096 kotak	91,162,968.00		486,969,843.00		Sekretariat	Jbr
Meningkatnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1 01 01 1	18	Jumlah rapat-rapat dan konsultasi yang dapat dilaksanakan	kali	268,030,000	kali	300,000,000	kali	315,000,000,00	kali	330,750,000,00	kali	347,287,500,00	kali	364,651,875.00		1,925,719,375.00		Sekretariat	Jbr
Meningkatnya Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi	Terwujudnya Penyelesaian Laporan SKPD	Tersedianya Laporan SKPD	1 01 01 1	19	Jumlah jasa Tenaga Administrasi yang tersedia	103 org	838,040,000	103 orang	1,000,000,000	103 orang	1,050,000,000,00	103 orang	1,102,500,000,00	103 orang	1,157,625,000,00	103 orang	1,215,506,250.00		6,363,671,250.00		Sekretariat	Jbr
Meningkatnya Upakara Banten/Upakara keagamaan	Terwujudnya Upakara/Upakara banten keagamaan	Tersedianya Upakara/Upakara keagamaan	1 01 01 1	23	Jumlah cakupan ketersediaan upakara banten	-	-	-	-	1 paket	15,000,000,00	1 paket	15,750,000,00	1 paket	16,537,500,00	1 paket	1,158,451,875.00		1,205,739,375.00		Sekretariat	Jbr
			1 01 01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		1 Tahun	273,006,000	1 Tahun	420,000,000	1 Tahun	446,900,000,00	1 Tahun	464,745,000,00	1 Tahun	483,482,250,00	1 Tahun	491,690,362.50		2,579,823,612.50		
Meningkatnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	Terwujudnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional	1 01 01 02	12	Jumlah ketersediaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 unit	72,000,000	1 unit	72,000,000	1 unit	72,000,000,00	1 unit	75,600,000,00	1 unit	79,380,000,00	1 unit	85,985,250.00		756,965,250.00		Sekretariat	Jbr

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	RENCANA KERJA TAHUN 2011 - 2016														Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
							Tahun -1 2011		Tahun -1 2012		Tahun -3 2013		Tahun -4 2014		Tahun -5 2015		Tahun -6 2016		Target	Rp							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
Meningkatnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terwujudnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional	1	01	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara		32 unit	273,006,000	38 unit	330,000,000	38 unit	356,900,000.00	38 unit	374,745,000.00	38 unit	393,482,250.00	38 unit	401,690,362.50		2,129,823,612.50	Sekretariat	Jbr	
Meningkatnya Ketersediaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terwujudnya Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	1	01	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dibeli		-	6 buah	90,000,000	6 buah	90,000,000.00	6 buah	90,000,000.00	6 buah	90,000,000.00	6 buah	90,000,000.00	6 buah	90,000,000.00		450,000,000.00	Sekretariat	Jbr
Meningkatkan kualitas Pendidikan PAUDNI			1	01	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN																			
			1	01	01	15		PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Meningkatnya Rasio PAUDNI		50%	-	60%	5,000,000	65%	689,622,000.00	70%	758,321,700.00	75%	833,878,245.00	80%	916,976,663.25		3,203,798,608.25			
Meningkatnya Publikasi dan Sosialisasi PAUDNI	Terwujudnya Sosialisasi dan Publikasi PAUDNI	Terlaksananya Sosialisasi dan Publikasi PAUDNI	1	01	01	15	65	Publikasi dan sosialisasi PAUDNI	Jumlah Publikasi dan Sosialisasi PAUDNI		-	-	49 Lembaga	5,000,000	49 Lembaga	5,250,000.00	49 Lembaga	5,512,500.00	49 Lembaga	5,788,125.00	49 Lembaga	6,077,531.25		27,628,156.25	PLS	Jbr	
Meningkatnya pemerataan memperoleh pendidikan PAUD	Terwujudnya pembangunan gedung sekolah	Tersedianya gedung sekolah yang baik	1	01	01	15	01	Pembangunan Gedung	Jumlah cakupan ketersediaan ruang kelas sekolah		-	-	-	2 sekolah	410,000,000.00	2 sekolah	451,000,000.00	2 sekolah	496,100,000.00	2 sekolah	545,710,000.00		1,902,810,000.00	PLS			
Meningkatnya prestasi lomba PAUD	Terwujudnya lomba PAUD	Terlaksananya Lomba gugus dan Lembaga PAUD	1	01	01	15	67	Lomba Gugus dan Lem	Jumlah lomba PAUD yang mengikuti Lomba Gugus		-	-	-	5 Gugus PAUD dan 5 Lembaga	9,236,000.00	5 Gugus PAUD dan 5 Lembaga	10,159,600.00	5 Gugus PAUD dan 5 Lembaga	11,175,560.00	5 Gugus PAUD dan 5 Lembaga	12,293,116.00		42,864,276.00	PLS			
Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Terwujudnya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan	1	01	01	15	68	Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Jumlah tenaga pendidik yang mendapatkan pendidikan		-	-	-	100 or	61,307,500.00	100 or	67,438,250.00	100 or	74,182,075.00	100 or	81,600,282.50		284,528,107.50	PLS			
Meningkatnya Prestasi TK	Terwujudnya TK berprestasi	Terselenggaranya Lomba-Lomba TK	1	01	01	15	81	Lomba-lomba TK Berprestasi	Jumlah peserta lomba TK berprestasi		-	-	-	6 orang	7,328,500.00	6 orang	8,061,350.00	6 orang	8,867,485.00	6 orang	9,754,233.50		34,011,568.50	PLS			
Meningkatnya Operasional Sekolah TK	Terwujudnya penyelenggaraan Operasional Sekolah TK	Tersedianya Operasional Sekolah TK	1	01	01	15	82	Penyelenggaraan Operasional Sekolah TK	Jumlah cakupan ketersediaan Operasional Lembaga TK		-	-	-	5 lembaga	196,500,000.00	5 lembaga	216,150,000.00	5 lembaga	237,765,000.00	5 lembaga	261,541,500.00		911,956,500.00	PLS			
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dasar 9 tahun			1	01	01	16		PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 TAHUN	Meningkatnya Rasio dan Mutu pendidikan Dasar		35%	45,378,339,900	45%	51,392,907,450	65%	57,833,522,100.00	75%	60,467,089,890.00	85%	63,067,601,519.50	90%	66,002,464,201.98		341,997,079,553.98			
Meningkatnya Gedung Sekolah	Terwujudnya Penambahan gedung sekolah	Meningkatnya daya tampung siswa	1	01	01	16	01	Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah gedung sekolah yang dibangun		-	-	-	2 sekolah	1,277,320,000.00	1 sekolah	1,405,052,000.00	1 sekolah	1,545,557,200.00	1 sekolah	1,700,112,920.00		5,928,042,120.00	Dikdas	Jbr		
Meningkatnya Penambahan ruang kelas sekolah	Terwujudnya Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Meningkatnya daya tampung siswa	1	01	01	16	03	Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah penambahan ruang kelas yang dibangun		-	-	1 paket	150,000,000	1 paket	157,500,000.00	1 paket	165,375,000	1 paket	173,643,750	1 paket	182,325,938		646,518,750.00	DIKDAS	Jbr	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	RENCANA KERJA TAHUN 2011 - 2016												Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
							Tahun -1 2011		Tahun -1 2012		Tahun -3 2013		Tahun -4 2014		Tahun -5 2015		Tahun -6 2016									
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13.00	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Meningkatnya Penataan halaman dan keamanan sekolah	Terwujudnya pembangunan pagar alas dan penataan halaman sekolah	Meningkatnya keamanan dan keindahan halaman sekolah	1	01	01	16	09	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Jumlah sekolah yang fasilitas parkir, taman dan lapangan upacara baik dan aman	-	-	5 sekolah	746,070,000.00	5 sekolah	820,677,000.00	5 sekolah	902,744,700	5 sekolah	993,019,170.00			2,469,491,700.00	Dikdas	Jbr		
Meningkatnya ketersediaan Meubelair sekolah	Terwujudnya pengadaan meubelair sekolah	Meningkatnya daya tampung siswa di kelas	1	01	01	16	19	Pengadaan Meubelair Sekolah	Jumlah sarana dan prasarana sekolah yang memadai	-	-	8 sekolah	728,400,000.00	8 sekolah	801,240,000.00	8 sekolah	881,364,000.00	8 sekolah	969,500,400.00			2,411,004,000.00	DIKDAS	Jbr		
Meningkatnya Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Terwujudnya Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah	1	01	01	16	20	Pengadaan Perlengkapan sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah yang dibei	-	1 paket	456,000,000	1 paket	478,800,000.00	1 paket	502,740,000	1 paket	527,877,000	1 paket	554,270,850			2,519,687,850.00	DIKDAS	Jbr	
Meningkatnya bangunan sekolah yang baik	Terwujudnya Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Meningkatnya daya tampung siswa	1	01	01	16	41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah gedung sekolah yang direhab	-	-	3 sekolah	1,009,250,000.00	3 sekolah	1,110,175,000	3 sekolah	1,221,192,500	3 sekolah	1,343,311,750			4,683,929,250.00				
Meningkatnya Rehabilitasi Sedang/berat ruang kelas sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/berat ruang kelas sekolah	Meningkatnya jumlah kelas yang baik	1	01	01	16	44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas yang direhab	-	1 paket	150,000,000	1 paket	157,500,000.00	1 paket	165,375,000	1 paket	173,643,750	1 paket	182,325,938			828,844,687.50	DIKDAS	Jbr	
Meningkatkan Rehabilitasi sedang/berat ruang guru	Terwujudnya Rehabilitasi sedang/berat ruang guru	Meningkatnya efektivitas ruang guru	1	01	01	16	45	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru	Jumlah ruang guru yang dibangun	-	1 Paket	70,000,000	1 Paket	73,500,000.00	1 Paket	77,175,000	1 Paket	81,033,750	1 Paket	85,085,438			386,794,187.50	DIKDAS	Jbr	
Meningkatnya ruang Lab dan Praktekum	Terwujudnya Rehabilitasi sedang/berat Lab. Dan Praktekum Sekolah	Meningkatnya efektivitas ruang Lab dan Praktekum Sekolah	1	01	01	16	46	Rehabilitasi sedang/berat Lab. Dan Praktekum sekolah	Jumlah rehab ruang Lab & Praktekum yang dibangun	-	1 Paket	100,000,000	1 Paket	105,000,000.00	1 Paket	110,250,000	1 Paket	115,762,500	1 Paket	121,550,625			552,563,125.00	DIKDAS	Jbr	
Meningkatnya taman lap. Upacara dan fasilitas parkir	Terwujudnya Rehabilitasi sedang/berat Lab dan Praktekum Sekolah	Meningkatnya daya tampung lap. Upacara dan fasilitas parkir	1	01	01	16	51	Rehabilitasi sedang/berat taman, lap upacara dan fasilitas parkir	Jumlah rehab Lap.Upacara dan fasilitas parkir yang dibangun	2 SD 1 TK	205,500,000	1 paket	2,750,000,000	1 paket	2,887,500,000.00	1 paket	3,031,875,000	1 paket	3,039,093,750	1 paket	3,191,048,438			15,105,017,187.50	DIKDAS	Jbr
Meningkatnya sarana air bersih dan sanitary	Terwujudnya rehab sarana air bersih dan sanitary	Terselenggaranya rehab sarana air bersih dan sanitary sekolah	1	01	01	16	56	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	Jumlah sarana air bersih dan sanitary yang direhab	11 sekolah	419,225,000	11 sekolah	419,225,000	11 sekolah	419,225,000.00	11 sekolah	419,225,000.00	11 sekolah	419,225,000.00	11 sekolah	419,225,000.00			2,515,350,000.00	DIKDAS	Jbr
Meningkatnya Bantuan Operasional Pendidikan	Terwujudnya Bantuan Operasional Sekolah jenjang SD/SDLB Negeri/Swasta, SMP Negeri/Swasta	Terlaksananya Bantuan Operasional Pendidikan	1	01	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah yang diterima sekolah	Jumlah Bantuan Operasional yang diterima sekolah	210 sekolah	17,575,016,000	210 sekolah	16,882,776,000	210 sekolah	17,726,913,800.00	210 sekolah	18,613,159,490	210 sekolah	19,543,817,465	210 sekolah	20,521,008,338			110,862,691,092.73	DIKDAS	Jbr
Meningkatnya Biaya Operasional Sekolah	Terwujudnya Pendampingan BOS	Terlaksananya Pendampingan BOS	1	01	01	16	63	Pendampingan BOS KAB. Yang tersedia	Jumlah Pendamping BOS Kab. Yang tersedia	-	-	210 sekolah	697,900,000	210 sekolah	732,795,000.00	210 sekolah	769,434,750	210 sekolah	771,266,738	210 sekolah	809,830,075			3,781,226,562.38	DIKDAS	Jbr
Meningkatnya Paket A setara SD	Terwujudnya penyelenggaraan Paket A setara SD	Terlaksananya penyelenggaraan Paket A setara SD	1	01	01	16	67	Penyelenggaraan Paket A setara SD	Jumlah keikutsertaan paket A setara SD	-	-	100 warga belajar	92,000,000	100 warga belajar	96,600,000.00	100 warga belajar	101,430,000	100 warga belajar	106,501,500	100 warga belajar	111,826,575			508,358,075.00	DIKDAS	Jbr

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	RENCANA KERJA TAHUN 2011 - 2016												Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		UNIT SKPD PENANGUNG JAWAB	LOKASI			
							Tahun -1 2011		Tahun -1 2012		Tahun -3 2013		Tahun -4 2014		Tahun -5 2015		Tahun -6 2016		Target	Rp					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Meningkatnya Paket setara SMP	Terwujudnya penyelenggaraan Paket B setara SMP	Terlaksananya penyelenggaraan Paket A setara SD	1	01	01	16	68	Penyelenggaraan Paket B setara SMP	Jumlah keikutsertaan paket B setara SMP	10 klmpok	120,000,000	10 klmpok	125,000,000	10 klmpok	154,514,850,000	10 klmpok	154,514,850	10 klmpok	154,514,850	10 klmpok	154,514,850	863,059,400.00	DIKDAS	Jbr	
Meningkatnya Mutu Pendidikan	Terwujudnya penyelenggaraan Olimpiade Mata Pelajaran	Terlaksananya penyelenggaraan Olimpiade Mata Pelajaran	1	01	01	16	80	Pembinaan Olimpiade Mata Pelajaran	Jumlah keikutsertaan Olimpiade Mata Pelajaran	-	-	120 orang	50,000,000	120 orang	52,500,000.00	120 orang	55,125,000	120 orang	55,256,250	120 orang	58,019,063	270,900,312.50	DIKDAS	Jbr	
Meningkatnya Mutu Pendidikan	Terwujudnya Lomba-lomba Pendidikan	Terlaksananya Lomba-lomba Pendidikan	1	01	01	16	81	Lomba Lomba Pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti lomba-lomba Pendidikan	44 or	77,133,900	80 orang	216,900,000	85 orang	227,745,000.00	85 orang	239,132,250	85 orang	251,088,863	85 orang	263,643,306	1,275,643,318.63	DIKDAS	Jbr	
Meningkatnya Penyelenggaraan Operasional Sekolah	Terwujudnya Penyelenggaraan Operasional TK	Terlaksananya penyelenggaraan operasional Sekolah	1	01	01	16	82	Penyelenggaraan Operasional Sekolah TK	Jumlah sekolah yang mendapatkan Operasional Sekolah	39 sekolah	485,640,000	114 TK	485,640,000	114 TK	509,922,000.00	114 TK	535,418,100	114 TK	562,189,005	114 TK	590,298,455	3,169,107,560.25	DIKDAS	Jbr	
Meningkatnya rehab bangunan sekolah dan sarana prasarana	Meningkatnya daya tampung siswa	Terlaksananya rehab dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	1	01	01	16	84	Rehabilitasi Bangunan Sekolah dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Jumlah bangunan yang direhab dan peningkatan sarana prasarana dibeli	51 sekolah	11,638,945,000	41 sekolah	4,426,076,000	41 sekolah	4,426,076,000.00	41 sekolah	4,426,076,000	41 sekolah	4,426,076,000.00	41 sekolah	4,426,076,000.00	33,769,325,000.00	DIKDAS	Jbr	
Meningkatnya peningkatan sarana prasarana	Meningkatnya peningkatan sarana prasarana	Jumlah sarana prasarana yang dibeli/dibangun	1	01	01	16	86	Peningkatan sarana dan prasarana dan kualitas pendidikan SD (DAK)	Jumlah sarana prasarana pendidikan SD	40 sekolah	11,865,970,000	41 sekolah	19,000,000,000	41 sekolah	19,950,000,000.00	41 sekolah	20,947,500,000	41 sekolah	21,994,875,000	41 sekolah	23,094,618,750	116,852,963,750.00	DIKDAS	Jbr	
Meningkatnya pendampingan DAK	Meningkatnya pendampingan DAK	Terperuhnya pendampingan DAK	1	01	01	16	86	Pendampingan DAK	Jumlah Pendampingan DAK	-	-	41 sekolah	1,900,000,000	41 sekolah	1,995,000,000.00	41 sekolah	2,094,750,000	41 sekolah	2,199,487,500	41 sekolah	2,309,461,875	10,498,699,375.00	DIKDAS	Jbr	
Meningkatnya lomba olimpiade mata pelajaran	Terwujudnya lomba olimpiade mata pelajaran	Terlaksananya Lomba Olimpiade	1	01	01	16	87	Kegiatan Lomba-Lomba Olimpiade Mata Pelajaran	Jumlah peserta lomba-Olimpiade	12 or	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00	DIKDAS	Jbr	
Meningkatnya peningkatan sarana prasarana	Terwujudnya peningkatan sarana prasarana	terperuhnya sarana prasarana pendidikan	1	01	01	16	88	Peningkatan sarana Prasarana dan kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sarana prasarana pendidikan	10 sekolah	2,832,180,000	10 sekolah	3,272,660,450	10 sekolah	3,272,660,450.00	10 sekolah	3,272,660,450.00	10 sekolah	3,272,660,450.00	10 sekolah	3,272,660,450.00	19,195,482,250.00	DIKDAS	Jbr	
Meningkatnya operasional UPT	Tersedianya Operasional UPT	Terperuhnya Operasional UPT	1	01	01	16	91	Penyelenggaraan Operasional UPT	Jumlah ketersediaan Operasional UPT	-	-	-	5 UPT	500,000,000.00	5 UPT	500,000,000.00	5 UPT	500,000,000.00	5 UPT	500,000,000.00	5 UPT	500,000,000.00	2,000,000,000.00	DIKDAS	Jbr
Meningkatnya Nilai Ujian Nasional SD dan SMP	Terwujudnya peningkatan lulusan Ujian Nasional SD dan SMP	Terlaksananya Pemantapan Ujian Nasional SD dan SMP	1	01	01	16	95	Penyelenggaraan Pemantapan Ujian Nasional SD dan SMP	Jumlah sekolah yang mengikuti pemantapan ujian nasional	194 SD/Mi, 34 SMP/MTs	50,000,000	194 SD/Mi, 34 SMP/MTs	50,000,000	194 SD/Mi, 34 SMP/MTs	50,000,000.00	194 SD/Mi, 34 SMP/MTs	50,000,000	194 SD/Mi, 34 SMP/MTs	50,000,000.00	194 SD/Mi, 34 SMP/MTs	50,000,000.00	300,000,000.00	DIKDAS	Jbr	
Meningkatnya Nilai Ujian Nasional SD dan SMP	Terwujudnya peningkatan lulusan Ujian Nasional SD dan SMP	Terlaksananya Ujian Nasional SD dan SMP	1	01	01	16	96	Penyelenggaraan Ujian Nasional (SD dan SMP)	Jumlah sekolah yang mengikuti ujian nasional	194 SD/Mi, 34 SMP/MTs	25,000,000	194 SD/Mi, 34 SMP/MTs	25,000,000	194 SD/Mi, 34 SMP/MTs	25,000,000.00	194 SD/Mi, 34 SMP/MTs	25,000,000.00	194 SD/Mi, 34 SMP/MTs	25,000,000.00	194 SD/Mi, 34 SMP/MTs	25,000,000.00	150,000,000.00	DIKDAS	Jbr	
Meningkatnya sekolah yang bersih dan sehat	Terwujudnya pelaksanaan Green and clean school	Terciptanya lingkungan sekolah yang sehat dan bersih	1	01	01	16	97	Green and clean school	Jumlah sekolah yang menjadi hijau, bersih dan sehat	1 SD, 1 SMP	29,090,000	1 SD, 1 SMP	29,090,000	1 SD, 1 SMP	29,090,000.00	1 SD, 1 SMP	29,090,000	1 SD, 1 SMP	29,090,000	1 SD, 1 SMP	29,090,000	174,540,000.00	DIKDAS	Jbr	
Meningkatnya sekolah yang bersih dan sehat	Terwujudnya penyelenggaraan UKS SD dan SMP	Terciptanya lingkungan sekolah yang sehat dan	1	01	01	16	98	Penyelenggaraan UKS SD dan SMP	Jumlah sekolah yang mengikuti penyelenggaraan UKS SD dan SMP	1 SD, 1 SMP	21,640,000	1 SD, 1 SMP	21,640,000	1 SD, 1 SMP	21,640,000.00	1 SD, 1 SMP	21,640,000	1 SD, 1 SMP	21,640,000	1 SD, 1 SMP	21,640,000	129,840,000.00	DIKDAS	Jbr	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	RENCANA KERJA TAHUN 2011 - 2016												Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
							Tahun -1 2011		Tahun -1 2012		Tahun -3 2013		Tahun -4 2014		Tahun -5 2015		Tahun -6 2016		Target	Rp					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13.00	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Meningkatnya wawasan adiwiyata mandala	Terwujudnya pelaksanaan Lomba adiwiyata	Terciptanya wawasan adiwiyata sekolah	1	01	01	16	99	Lomba wawasan wiyata mandala	Jumlah Sekolah yang mengikuti lomba adiwiyata	1 sekolah	23,000,000	1 sekolah	23,000,000	1 sekolah	23,000,000.00	1 sekolah	23,000,000.00	1 sekolah	23,000,000.00	1 sekolah	23,000,000.00		138,000,000.00	DIKDAS	Jbr
Meningkatnya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu			1	01	01	17		PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	Meningkatnya Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk Usia sekolah	65%	75%	13,540,602,238	80%	18,114,492,288	85%	18,683,898,596.00	90%	19,276,775,219	95%	19,874,307,674	100%	20,539,204,750	110,029,280,765.25	DIKMEN	Jbr
Meningkatnya Pembangunan Gedung Sekolah	Terwujudnya pembangunan Gedung Sekolah	Terlaksananya pembangunan gedung sekolah	1	01	01	17	01	Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah Gedung sekolah yang dibangun	-	-	3 lokal	2,000,000,000	4 lokal	2,100,000,000.00	4 lokal	2,205,000,000	4 lokal	2,315,250,000	4 lokal	2,431,012,500	11,051,262,500.00	DIKMEN	Jbr	
Meningkatnya penambahan ruang kelas	Terwujudnya penambahan ruang kelas	Meningkatnya ruang kelas yang baik	1	01	01	17	03	Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas yang dibangun	-	-	3 ruang kelas	650,000,000	3 ruang kelas	682,500,000.00	4 ruang kelas	716,625,000	4 ruang kelas	752,456,250	4 ruang kelas	790,079,063	3,591,660,312.50	DIKMEN	Jbr	
Meningkatnya alat praktek dan peraga siswa	Terwujudnya pengadaan alat praktek dan peraga siswa	Meningkatnya sarana-prasarana pendidikan	1	01	01	17	18	Pengadaan Alat praktek dan peraga siswa	Jumlah cakupan alat praktek dan peraga siswa	1 sekolah	23,000,000	1 sekolah	23,000,000	1 sekolah	23,000,000.00	1 sekolah	23,000,000.00	1 sekolah	23,000,000.00	1 sekolah	23,000,000.00	138,000,000.00	DIKMEN	Jbr	
Meningkatnya Meubelair sekolah	Terwujudnya pengadaan Meubelair sekolah	Meningkatnya Jumlah meubelair sekolah	1	01	01	17	19	Pengadaan Meubelair Sekolah	Jumlah meubelair sekolah yang dibeli	-	-	6 sekolah	300,000,000	6 sekolah	315,000,000.00	7 sekolah	330,750,000	7 sekolah	347,287,500	7 sekolah	364,651,875	1,657,689,375.00	DIKMEN	Jbr	
Meningkatnya Perlengkapan Kantor	Terwujudnya pemenuhan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia dan baik	1	01	01	17	20	Kegiatan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Komputer, LCD	-	-	9 sekolah	544,000,000	9 sekolah	571,200,000.00	10 sekolah	599,760,000	10 sekolah	599,760,000	10 sekolah	629,748,000	2,944,468,000.00	DIKMEN	Jbr	
Meningkatnya Pemeliharaan rutin/berkala taman lapangan upacara dan fasilitas parkir	Terlaksananya pemeliharaan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir	Terwujudnya lapangan yang bersih dan rapi	1	01	01	17	30	Pemeliharaan rutin/berkala taman lapangan upacara dan fasilitas parkir	Jumlah pemeliharaan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SMP, SMA dan SMK	-	-	27 sekolah	20,250,000	27 sekolah	21,262,500.00	27 sekolah	22,325,625	27 sekolah	23,441,906	27 sekolah	24,614,001	111,894,032.56	DIKMEN	Jbr	
Meningkatnya Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Terpeliharanya bangunan sekolah	terwujudnya rehabilitasi sedang/berat Bangunan sekolah	1	01	01	17	41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah sekolah yang direhab	SMA dan SMK	6,181,452,000	SMA dan SMK	6,181,452,000	SMA dan SMK	6,181,452,000.00	SMA dan SMK	6,181,452,000.00	SMA dan SMK	6,181,452,000.00	SMA dan SMK	6,181,452,000.00	37,088,712,000.00	DIKMEN	Jbr	
	Meningkatnya Rehabilitasi ruang kelas	terwujudnya rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	1	01	01	17	44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas yang direhab	-	-	2 sekolah	150,000,000	4 sekolah	150,000,000.00	4 sekolah	150,000,000	7 sekolah	150,000,000	7 sekolah	157,500,000	757,500,000.00	DIKMEN	Jbr	
	Meningkatnya Rehabilitasi ruang Guru	terwujudnya rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	1	01	01	17	45	Rehab sedang/berat ruang guru sekolah	jumlah ruang guru yang direhab	-	-	2 sekolah	130,000,000	4 sekolah	136,500,000.00	4 sekolah	143,325,000	7 sekolah	150,491,250	7 sekolah	158,015,813	718,332,062.50	DIKMEN	Jbr	
	Meningkatnya Rehabilitasi ruang Lab dan Praktekum	terwujudnya rehabilitasi sedang/berat Lab dan ruang praktekum sekolah	1	01	01	17	46	Rehabilitasi sedang/berat ruang Lab. Dan ruang praktekum sekolah	Jumlah ruang lab dan praktikum yang direhab	-	-	5 sekolah	150,000,000	5 sekolah	157,500,000.00	5 sekolah	165,375,000	5 sekolah	173,643,750	5 sekolah	182,325,938	828,844,687.50	DIKMEN	Jbr	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	RENCANA KERJA TAHUN 2011 - 2016												Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
							Tahun -1 2011		Tahun -1 2012		Tahun -3 2013		Tahun -4 2014		Tahun -5 2015		Tahun -6 2016		Target	Rp					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	Meningkatnya Rehabilitasi Taman lap. Upacara dan parkir	Jumlah taman, Lap Upacara dan fasilitas parkir yang direhab	1	01	01	17	50	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Jumlah rehab pagar alas sekolah	-	-	2 sekolah	100,000,000	3 sekolah	105,000,000.00	5 sekolah	110,250,000	5 sekolah	115,762,500	5 sekolah	121,550,625		552,563,125.00	DIKMEN	Jbr
Meningkatnya Kurikulum Sekolah	Meningkatnya Rehabilitasi ruang perpustakaan sekolah	Jumlah Rehab ruang perpustakaan yang dibangun	1	01	01	17	53	Rehabilitasi ruang perpustakaan sekolah	jumlah ruang perpustakaan yang direhab	-	-	3 sekolah	100,000,000	4 sekolah	105,000,000.00	4 sekolah	105,250,000	5 sekolah	110,512,500	5 sekolah	116,038,125		536,800,625.00	DIKMEN	Jbr
Meningkatnya Penyelenggaraan Paket C setara SMA	Terlaksananya Pelaksanaan Kejar Paket C	Terwujudnya pelaksanaan Kejar Paket C setara SMA	1	01	01	17	63	Pelatihan penyusunan kurikulum sekolah	Jumlah Peserta yang mengikuti Penyusunan Kurikulum pendidikan	25 sekolah	21,500,000	25 sekolah	21,500,000	25 sekolah	21,500,000.00	25 sekolah	21,500,000.00	25 sekolah	21,500,000.00	25 sekolah	21,500,000.00		129,000,000.00	DIKMEN	Jbr
	Terlaksananya Pelaksanaan Kejar Paket C setara SMA	Terwujudnya pelaksanaan Kejar Paket C setara SMA	1	01	01	17	63	Penyelenggaraan Paket C setara SMA	Jumlah peserta Paket C Setara SMA	4 PKBM	151,809,668	4 PKBM	151,809,668	4 PKBM	151,809,668.00	4 PKBM	151,809,668.00	4 PKBM	151,809,668.00	4 PKBM	151,809,668.00		910,858,008.00	DIKMEN	Jbr
	Meningkatnya Akreditasi Sekolah	Jumlah sekolah yang terakreditasi	1	01	01	17	68	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Menengah	Jumlah Akreditasi Sekolah Menengah	-	-	47 sekolah	3,000,000	47 sekolah	3,150,000.00	47 sekolah	3,307,500	47 sekolah	3,472,875	47 sekolah	3,646,519		16,576,893.75	DIKMEN	Jbr
	Meningkatnya Pembinaan Olimpiade Mata Pelajaran	Terseleenggaranya Pembinaan Olimpiade Mata Pelajaran	1	01	01	17	70	Pembinaan Olimpiade Mata Pelajaran	Jumlah Pembinaan Olimpiade Mata Pelajaran	1 kegiatan	240,000,000	24 Mata Pelajaran	240,000,000	24 Mata Pelajaran	252,000,000.00	24 Mata Pelajaran	264,600,000	24 Mata Pelajaran	277,830,000	24 Mata Pelajaran	291,721,500		1,566,151,500.00	DIKMEN	Jbr
	Meningkatnya Lomba-Lomba Pendidikan	Jumlah lomba-lomba pendidikan yang dilaksanakan	1	01	01	17	71	Lomba-lomba Pendidikan	Jumlah peserta lomba	1 kegiatan	294,999,950	400 orang	295,000,000	400 orang	309,750,000.00	400 orang	325,237,500	400 orang	341,499,375	400 orang	358,574,344		1,925,061,168.75	DIKMEN	Jbr
	Meningkatnya Bantuan Operasional Pendidikan	Jumlah Sekolah yang menerima Bantuan Operasional Pendidikan	1	01	01	17	73	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah SMA / SMK	Jumlah Dana Operasional Pendidikan	1	6,429,236,160	9 sekolah	6,429,236,160	9 sekolah	6,750,697,968.00	9 sekolah	7,088,232,866	9 sekolah	7,442,644,509	9 sekolah	7,814,776,734		41,954,824,398.19	DIKMEN	Jbr
Meningkatnya sekolah yang bersih dan sehat	Terwujudnya pelaksanaan Green and clean school	Terceptanya lingkungan sekolah yang sehat dan bersih	1	01	01	17	74	Green and clean school	Jumlah sekolah yang menjadi hijau, bersih dan sehat	25 sekolah	138,080,000	25 sekolah	138,080,000	25 sekolah	138,080,000.00	25 sekolah	138,080,000.00	25 sekolah	138,080,000.00	25 sekolah	138,080,000.00		828,480,000.00	DIKMEN	Jbr
	Meningkatnya Try out ujian akhir SMP, SMA, SMK	Jumlah siswa yang mengikuti try out ujian akhir	1	01	01	17	76	Pemantapan dan Try Out Ujian Akhir SMP, SMA, SMK	Jumlah kualitas peserta ujian	-	-	7.350 siswa	100,000,000	7.350 siswa	105,000,000.00	7.350 siswa	110,250,000	7.350 siswa	115,762,500	7.350 siswa	121,550,625		552,563,125.00	DIKMEN	Jbr
	Meningkatnya Ujian akhir SMP, SMA dan SMK	Jumlah siswa yang mengikuti Ujian Akhir	1	01	01	17	77	Pelaksanaan Ujian Akhir SMP, SMA dan SMK	Jumlah kualitas peserta ujian	-	-	7.350 siswa	26,640,000	7.350 siswa	27,972,000.00	7.350 siswa	29,370,600	7.350 siswa	30,839,130	7.350 siswa	32,381,087		147,202,816.50	DIKMEN	Jbr
	Meningkatnya Lomba Wawasan Wiyata Mandala SMP, SMA SMK	Jumlah sekolah yang mengikuti Wiyata Mandala SMP, SMA SMK	1	01	01	17	78	Lomba Wawasan Wiyata Mandala SMP, SMA dan SMK	Jumlah jumlah peserta wvm SMP, SMA dan SMK	-	-	3 sekolah	150,000,000	3 sekolah	157,500,000.00	3 sekolah	165,375,000	3 sekolah	173,643,750	3 sekolah	182,325,938		828,844,687.50	DIKMEN	Jbr
	Meningkatnya Lomba UKS	Jumlah sekolah yang mengikuti Lomba UKS	1	01	01	17	79	Lomba Usaha Kesehatan Sekolah	Jumlah Peserta Lomba UKS	-	-	3 sekolah	150,000,000	3 sekolah	157,500,000.00	3 sekolah	165,375,000	3 sekolah	173,643,750	3 sekolah	182,325,938		828,844,687.50	DIKMEN	Jbr

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	RENCANA KERJA TAHUN 2011 - 2016												Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							Tahun -1 2011		Tahun -1 2012		Tahun -3 2013		Tahun -4 2014		Tahun -5 2015		Tahun -6 2016		Target	Rp			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	Meningkatnya Ujian akhir SMA dan SMK	Jumlah siswa yang mengikuti Ujian Akhir	1	01	17	83	Pelaksanaan Ujian Akhir SMA dan SMK	Jumlah peserta ujian akhir SMA dan SMK	3.510 peserta	37,524,460	3.510 peserta	37,524,460	3.510 peserta	37,524,460.00	3.510 peserta	37,524,460.00	3.510 peserta	37,524,460.00	3.510 peserta	37,524,460.00	225,146,760.00	DIKMEN	Jbr
Meningkatnya wawasan adiwiyata mandala	Terwujudnya pelaksanaan Lomba adiwiyata	Terciptanya wawasan adiwiyata sekolah	1	01	17	84	Lomba Adiwiyata SMA/SMK	Jumlah Sekolah yang mengikuti lomba adiwiyata	2 sekolah	23,000,000	2 sekolah	23,000,000	2 sekolah	23,000,000.00	2 sekolah	23,000,000.00	2 sekolah	23,000,000.00	2 sekolah	23,000,000.00	138,000,000.00	DIKMEN	Jbr
							PROGRAM PENDIDIKAN NON	Meningkatnya pelaksanaan Pendidikan Non Formal	50%	50%	574,324,150	60%	845,824,150	65%	861,363,025.00	70%	75%	877,678,843.75	80%	894,810,452.69	912,798,643.32		
	Terwujudnya Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	Terselenggaranya Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	1	01	18	02	Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	Jumlah Pendidik PAUD Non Formal	-	-	49 Lembaga	24,500,000	49 Lembaga	25,725,000.00	49 Lembaga	27,011,250	49 Lembaga	28,361,813	49 Lembaga	29,779,904	135,377,966.13	PLS	Jbr
	Terselenggaranya Monitoring dan Pelaporan	Meningkatnya pembinaan pendidikan Non Formal	1	01	18	04	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Jumlah Pendidikan Keaksaraan	-	-	200 orang	72,000,000	200 orang	75,600,000.00	200 orang	79,380,000	200 orang	83,349,000	200 orang	87,516,450	397,845,450.00	PLS	Jbr
	Terwujudnya Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	Jumlah peserta pengembangan pendidikan kecakapan hidup	1	01	18	05	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)	Jumlah warga masyarakat	-	-	100 orang	150,000,000	100 orang	157,500,000.00	100 orang	165,375,000	100 orang	173,643,750	100 orang	182,325,938	828,844,687.50	PLS	Jbr
			1	01	18	06	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	Jumlah ketersediaan sarana prasarana lembaga PAUDNI	5 lembaga	199,902,500	5 lembaga	199,902,500	5 lembaga	199,902,500.00	5 lembaga	199,902,500.00	5 lembaga	199,902,500.00	5 lembaga	199,902,500.00	1,199,415,000.00	PLS	Jbr
	Terselenggaranya Monitoring dan Pelaporan	Meningkatnya pembinaan pendidikan Non Formal	1	01	18	13	Monitoring dan Pelaporan	Jumlah satuan pendidikan Non Formal	-	-	1 paket	25,000,000	1 paket	26,250,000.00	1 paket	27,562,500	1 paket	28,940,625	1 paket	30,387,656	138,140,781.25	PLS	Jbr
			1	01	18	17	Dilat Menjahit	Jumlah peserta diklat menjahit	40 orang	54,486,750	40 orang	54,486,750	40 orang	54,486,750.00	40 orang	54,486,750.00	40 orang	54,486,750.00	40 orang	54,486,750.00	326,920,500.00	PLS	Jbr
			1	01	18	19	Diklat Serati banten	Jumlah peserta diklat serati banten	20 orang	21,675,000	20 orang	21,675,000	20 orang	21,675,000.00	20 orang	21,675,000.00	20 orang	21,675,000.00	20 orang	21,675,000.00	130,050,000.00	PLS	Jbr
			1	01	18	26	Diklat Tata Rias	Jumlah Peserta Diklat tata Rias	60 orang	67,589,250	60 orang	67,589,250	60 orang	67,589,250.00	60 orang	67,589,250.00	60 orang	67,589,250.00	60 orang	67,589,250.00	405,535,500.00	PLS	Jbr
	Terwujudnya Jambore PTK PNF	Jumlah Peserta Jambore PTK PNF	1	02	18	32	Jambore PTK PNF	Jumlah PTK PNF	17 orang	8,480,000	17 orang	8,480,000	17 orang	8,904,000.00	17 orang	9,349,200	17 orang	9,816,660	17 orang	10,307,493	55,337,353.00	PLS	Jbr
	Meningkatnya Hari Anak Nasional	Jumlah peserta Hari Anak Nasional	1	02	18	33	Hari Anak Nasional (HAN)	Jumlah Anak Didik PAUD Non Formal	60 orang	7,862,500	60 anak didik	7,862,500	60 anak didik	8,255,625.00	60 anak didik	8,668,406	60 anak didik	9,101,826	60 anak didik	9,556,918	51,307,775.19	PLS	Jbr
	Meningkatnya Hari Anak Internasional	Jumlah peserta Hari Anak Internasional	1	02	18	34	Hari Aksara Internasional (HAI)	Jumlah Peserta didik	11 orang	5,072,500	1 warga belajar	5,072,500	warga belajar	5,326,125.00	1 warga belajar	5,592,431	warga belajar	5,872,053	1 warga belajar	6,165,655	33,101,264.00	PLS	Jbr
	Meningkatnya Gebyar PAUD	Jumlah peserta PAUD	1	02	18	35	Gebyar PAUD	Jumlah anak didik PAUD Non Formal Prop bali	40 orang	17,862,500	40 anak didik	17,862,500	40 anak didik	18,755,625.00	40 anak didik	19,693,406	40 anak didik	20,678,076	40 anak didik	21,711,980	116,564,087.69	PLS	Jbr
			1	02	18	47	Diklat Kecantikan Kulit	Jumlah peserta diklat Kecantikan Kulit	60 orang	78,437,550	60 orang	78,437,550	60 orang	78,437,550.00	60 orang	78,437,550	60 orang	78,437,550	60 orang	78,437,550	470,625,300.00	PLS	Jbr

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	RENCANA KERJA TAHUN 2011 - 2016												Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							Tahun -1 2011		Tahun -1 2012		Tahun -3 2013		Tahun -4 2014		Tahun -5 2015		Tahun -6 2016		Target	Rp			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.00	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			1 02 01 18 48	Diklat Kepemangku	Jumlah peserta diklat kepemangku		20 orang	39,492,400	20 orang	39,492,400	20 orang	39,492,400.00	20 orang	39,492,400	20 orang	39,492,400	20 orang	39,492,400		236,954,400.00	PLS	Jbr	
			1 02 01 18 49	Penyelenggaraan Operasional UPT	Jumlah ketersediaan Operasional SKB		1 SKB	73,463,200	1 SKB	73,463,200	1 SKB	73,463,200.00	1 SKB	73,463,200	1 SKB	73,463,200	1 SKB	73,463,200		440,779,200.00	PLS	Jbr	
Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			1 01 01 20	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya Rasio kualitas tenaga Pendidik	50%	50%	527,045,000	60%	656,915,000	70%	686,897,000.00	75%	718,378,100	80%	751,433,255	85%	786,141,168		3,669,039,523			
Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Sertifikasi Pendidik	Jumlah guru yang tersertifikasi	1 01 01 20 01	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Jumlah guru yang tersertifikasi		-	-	150 Guru	3,000,000	150 Guru	3,150,000.00	150 Guru	3,307,500	150 Guru	3,472,875	150 Guru	3,646,519		16,576,893.75	Dikmen/Dikdas	Jbr	
Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terlaksananya Penilaian Kinerja Guru SMA dan SMK	Terwujudnya Guru SMA dan SMK yang kinerjanya baik	1 01 01 20 02	Penilaian Kinerja Guru SMA dan SMK	Jumlah guru yang dinilai kinerjanya		25 orang	42,275,000	25 orang	42,275,000	25 orang	42,275,000.00	25 orang	42,275,000.00	25 orang	42,275,000.00	25 orang	42,275,000.00		253,650,000.00	Dikmen/Dikdas	Jbr	
Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terlaksananya Diklat Penilaian Kinerja Guru	Terwujudnya Guru yang kinerjanya baik	1 01 01 20 03	Diklat Penilaian Kinerja Guru	Jumlah guru yang dinilai kinerjanya		25 orang	42,275,000	25 orang	42,275,000	25 orang	42,275,000.00	25 orang	42,275,000.00	25 orang	42,275,000.00	25 orang	42,275,000.00		253,650,000.00	Dikmen/Dikdas	Jbr	
Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Kelompok Kerja Guru	Jumlah Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 01 01 20 04	Pembinaan Kelompok Kerja Guru	Jumlah Pembinaan Kelompok Kerja Guru (MGMP)		-	-	32 MGMP	90,000,000	32 MGMP	94,500,000.00	32 MGMP	99,225,000	32 MGMP	104,186,250	32 MGMP	109,395,563		497,306,812.50	Dikmen/Dikdas	Jbr	
Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Pendidikan Lanjutan Bagi	Terlaksananya Pendidikan Lanjutan Bagi	1 01 01 20 07	Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik utk memenuhi standar kualifikasi	Jumlah pendidik yang memenuhi standar kualifikasi		1 kegiatan	457,770,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	Dikmen/Dikdas	Jbr	
Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya sistem pendataan dan pemetaan pendidik	Terlaksananya sistem pendataan dan pemetaan pendidik	1 01 01 20 09	Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Sistem Pendataan di SMA dan SMK Negeri		-	-	9 Sekolah	9,000,000	9 Sekolah	9,450,000.00	9 Sekolah	9,922,500	9 Sekolah	10,418,625	9 Sekolah	10,939,556		49,730,681.25	Dikmen/Dikdas	Jbr	
Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya penilaian kinerja kepala sekolah SMP, SMA/SMK	Terlaksananya penilaian kinerja kepala sekolah	1 01 01 20 14	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SMP, SMA/SMK	Jumlah Penilaian Kinerja Kepala Sekolah		56 Kepala Sekolah	12,000,000	56 Kepala Sekolah	12,000,000	56 Kepala Sekolah	12,600,000.00	56 Kepala Sekolah	13,230,000	56 Kepala Sekolah	13,891,500	56 Kepala Sekolah	14,586,075		78,307,575.00	Dikmen/Dikdas	Jbr	
Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya penilaian kinerja kepala sekolah SD	Terlaksananya penilaian kinerja kepala sekolah	1 01 01 20 15	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD, SMP, SMA dan SMK	Jumlah Penilaian Kinerja Kepala Sekolah		3 orang	15,000,000	3 orang	15,000,000	3 orang	15,000,000.00	3 orang	15,000,000	3 orang	15,000,000	3 orang	15,000,000		90,000,000.00	Dikmen/Dikdas	Jbr	
Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya penilaian kinerja kepala sekolah TK	Terlaksananya penilaian kinerja kepala sekolah	1 01 01 20 17	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah TK	Jumlah Operasional TK		-	-	114 TK	485,640,000	114 TK	509,922,000.00	114 TK	535,418,100	114 TK	562,189,005	114 TK	590,298,455		2,683,467,560.25	Dikmen/Dikdas	Jbr	
			1 01 01 20 19	Penyediaan Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah ketersediaan Tenaga pendidik dan kependidikan		-	-	-	1 tahun	1,393,060,000.00	1 tahun	1,393,060,000	1 tahun	1,393,060,000	1 tahun	1,393,060,000	1 tahun	1,393,060,000		5,572,240,000.00	Dikmen/Dikdas	Jbr

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	RENCANA KERJA TAHUN 2011 - 2016												Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							Tahun -1 2011		Tahun -1 2012		Tahun -3 2013		Tahun -4 2014		Tahun -5 2015		Tahun -6 2016		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1 01 01 22	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN	Meningkatnya Tenaga Pendidikan	65%	65%	45,094,000	70%	348,000,000	75%	365,400,000.00	80%	383,670,000	85%	402,853,500	85%	422,996,175		1,968,013,675		
	Terwujudnya Sertifikasi ISO	Terlaksananya pemeliharaan sertifikasi ISO	1 01 01 22 12	ISO/SNI 9001-2008	Terlaksananya pemeliharaan Sertifikasi ISO		1 thn	25,000,000	1 thn	-	-	-	-	0	-	0	-	0		25,000,000.00	Dikmen/Dikdas	Jbr
	Meningkatnya Pengembangan Kurikulum	Terlaksananya Pengembangan Kurikulum	1 01 01 22 13	Pengembangan Kurikulum Pemenuhan SPM	Jumlah Pemenuhan SPM		30%	20,094,000	30%	-	-	-	-	0	-	0	-	0		20,094,000.00	Dikmen/Dikdas	Jbr
	Meningkatnya ISO SMP, SMA dan SMK	Terlaksananya sertifikasi ISO SMP, SMA dan SMK	1 01 01 22 14	ISO SMP, SMA dan SMK	Jumlah ISO SMP, SMA/SMK		-	-	10 sekolah	300,000,000	10 sekolah	315,000,000.00	10 sekolah	330,750,000	10 sekolah	347,287,500	10 sekolah	364,651,875		1,657,689,375.00	Dikmen/Dikdas	Jbr
	Terwujudnya Pembinaan UKS	Terlaksananya Pembinaan UKS	1 01 01 22 15	Pembinaan UKS	Jumlah Pembinaan UKS TK, SD, SMP, SMA		-	-	5 Kecamatan	25,000,000	5 Kecamatan	26,250,000.00	5 Kecamatan	27,562,500	5 Kecamatan	28,940,625	5 Kecamatan	30,387,656		138,140,781.25	Dikmen/Dikdas	Jbr
	Terwujudnya Pembinaan UKS	Terlaksananya Pembinaan UKS	1 01 01 22 16	Pembinaan Gugus	Jumlah Pembinaan Gugus		-	-	5 Kecamatan	20,000,000	5 Kecamatan	21,000,000.00	5 Kecamatan	22,050,000	5 Kecamatan	23,152,500	5 Kecamatan	24,310,125		110,512,625.00	Dikmen/Dikdas	Jbr
	Terwujudnya Penilaian UKS	Terlaksananya Pembinaan UKS	1 01 01 22 18	Pakaian UKS Tim Kabupaten	Jumlah Penilaian UKS		-	-	20 orang	3,000,000	20 orang	3,150,000.00	20 orang	3,307,500	20 orang	3,472,875	20 orang	3,646,519		16,576,893.75	Dikmen/Dikdas	Jbr
			1 01 01 23	PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN			23 sekolah	6,319,959,250		-		-		0		0		0		6,319,959,250		
	Meningkatnya Peningkatan sarana prasarana pendidikan	Jumlah sekolah yang penerima sarana prasarana	1 01 01 23 01	Peningkatan sarana prasarana dan kualitas pendidikan	Jumlah sarana prasarana Pendidikan Wajar 12 Tahun		15 SMPN, 3 SMAN, dan 3 SMK	611,709,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		611,709,400.00	Dikmen	Jbr
	Meningkatnya Lomba-lomba pendidikan	terlaksananya lomba-lomba pendidikan	1 01 01 23 02	Lomba-lomba Bidang Pendidikan	Jumlah Prestasi Siswa		1 kegiatan	98,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		98,800,000.00	Dikmen	Jbr
	Meningkatnya Rehabilitasi Gedung sekolah	jumlah Gedung Sekolah yang direhab	1 01 01 23 06	Rehabilitasi Gedung Sekolah	Jumlah Gedung yang direhab		3 lokal, 6 lab, 4 wc	772,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		772,400,000.00	Dikmen	Jbr
	Meningkatnya Pembangunan Gedung sekolah	jumlah Gedung Sekolah yang dibangun	1 01 01 23 07	Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah bangunan Gedung sekolah		2 SMP, 1 SMA, 1 SMK	3,503,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3,503,400,000.00	Dikmen	Jbr
	Meningkatnya Pengadaan Meubelair	Jumlah sekolah yang menerima meubelair	1 01 01 23 08	Pengadaan Meubelair	Jumlah sarana pendidikan		SMP, SMA, SMK	1,217,650,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,217,650,000.00	Dikmen	Jbr
	Meningkatnya pemantapan try out ujian akhir	Terlaksananya pemantapan Ujian akhir	1 01 01 23 13	Pemantapan dan try out ujian akhir smp, sma, smk	Jumlah pemantapan try out ujian akhir		1 kegiatan	89,359,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		89,359,850.00	Dikmen	Jbr
	Terwujudnya Ujian Akhir SMP, SMA dan SMK	Terlaksananya Ujian akhir SMP, SMA dan SMK	1 01 01 23 14	Ujian Akhir SMP, SMA dan SMK	Jumlah peserta ujian akhir		1 kegiatan	26,640,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		26,640,000.00	Dikmen	Jbr
Meningkatkan penanaman kecintaan pada budaya daerah			1 01 01 15	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Prosentase Pengembangan Nilai Budaya	25%	25%	57,015,000	25%	154,000,000	40%	161,700,000.00	65%	169,785,000.00	85%	178,274,250.00	100%	187,187,962.50		907,962,212.50		
Meningkatkan pemahaman seni sastra Bali	Terseleenggaranya lomba Utsawa darma gita	Jumlah peserta utsawa darma gita	1 01 01 15 01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah keikutsertaan peserta pelestarian dan aktualisasi budaya daerah		290 orang	57,015,000	1.360 orang	119,000,000	1.360 orang	124,950,000.00	1.360 orang	131,197,500	1.360 orang	137,757,375	1.360 orang	144,645,244		714,565,118.75	Kebudayaan	Jbr

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	RENCANA KERJA TAHUN 2011 - 2016												Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
							Tahun -1 2011		Tahun -1 2012		Tahun -3 2013		Tahun -4 2014		Tahun -5 2015		Tahun -6 2016		Target	Rp						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13.00	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Meningkatkan pemahaman tentang Budaya Daerah di kalangan pelajar	Terselenggaranya Kemah Budaya	Jumlah peserta kemah budaya	1	01	01	15	07	Kemah Budaya	Jumlah peserta kemah budaya		-	150 orang	35,000,000	150 orang	36,750,000.00	150 orang	38,587,500	150 orang	40,516,875	150 orang	42,542,719		193,397,093.75	Kebudayaan	Jbr	
Meningkatnya Penataan/Pengelola adat dan budaya	Terselenggaranya Penataan Perangkat/Pengelola Adat dan Budaya	Terwujudnya Penataan Perangkat/Pengelola adat dan budaya	1	01	01	15	08	Penataan Perangkat/Pengelola Adat dan Budaya	Jumlah perangkat/pengelola adat dan budaya yang dibina dan ditata	64 desa	14,902,407	64 desa	14,902,407	64 desa	14,902,407.00	64 desa	14,902,407.00	64 desa	14,902,407.00	64 desa	14,902,407.00		89,414,442.00	Kebudayaan	Jbr	
			1	01	01	16		PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	Meningkatnya Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	25%	-	30%	255,000,000	30%	267,750,000.00	40%	281,137,500.00	75%	295,194,375.00	100%	309,954,093.75		1,409,035,968.75			
Meningkatkan Gedung Musium Purbakala Gilimanuk	Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah	Jumlah pelestarian dan pengembangan peninggalan sejarah	1	01	01	16	05	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan sejarah purbakala,museum, peninggalan bawah air	Jumlah museum yang dapat terpelihara dan dilestarikan		-	1 unit	100,000,000	1 unit	105,000,000.00	1 unit	110,250,000	1 unit	115,762,500	1 unit	121,550,625		552,563,125.00	Kebudayaan	Jbr	
Meningkatkan Lembaga Adat di Kab.Jembrana melalui lomba di tingkat Kabupaten dan Propinsi	Terselenggaranya pemberdayaan lembaga adat	Jumlah pemberdayaan lembaga adat	1	01	01	16	14	Pemberdayaan Lembaga Adat			-	25 Lembaga	155,000,000	25 Lembaga	162,750,000.00	25 Lembaga	170,887,500	25 Lembaga	179,431,875	25 Lembaga	188,403,469		856,472,843.75	Kebudayaan	Jbr	
			1	01	01	17		PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Meningkatnya festival seni dan budaya	25%	25%	1,764,634,000	25%	2,157,060,000	35%	2,253,060,000.00	60%	2,353,860,000.00	80%	2,454,450,000.00	100%	2,565,319,500.00		13,548,383,500.00		
Meningkatkan dan melestarikan Kesenian yang hampir punah	Terwujudnya Revitalisasi Kesenian Daerah	Jumlah Kesenian yang dilindungi	1	01	01	17	08	Revitalisasi Kesenian Daerah	Jumlah sekaa kesenian yang direvitalisasi		-	2 sekaa	80,000,000	2 sekaa	84,000,000.00	2 sekaa	88,200,000	2 sekaa	92,610,000	2 sekaa	97,240,500		442,050,500.00	Kebudayaan	Jbr	
Meningkatkan perayaan HUT Kota Negara	Terwujudnya Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya	Jumlah Sekaa yang dilibatkan dlm keragaman budaya daerah	1	01	01	17	04	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	Jumlah sekaa kesenian yang mengikuti keragaman budaya daerah melalui HUT Kota Negara	30 sekaa	800,000,000	20 sekaa	800,000,000	20 sekaa	840,000,000.00	20 sekaa	882,000,000	20 sekaa	926,100,000	20 sekaa	972,405,000		5,220,505,000.00	Kebudayaan	Jbr	
Meningkatkan Sekaa Kesenian yang mengikuti PKB Propinsi Bali	Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Jumlah Sekaa yang dilibatkan dlm penyelenggaraan Festival budaya daerah	1	01	01	17	05	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Jumlah sekaa kesenian yang mengikuti Festival Budaya dalam PKB	10 kesenian	669,550,000	25 Sekaa	900,000,000	25 Sekaa	945,000,000.00	25 Sekaa	992,250,000	25 Sekaa	1,041,862,500	25 Sekaa	1,093,955,625		5,642,618,125.00	Kebudayaan	Jbr	
Meningkatkan Pengembangan Seni di Kabupaten	Terwujudnya Monitoring dan evaluasi	Jumlah sekaa yang di evaluasi	1	01	01	17	07	Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan	Jumlah sekaa yang dapat dievaluasi dan dimonitor		-	20 sekaa	40,000,000	20 sekaa	42,000,000.00	20 sekaa	44,100,000	20 sekaa	46,305,000	20 sekaa	48,620,250		221,025,250.00	Kebudayaan	Jbr	
Meningkatkan pemahaman Seni di kalangan pelajar	Terwujudnya Pekan Seni Pelajar	Jumlah keikutsertaan Pekan seni Pelajar	1	01	01	17	08	Pekan Seni Pelajar	Jumlah peserta dalam Pekan Seni Pelajar	100%	58,024,000	50 orang	100,000,000	50 orang	105,000,000.00	50 orang	110,250,000	50 orang	110,512,500	50 orang	116,038,125		599,824,625.00	Kebudayaan	Jbr	
Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Adat di tingkat Propinsi	Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga-lembaga adat	Jumlah lembaga adat yang diperdanakan	1	01	01	17	09	Pemberdayaan Lembaga-lembaga Adat melalui lomba ke Tingkat Propinsi (lembaga Desa Pekraman subak-subak)	Jumlah Lembaga adat yang dapat diberdayakan	25 lembaga adat	237,060,000	25 lembaga adat	237,060,000	25 lembaga adat	237,060,000.00	25 lembaga adat	237,060,000.00	25 lembaga adat	237,060,000.00	25 lembaga adat	237,060,000.00		1,422,360,000.00	Kebudayaan	Jbr	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	RENCANA KERJA TAHUN 2011 - 2016												Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
							Tahun -1 2011		Tahun -1 2012		Tahun -3 2013		Tahun -4 2014		Tahun -5 2015		Tahun -6 2016									
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13.00	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Meningkatkan dan mendorong kemandirian pemuda dan olahraga			1	18	01	16	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Meningkatnya peran Pemuda	25%	25%	198,515,000	25%	307,350,000	25%	319,967,500.00	25%	333,215,875.00	25%	347,126,668.75	25%	361,733,002.19		1,867,908,045.94			
Meningkatnya Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Terlaksananya pembinaan terhadap Organisasi Kepemudaan	Terwujudnya organisasi kepemudaan yang efektif	1	18	01	16	01	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang efektif		80 orang	35,000,000	80 orang	35,000,000	80 orang	35,000,000.00	80 orang	35,000,000.00	80 orang	35,000,000.00	80 orang	35,000,000.00		210,000,000.00	Kebudayaan	Jbr
Meningkatnya Pencegahan Narkoba di Kalangan Pemuda	Terhindarnya penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda	Terwujudnya Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba	1	18	01	16	01	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda	Jumlah Organisasi kepemudaan yang terhindar dari narkoba		500 orang	20,000,000	500 orang	20,000,000	500 orang	20,000,000.00	500 orang	20,000,000.00	500 orang	20,000,000.00	500 orang	20,000,000.00		120,000,000.00	Kebudayaan	Jbr
Meningkatkan pemahaman Pelajar dan Masyarakat tentang Nilai-nilai dan semangat Kepahlawanan dan Nasionalisme Kebangsaan	Terwujudnya Napak Tilas Jejak Pahlawan	Terlaksananya Napak Tilas Jejak Pahlawan	1	18	01	16	10	Napak Tilas Jejak Pahlawan	Jumlah Napak Tilas Jejak Pahlawan		220 orang	102,425,000	250 orang	150,000,000	250 orang	157,500,000.00	250 orang	165,375,000	250 orang	173,643,750	250 orang	182,325,938		931,269,687.50	Mudora	Jbr
Meningkatkan kompetensi pendidikan bidang kepemimpinan, organisasi, manajemen dan kewirausahaan	Terwujudnya Fasilitas Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah peserta Napak Tilas	1	18	01	16	12	Fasilitas Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Jumlah Generasi Muda		63 orang	41,090,000	397 orang	102,350,000	397 orang	107,467,500.00	397 orang	112,840,875	397 orang	118,482,919	397 orang	124,407,065		606,638,358.44	Mudora	Jbr
			1	18	01	20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA	Meningkatnya jumlah kegiatan Olahraga	40%	40%	1,140,942,900	40%	1,412,650,000	40%	1,492,532,500.00	40%	1,565,909,125.00	40%	1,642,954,582.25	40%	1,723,852,311.36		8,978,841,418.61			
Meningkatnya Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Terlaksananya Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Terwujudnya Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	1	18	01	20	05	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Jumlah keikutsertaan masyarakat dalam kesegaran jasmani dan rekreasi		70 orang	15,000,000	70 orang	15,000,000	70 orang	25,000,000.00	70 orang	25,000,000	70 orang	25,000,000	70 orang	25,000,000		130,000,000.00	Mudora	Jbr
Meningkatkan kemampuan /potensi pelajar di bidang Olahraga	Terwujudnya Kompetisi Olahraga	Jumlah peserta Kompetisi	1	18	01	20	06	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Jumlah Kompetisi Olahraga			104,225,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Meningkatkan kemampuan /potensi pelajar di bidang Olahraga	Terwujudnya Pekan Olahraga Pelajar (PORJAR)	Jumlah peserta Pekan Olahraga Pelajar	1	18	01	20	22	Pekan Olahraga Pelajar (PORJAR)	Jumlah keikutsertaan pelajar dalam olahraga		5,000 or	623,801,200	5,000 orang	964,432,200	5,000 orang	1,012,653,810.00	5,000 orang	1,063,286,501	5,000 orang	1,116,450,826	5,000 orang	1,172,273,367		5,952,897,903.85	Mudora	Jbr
Meningkatkan kemampuan /potensi pelajar di bidang Olahraga	Terwujudnya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	Jumlah Peserta O2SN	1	18	01	20	23	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	Jumlah keikutsertaan pelajar dalam olahraga		200 orang	280,027,000	200 orang	304,413,000	200 orang	319,633,650.00	200 orang	335,615,333	200 orang	352,396,100	200 orang	370,015,905		1,962,100,986.73	Mudora	Jbr
Meningkatkan kemampuan /potensi pelajar di bidang Olahraga	Terwujudnya Lomba-lomba olahraga	jumlah peserta yang mengikuti lomba	1	18	01	20	25	Lomba-lomba Olahraga	Jumlah peserta Lomba-Olahraga		780 orang	117,889,000	780 orang	128,804,800	780 orang	135,245,040.00	780 orang	142,007,292	780 orang	149,107,657	780 orang	156,563,039		829,616,828.03	Mudora	Jbr

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	RENCANA KERJA TAHUN 2011 - 2016												Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
							Tahun -1 2011		Tahun -1 2012		Tahun -3 2013		Tahun -4 2014		Tahun -5 2015		Tahun -6 2016		Target	Rp					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			1	18	01	21	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA																		
Meningkatkan kemampuan /potensi pelajar di bidang Olahraga	Terwujudnya sarana prasarana Olahraga	Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana olahraga	1	18	01	21	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah fasilitas/sarana prasarana olahraga yang terpelihara	-	-	4 sarana olahraga	100,000,000	4 sarana olahraga	150,000,000	4 sarana olahraga	150,000,000	4 sarana olahraga	150,000,000	4 sarana olahraga	150,000,000	4 sarana olahraga	150,000,000	700,000,000.00	Mudora	Jbr
Meningkatkan pengembangan ,menata dan mempromosikan obyek pariwisata			1	01	01	15	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya jumlah wisata yang berkunjung	70%	75%	415,000,000	80%	725,000,000	85%	825,000,000	90%	825,000,000	95%	825,000,000	100%	825,000,000	4,440,000,000.00			
	Meningkatnya Pengembangan Jaringan Kerjasama Pariwisata	Terjalinnnya jaringan kerjasama Pariwisata	1	01	01	15	03	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	Jumlah jegeg bagus bali (duta wisata) terpilih dan kerjasama promosi pariwisata yang dilaksanakan		1 psng duta wisata, 1 kerjasama promosi wisata	115,000,000	1 psng duta wisata, 1 kerjasama promosi wisata	175,000,000	1 psng duta wisata, 1 kerjasama promosi wisata	275,000,000	1 psng duta wisata, 1 kerjasama promosi wisata	275,000,000	1 psng duta wisata, 1 kerjasama promosi wisata	275,000,000	1 psng duta wisata, 1 kerjasama promosi wisata	275,000,000	1,390,000,000.00	Pariwisata	Jbr
	Meningkatnya Promosi Pariwisata	Terlaksananya Promosi Pariwisata	1	01	01	15	05	Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan luar negeri	Jumlah kegiatan promosi pariwisata yang dilaksanakan		2 kali promosi	300,000,000	2 kali promosi	550,000,000	3 kali promosi	550,000,000	3 kali promosi	550,000,000	3 kali promosi	550,000,000	3 kali promosi	550,000,000	3,050,000,000.00	Pariwisata	Jbr
			1	01	01	16	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI	Meningkatnya sarana dan prasarana Pariwisata	70%	75%	290,000,000	80%	990,000,000	85%	990,000,000	90%	990,000,000	95%	990,000,000	100%	990,000,000	5,240,000,000.00			
	Meningkatnya Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Terlaksananya Penataan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana	1	01	01	16	02	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah sarana dan prasarana Pariwisata yang terpelihara		1 kolam renang, 20 spd air, 1 Obyek wisata	40,000,000	1 kolam renang, 20 spd air, 1 Obyek wisata	660,000,000	1 kolam renang, 20 spd air, 1 Obyek wisata	660,000,000	1 kolam renang, 20 spd air, 1 Obyek wisata	660,000,000	1 kolam renang, 20 spd air, 1 Obyek wisata	660,000,000	1 kolam renang, 20 spd air, 1 Obyek wisata	660,000,000	3,340,000,000.00	Pariwisata	Jbr
	Meningkatnya Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan	Terlaksananya Penataan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana	1	01	01	16	03	Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan	Jumlah lomba makepung yang dilaksanakan		2 kali lomba	250,000,000	2 kali lomba	330,000,000	2 kali lomba	330,000,000	2 kali lomba	330,000,000	2 kali lomba	330,000,000	2 kali lomba	330,000,000	1,900,000,000.00	Pariwisata	Jbr
Meningkatnya Pengembangan Destinasi Pariwisata	Terwujudnya Pengembangan Destinasi Pariwisata	Terselenggaranya Kemitraan Pariwisata	1	01	01	17	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI	Prosentase Kemitraan Pariwisata	25%	35%	25,000,000	75%	55,000,000	75%	55,000,000	75%	55,000,000	75%	55,000,000	75%	55,000,000	300,000,000.00	Pariwisata	Jbr	
Meningkatnya Pemantauan dan Evaluasi Program	Terwujudnya Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan	Meningkatnya rogram kemitraan Pariwisata	1	01	01	17	06	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program	Jumlah evaluasi program kemitraan yang dilaksanakan		15 DTW dan 60 hotel	25,000,000	15 DTW dan 60 hotel	55,000,000	15 DTW dan 60 hotel	55,000,000	15 DTW dan 60 hotel	55,000,000	15 DTW dan 60 hotel	55,000,000	15 DTW dan 60 hotel	55,000,000	300,000,000.00	Pariwisata	Jbr
			Jumlah Usulan Anggaran Tahun 2011 - 2016									72,818,147,488		80,372,231,113		88,607,296,557.25		91,451,305,437.46		96,028,074,092.29		101,309,699,018.43	524,842,936,220.82		

Negara, 21 Juli 2011
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLARAGA
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBRANA

NENGAH ALIT. S.Pd
NIP. 19641215 198803 1 007